



# MEMORI DPRD

KABUPATEN

*Sumedang*

Periode Tahun 2004-2009



Diterbitkan oleh :

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang

2009

MEMORI DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG



# MEMORI DPRD KABUPATEN SUMEDANG

---

Periode 2004 - 2009

**Tim Penyusun :**

**Penasehat :**

Drs. ISMET SUPARMAT  
(Ketua DPRD Kabupaten Sumedang)

**Ketua :**

Ir. YOSEP SUHAYAT  
(Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang)

**wakil 1 :**

Drs. DACHLAN, MM  
(Kabag Umum)

**wakil 2 :**

YAYAT SUPRIAYATNA WIJAYA, S. Sos  
(Kepala Bagian Rumah Tangga Humas & Protokol)

**Sekretaris :**

Drs. HERMAWAN  
(Kabag Rapat & Risalah Perundang-undangan)

**Koordinator :**

WAWAN GUNAWAN, SMhk  
(Kasubag Risalah Perundang-undangan)

**Anggota :**

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Akhmad Mauludin, ST., M.Si | (Kasubag Rapat)        |
| 2. Dra. Fitriyani             | (Kasubag Tata Usaha)   |
| 3. Dra. Hj. Lina Rahmalia     | (Kasubag Rumah Tangga) |
| 4. Ahi                        | (Pelaksana)            |
| 5. Agus Suyaman, SH., MHk     | (Pelaksana)            |
| 6. R. Ervy Rahadyan, S.IP     | (Pelaksana)            |
| 7. Indra Hermawan S, S.IP     | (Staf Pelaksana)       |



## P A N C A S I L A

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT  
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA



**UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
1945**

**P E M B U K A A N**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan inikemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**GAMBAR DAN ARTI LAMBANG PEMDA SUMEDANG  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DATI II SUMEDANG**



- Lambang Kabupaten Sumedang diciptakan oleh R. MAHARMARTANAGARA, putra seorang Bupati Bandung Raden ADIPATI ARIA MARTANEGARA, keturunan Sumedang, Lambang ini diresmikan menjadi lambing Sumedang pada tanggal 13 Mei 1959.
- Hal-hal yang terkandung pada logo :
1. PRISAI : Melambangkan jiwa ksatria ulama, percaya kepada diri sendiri.
  2. SISI MERAH : Melambangkan semangat keberanian.
  3. DASAR HIJAU : Melambangkan kesuburan pertanian.
  4. BENTUK SETENGAH BOLA DAN BENTUK SETENGAH KUBUS PADA LINGGA : Melambangkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna.
  5. SINAR MATAHARI : Melambangkan semangat rakyat dalam mencapai kemajuan.
  6. WARNA KUCING EMAS : Melambangkan keluruhan budi dan kebesaran jiwa.
  7. SINAR YANG KE 17 ANGKA : Melambangkan angka sakti tanggal proklamasi Kemerdekaan Replubik Indonesia.
  8. DELAPAN BENTUK PADA LINGGA : Lambang Bulan Proklamasi Kemerdekaan Replubik Indonesia
  9. 19 BUAH BATU PADA LINGGA, 4 NUAH KAKI TEMBIK DAN 5 BUAH ANAK TANGGA : Lambang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Replubik Indonesia Tahun 1945.
  10. TULISAN INSUN MEDAL : Tulisan Insun Medal erta kaitannya dengan kata Sumedang yang mengandung arti
    - a. Berdasarkan Prabu TADJIMALELA, seorang tokoh legendaries dalam sejarah sumedang, Insus Medal berarti keluar (INSUN:Aku, Medal : keluar)
    - b. Berdasarkan data museum Pangeran Geusan Ulun : Insun Medal berarti (Insun:Daya, Madangan:Terang) kedua pengertian tersebut bersifat mistik.
    - c. Berdasarkan Prof. Anwas Adi wilaga Insun Medal berasal dari kata su dan Medang (Su:bagus dan Medang:jenis kayu yang bagus pada jati yaitu huru banyak tumbuh di Sumedang dulu) pengertian ini bersifat etimologi.



### SUMPAH/ JANJI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji:  
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota  
(Ketua/ wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang dengan sebaik - baiknya dan seadil -  
adilnya.

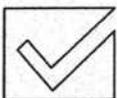
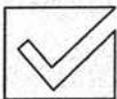
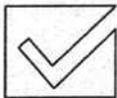
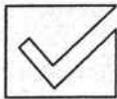
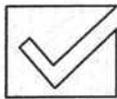
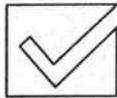
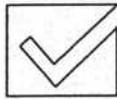
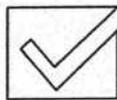
Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakan  
Undang Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.

Bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi serta  
berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik  
Indonesia.

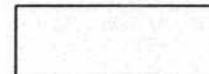
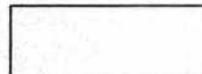
(Pasal 5, ayat (5) Keputusan *Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor:1 tahun 1999*)

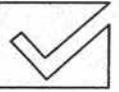
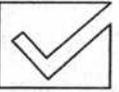
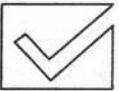
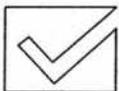
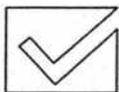
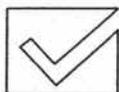
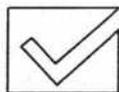


## KETUA DPRD KABUPATEN SUMEDANG



1. Nama Lengkap : Taufik Gunawansyah, S. Ip
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 11 November 1968
3. Alamat : Lingkungan Parigi, No. 12, RT. 05/16, Kel.Pasanggrahan Kec.Sumedang Selatan - Kab. Sumedang
4. Nomor tlp/ Hp : 0261- 205747/0811249778
5. Jenis kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
8. a. Nama istri : dr. Sri Dwi Omarsari, M.Kes
9. b. Jumlah Anak : 1 (satu)
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah pemilihan/ mewakili kecamatan : VI/ Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buandua, Surian
10. Pekerjaan : Pejabat Negara
11. Riwayat Pendidikan : a. SD Negeri Gudang Kopi Sumedang, lulus tahun 1981  
b. SMP Negeri 2 Sumedang lulus Tahun 1984  
c. SMA Negeri 1 Sumedang, lulus tahun 1987  
d. S-1, Jur.IIMU Pemerintahan, UNPAD, tahun 1994
12. Riwayat Organisasi : a. Ketua OSIS SMAN 1 Sumedang  
b. Ketua Ambalan Pramuka Dewi Sartika -- Suriatmadja  
c. HIMA Ilmu Pemerintahan, FISIP - UNPAD  
d. Senat Mahasiswa FISIP - UNPAD  
e. Bidang PTKP BADKO HMI Jawa Bagian Barat  
f. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sumedang  
g. Ketua DPC Pemuda Panca Marga Kab. Sumedang, tahun 2001 - Sekarang  
h. Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kab. Sumedang, tahun 1998 - Sekarang  
i. Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Provinsi Jawa Barat, tahun 2004 - Sekarang  
j. Ketua Persatuan Pencak Silat Indonesia Kab. Sumedang, tahun 2005 - Sekarang  
l. Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Kab.Sumedang, tahun 2005  
m. Ketua Dewan Penasehat KAHMI Kab. Sumedang, tahun 1999 - Sekarang  
n. Dewan Penasehat DEPICAB SOKSI Kab. Sumedang, tahun 2004 - Sekarang  
o. Dewan Penasehat PKP KOSGORO 1957 Kab. Sumedang, tahun 2005 - Sekarang  
p. Dwn Penasehat DPD AMPI Kab.Sumedang, thn 2004-Skg  
q. Dewan Penasehat DPC MKGR Kab. Sumedang, thm 2004 - Sekarang  
r. Dewan Penasehat Majelis Dakwah Islamiyah Kab. Sumedang, tahun 2004 - Sekarang  
s. Dewan Penasehat Al-Hidayah Kab. Sumedang, tahun 2004 - Sekarang  
t. Ket.DPD P.Golkar Kab.Sumedang, thn 2004-Skg
13. Riwayat Pekerjaan : a. Staff Pengajar Universitas Terbuka Kampus Sumedang, tahun 1995-1997  
b. Staff Pengajar STIR Sebelas April Sumedang, tahun 1999-2005  
c. Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, tahun 1997-2004  
d. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, tahun 2004-2008  
e. Wakil Bupati Sumedang, Periode 2008 - 2013
14. Riwayat Perjuangan : -
15. Jabatan di DPRD : Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, tahun 2004-2008





### KETUA DPRD KABUPATEN SUMEDANG

- 1. Nama Lengkap : Drs. Ismet Suparmat
- 2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 07 Desember 1949
- 3. Alamat : Jln. Raya Jatinangor No. 40 Rt. 02/02  
Desa.Hegarmanah Kec. Jatinangor Kab. Sumedang
- 4. Nomor tlp/ Hp : 08122399703
- 5. Jenis kelamin : Laki-laki
- 6. Agama : Islam
- 7. Status Perkawinan : Kawin
- a. Nama istri : Tita Puspita
- b. Jumlah Anak : 2 (dua)
- 8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
- 9. Daerah pemilihan/  
    mewakili kecamatan : I / Cimanggung Jatinangor
- 10. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Sumedang 2004-2009
- 11. Riwayat Pendidikan : SI STIA IANRI Bandung
- 12. Riwayat Organisasi : a. Pendiri Karang Taruna di Kel. Kota Kulon  
Sumedang Selatan 1996  
b. Pengurus KNPI Di Kab. Sumedang dan  
Kotamadya Cirebon 1975-1994  
c. 1975 - 1994, Pengurus AMS di Kab.  
Sumedang dan Ko. Cirebon  
d. 1994 - Sekarang, Pengurus Pemuda  
Pancasila Kab. Sumedang  
e. 1995 - 1999 Pengurus Yayasan Pendidikan  
Pelita Tiga (YPPT) Bandung  
f. 1998 - 1999, Pengurus LIVID Desa  
Hegarmanah  
g. 2000, Pendiri Koperasi Serbaguna Madya  
Swadya Jatinangor  
h. 2008 - Sekarang, Pengurus DKM AL -Huda  
Hegarmanah Jatinangor  
i. 2008 - Sekarang, Dewan Penasihat LPDKM  
Jawa Barat
- 13. Riwayat Pekerjaan : a. 1970 - 1974 Pegawai Pada PTP XIII  
Perkebunan Cisaruni Garut  
b. 1975 - 1977 Tenaga Honorer Pada Pekas.  
Kobang Diklat TNI AD Bandung  
c. 1977 - 1983 JUPEN ( PNS) pads KANDEPEN  
Ko Cirebon  
d. 1977 - 1999 PNS Pada Departemen  
Penerangan RI  
e. 1983 - 1995 PNS Pada Kantor Diklat Peg.  
DEPEN RI JABAR  
f. 1995 - 1995 PNS Pada KANDEPPEN Kab.Garut  
g. 1999/2004 - 2004/2009 Anggota DPRD Kab.  
Sumedang
- 14. Riwayat Perjuangan : -
- 15. Jabatan di DPRD : Ketua DPRD





### WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMEDANG

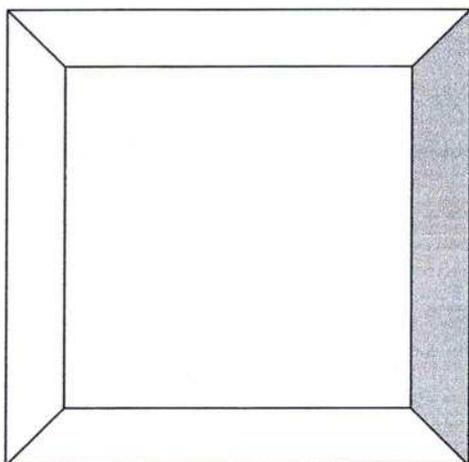
1. Nama Lengkap : Drs. Agus W Santoso, SH
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 17-08-1959
3. Alamat : Jl. Raya Ciherang No. 50
4. Nomor tlp/ Hp : 0261-207856/08122166525
5. Jenis kelamin : Pria
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
  - a. Nama istri : Ir. Tety Soeharti
  - b. Jumlah Anak : 2 Orang
8. Partai Politik : PDI Perjuangan
9. Daerah pemilihan/  
mewakilikecamatan : Rancakalong, Tanjungsari, Sukasari
10. Pekerjaan : -
11. Riwayat Pendidikan: S1 IKIP Bandung + S1 Hukum UNINUS
12. Riwayat Organisasi: a. Ketua DPC PDIP 1999  
b. Ketua DPC PDIP 2004  
c. Wakil Ketua DPD PDIP Jabar
13. Riwayat Pekerjaan : a. Guru SMA s/d 1994  
b. Pengacara s/d 2001  
c. Wiraswasta
14. Riwayat Perjuangan: Pengurus PDIP
15. Jabatan di DPRD : Wakil Ketua DPRD Kab. Sumedang



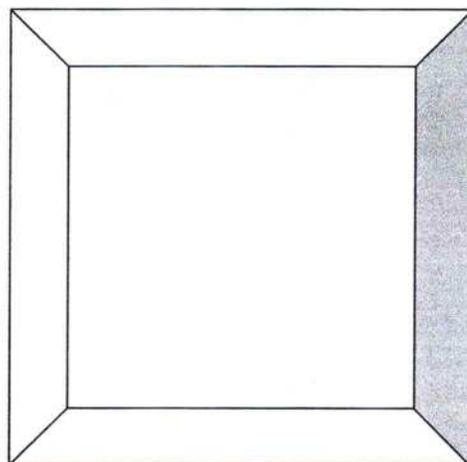
### WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMEDANG

1. Nama Lengkap : H.DONY AHMAD MUNIR, ST., MM
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang/ 05-12-1973
3. Alamat : Jl. Kaum No. 20 Sumedang
4. Nomor tlp/ Hp : (0261) 202 547/ 081 221 842 96
5. Jenis kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
  - a. Nama istri : .....
  - b. Jumlah Anak : .....
8. Partai Politik : PPP
9. Daerah pemilihan/  
mewakili kecamatan : Sumedang Selatan
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : a. STTG Garut  
b. UNPAD
12. Riwayat Organisasi : a. IPNU  
b. Senat Mahasiswa  
c. PMII  
d. KNPI
13. Riwayat Pekerjaan : a. Asisten Dosen  
b. Anggota DPRD 1997-1999
14. Jabatan di DPRD : a. Ketua Fraksi PPP  
b. Anggota Komisi C  
c. Sekretaris Harian Pangar  
d. Wakil Ketua DPRD

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUMEDANG



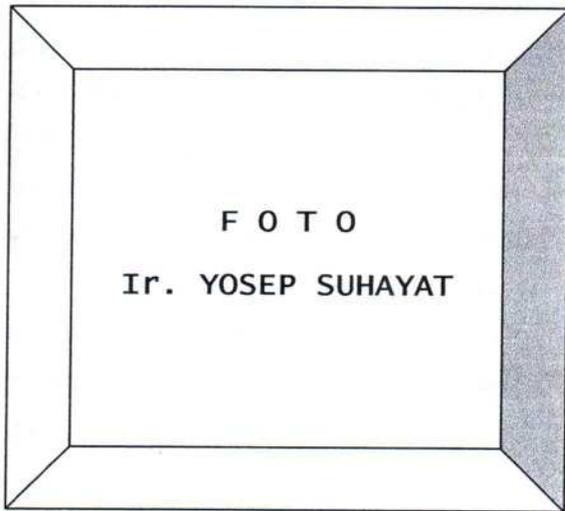
IWA KUSWAERI  
Sekretariat DPRD .....



Ir. YOSEP SUHAYAT  
Sekretariat DPRD.....

## KATA PENGANTAR

---



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat illahi robi, atas petunjuk dan ridhonya Buku Memori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang periode 2004 - 2009 dapat diterbitkan dengan maksud untuk memberikan gambaran kinerja dan hasil hasil kegiatan DPRD dalam kurun lima tahun.

Selain sebagai dokumentasi dengan diterbitkannya buku ini bertujuan sebagai Laporan Pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat Kabupaten Sumedang, dalam mengemban tugas, fungsi dan perannya baik sebagai lembaga pengatur (legislasi), penganggaran maupun sebagai lembaga control atau pengawasan.

Buku ini disusun oleh Tim Khusus yang dikoordinasikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang dengan materi berdasarkan arsip-arsip kegiatan DPRD selama lima tahun, yang dijadikan sebagai sumber primer penulisan. Untuk melengkapi informasi dan gambaran yang dipaparkan pada bab-bab pembahasannya, kami sajikan pula data pendukung serta foto-foto berbagai kegiatan yang dilaksanakan DPRD selama masa baktinya.

Penyusunan buku ini dapat terealisasi sesuai dengan program kerja Sekretariat DPRD, tidak lain atas kerjasama dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu,

selayaknyalah kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut menyumbangkan baik tenaga, waktu maupun pemikiran-pemikiran, sehingga buku ini dapat diterbitkan. Kepada Allah SWT jualah, segala kebaikan berbagai pihak kami kembalikan untuk membalasnya.

Kami berusaha untuk dapat menyajikan yang terbaik pada penerbitan Buku Memori ini, namun demikian sebagai layaknya manusiam sudah barang tentu kami tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, serta kekhilafan. Oleh karena itu dalam penyusunan dan penerbitannya tidak tertutup kemungkinan masih banyak kekurangan. Segala masukan, baik saran maupun kritik demi perbaikan di masa yang akan datang kami sambut dengan lapang dada.

Tidak ada harapan lain dengan segala kelebihan dan kekurangan yang terdapat didalamnya, kehadiran Buku Memori DPRD Kabupaten Sumedang Period 2004 - 2009 bisa dipetik manfaatnya.

Semoga.

Sumedang, ..... 2009

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG

Ir. YOSEP SUHAYAT

## SAMBUTAN

### KETUA DPRD KABUPATEN SUMEDANG

Segala puji milik Allah SWT, semata, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan karunianya kepada kita sekalian. Solawat serta salam semoga terus dicurahkan kepada junjunan kita Nabi Muhamad Rosululloh, SAW, kepada para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir jaman.



Dengan hati penuh rasa syukur atas segala nikmat-Nya, *Alhamdulillah* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang Period 2004 - 2009 telah dapat melaksanakan dan mengakhiri masa bakti keanggotannya.

Adalah suatu realitas sejarah, masa keanggotaan DPRD 2004 - 2009 merupakan rentang waktu penuh nuansa dan dinamika yang jauh berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Sebuah perjalanan tugas dalam kurun waktu lima tahun yang diwarnai fenomena peri=ubahan-perubahan social yang berlansung cepat dan besar-besaran, dalam berbagai aspek kehidupan. Khususnya perubahan system politik dan pemerintahan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik dalam format Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang nomor 5 tahun 1974.

Sebagaiman kita maklumi, system politik dan pemerintahan senantiasa bersenyawa dengan system komunikasi, termasuk komunikasi politik. Sehingga

perubahan system politik dan pemerintahan yang terjadi di era -reformasi yang kemudian melahirkan era otonomi, membawa perubahan pula pada system komunikasi politik yang dilaksanakan DPRD sebagai komuniktor suprastruktur ploitik daerah.

Orientasi komunikasi politik yang dibangun jaman reformasi, bukan komunikasi satu arah yang berorientasi propaganda, melainkan komunikasi politik yang berorientasi pada banyak arah dan mengedepankan pelayanan. Bukan pula komunikasi politik yang melekatkan fungsi pengawasannya secara vertical terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, melainkan pengawasan yang menyamping serta dari bawah ke atas.

Dengan demikian orientasi komunikasi politik dan Pembangunan daerah, telah berubah dari paradigma yang bersifat teknis dan ekonomis semata, menjadi komunikasi politik dan Pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat dan hak azasi. Menguatnya tuntutan demokrasi, trasnparansi dan hak azasi di era reformasi, menuntut paradigma baru komunikasi politik seperti yang saya utarakan diatas, sehingga komunilasi politik yang dilaksanakan DPRD Kabupaten Sumedang sebgai lembaga legislative daerah, senantias merefleksikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam setiap mekanisme/ perencanaan pelaksanaan dan pengawasan/ evaluasi kebijakan umum Pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang.

Dalam waktu lima tahun masa keanggotaan DPRD 2004 - 2009, kami banyak merasakan suka-dukannya dalam mengemban tugas sebagai anggota perwakilan rakyat daerah. Salah satu kebahagiaan kami adalah lembaga DPRD telah dapat berjalan dengan baik seusuai dengan fungsinya, antara lain ditandai dengan keberhasialan melahirkan produk-produk normative (produk hukum) yang menjadi dasar pijakan dalam mengelola system penyelenggaraan pemerintahaan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang. Hal ini menandakan, bahwa system nilai dapat berproses dengan mulus, sebab bila lembaga ini macet atau tidak melakukan

fungsinya, maka akan macetlah totalitas system yang ada. Hal ini menandakan pula bahwa komunikasi/ hubungan fungsional antara legistaif dan exsekutif daerah sebagai mitra kerja berlangsung secara baik sesuai dengan ketentuan konstutisional.

Dari kinerja dan kegiatan yang dilaksanakn DPRD Kabupaten Sumedang selama lima tahun, cukup banyak pula hal yang menarik perhatian daerah lain untuk kemudian melakukan studi banding ke Sumedang. Dengan tidak bermaksud membanggakan diri, Sumedang telah berhasil melahirkan kebijakan-kebijakan bersifat terobosan dalam rangka mendorong implementasi otonomi daerah, antara lain merupakan daerah pertama yang berhasil membentuk Badan-Badan Perwakilan Desa di seluruh Kabupaten Sumedang, dan melaksanakan *Fit and Pro<sup>for</sup> Pertest* yang pertama di Jawa Barat dan bahkan di Indonesia dalam proses pemilihan Kepala Daerah dengan format Undang-Undang nomor 22 tahun 1999.

Namun demikian kami pun menyadari, apabila informasi mengenai kinerja dan hasil kegiatan lembaga legislative DPRD selama kurun lima tahun, relative kurang banyak diketahui secara luas oleh masyarakat. Sebab antara lain, karena DPRD sebagai suprastruktur politik dan bersifat operatif. Dalam artian, melakukan kegiatan operasional terhadap seluruh strata masyarakat, disamping itu DPRD tidak mempunyai aparat pelaksana sebagaimana yang terdapat pada lembaga eksekutif.

Disamping kelebihan dan keberhasilan, sudah barang tentu masih cukup banyak pula kekurangan dalam pelaksanaan tugas ini, antara lain masih terdapat sejumlah problematika yang tumbuh di masyarakat yang masih memerlukan kajian DPRD, sehingga aspirasi yang belum terwakili di lembaga ini belum seluruhnya terakomodasi untuk dicarikan solusinya. Besar harapan problematika-problematika yang masih tersisa semas keanggotan DPRD 2004-2009, menjadi bahan kajian pula dan didapati solusinya oleh anggota DPRD Kabupaten Sumedang periode 2009-2013.

Dengan terbitnya Buku Memori DPRD Kabupaten Sumedang periode 2004 - 2009, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kinerja dan hasil kegiatan yang telah dicapai selama lima tahun. Disamping sebagai bahan informasi bagi para anggota DPRD yang baru dan berbagai pihak yang berkepentingan, buku ini sekaligus merupakan laporan pertanggung jawaban pelaksana tugas DPRD kepada rakyat yang diwakili.

Semoga bermanfaat.

Terima kasih atas perhatian Sidang Pembaca.

wassalaamualaikum wr. wb.

Sumedang, ..... 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,

Drs. ISMET SUPARMAT

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar	i
Sambutan Ketua DPRD	ii
Daftar Isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	5
C. METODE PENYUSUNAN	6
D. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG	8
A. GEOGRAFIS	8
B. DEMOGRAFIS	9
C. PEMERINTAHAN	11
D. PEMBANGUNAN	13
E. PRASARANA PERHUBUNGAN	19
F. KEMASYARAKATAN	20
1. Pendidikan	20
2. Keagamaan	21
3. Tradisi Budaya Daerah	23
G. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMEDANG	25
H. MOTTO KABUPATEN SUMEDANG	30
BAB III : KEDUDUKAN FUNGSI DAN PERANAN SETA PRAKONDISI PELAKSANAAN TUGAS DPRD KABUPATEN SUMEDANG PEIODE 2004 - 2009	32
A. KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG	32
B. HAK DAN KEWAJIBAN	35
1. Hak- Hak DPRD	35
2. Kewajiban DPRD	35
C. ALAT KELANGKAPAN DPRD	36
D. JENIS-JENIS RAPAT	36
E. ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT	37
F. KONDISI UMUM (EKSTERNAL) AWAL PELAKSANAAN TUGAS	38
1. Dampak Globalisasi	38
2. Krisis Multidimensi	40
3. Gerakan Reformasi	41
4. Masa transisi era otonomi daerah	43
G. KONDISI KHUSUS (INTERNAL)	45
1. Keangotaan DPRD Hasil Pemilu dan TNI/ POLRI yang diangkat	45
2. Tugas dan Personalia alat kelengkapan DPRD	47
3. Visi dan Misi DPRD Kab. Sumedang	55
H. SEKRETARIAT DPRD	56



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan berdasarkan kontrak sosial. Sebagaimana tersurat dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Soekarno Hatta menyatakan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pasal 1 ayat (2) Undang-undang dasar 1945 menyatakan : “ Kedaulatan adalah ditangan rakyat. Sebagai Negara demokratis yang konstitusional Negara Indonesia mengaut trias politika, yaitu kekuasaan otoritatif dipilih kedalam tiga lingkup kekuasaan terpisah yang terdiri dari Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, rakyat sebagai pemegang kedaulatan memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis. Dengan demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga Legislatif Daerah dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, pada hakekatnya adalah mengemban amanah rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan, dalam upaya untuk mencapai tujuan nasional, yaitu Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum Serta Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penyelenggaraannya dilaksanakan melalui penciptaan mekanisme dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya rakyat, yang diselenggarakan atas dasar permusyawaratan melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Keanggotaan DPRD Kabupaten Sumedang Periode 2004 - 2009, merupakan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dan kehadirannya bertepatan dengan momentum strategis yaitu

lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menjadi landasan bagi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun sejarah lahirnya undang-undang No 32 Tahun 2004, sebelumnya lahir undang-undang No 22 Tahun 1999 yang substansinya sama-sama tentang otonomi daerah, yang titik beratnya berada pada daerah kabupaten/kota. Sebelum kedua undang-undang diatas lahir, undang-undang tersebut sebagai pengganti UU nomor 5 tahun 1974, membawa perubahan paradigma manajemen pemerintahan Daerah dari pendekatan yang sarat dengan sentuhan sentralistik yang mencerminkan besarnya kekuasaan pusat menjadi pendekatan sesentralistik keberdayaan daerah.

Perubahan manajemen Pemerintahan Daerah tersebut, melahirkan komitmen Nasional untuk menempatkan aspek pelayanan Publik, Demokratisasi, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat keaneka ragaman dan pola hubungan legislatif/ eksekutif yang makin egaliter dan proposional, sebagai prinsip sekaligus parameter bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga menumbuhkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsinya dalam forum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan mendasar dari paradigma manajemen Pemerintahan Daerah antara lain susunan rumah tangga daerah, pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, kedudukan DPRD sejajar dan mitra kerja Kepala Daerah, system hubungan keuangan yang baru, sistem pengawasan dll, merupakan ketentuan-ketentuan yang bermaksud agar otonomi sebagai salah satu sendi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai dengan pengertian dasar dan semangat otonomi. Namun demikian, otonomi adalah merupakan sub system dalam Negara kesatuan, karena itu, betapun luasnya otonomi, betapun besarnya kekuasaan daerah otonom, harus senantiasa ditempatkan dalam kerangka Negara Kesatuan. Bandul

kesatuan dan bandul otonomi harus senantiasa terpelihara dan dibiarkan berayun dalam harmoni berimbang sebagai pendorong dinamika yang saling mengukuhkan antara perinsip kesatuan dan prinsip berotonomi.

Dampak dari perubahan tersebut membawa konsekuensi, bahwa otonomi yang luas berarti penambahan beban yang luas pula bagi DPRD, karena tidak hanya memerlukan sumber daya keuangan yang cukup, akan tetapi memerlukan sumber-sumber daya lain seperti sumber daya manusia, sumber daya menejemen dan lain-laian. Untuk menjawab tuntutan dan tantangan dalam upaya mendorong implementasi otonomi daerah, maka DPRD kabupaten Sumedang yang memiliki kedudukan sejajar dan mitra kerja Pemerintah Daerah, terus berusaha secara optimal untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah peluang sekaligus tantangan yang memberi makna, bahwa daerah dituntut mampu mengembangkan dan mengali berbagai potensi, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki menuju pencapaian kemakmuran dan kemandirian pembangunan daerah. Tantangan kemandirian daerah, sudah barang tentu menjadi tantangan pula bagi DPRD sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Tantangan besar yang dihadapi antara lain : (1) Potensi apa yang dapat dikembangkan dalam pembangunan Daerah, (2) Bagaimana pengelolaan Sumber daya alam yang bijak dan lestari, (3) Pola pembangunan bagaimana yang cocok dengan Kabupaten Sumedang, (4) Dariman sumber - sumber pembiyaannya. Kesemuanya itu, perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dan strategi yang tepat.

Oleh karena itu DPRD Kabupaten Sumedang sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki terus berusaha meningkatkan kapasitas daerah memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik dari pelayanan pemerintah, kapasitas

sosial ekonomi masyarakat, maupun ketersediaan sumber daya alam yang ada di daerah.

Otonomi daerah hanya akan mencapai tujuannya tujuannya secara optimal, apabila dalam proses pelaksanaannya mendapatkan dukungan penuh (partisipasi) aktif dari seluruh masyarakat, mulai dari sejak identifikasi permasalahan, pengambilan keputusan, penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban.

Dalam kaitan inilah, DPRD kabupaten Sumedang selalu berusaha membangun iklim yang dapat melibatkan masyarakat secara luas dengan memperhatikan kesetaraan (menghilangkan komunikasi geep) dalam proses pengambilan keputusan yang ditetapkan. Dengan demikian diharapkan masing-masing komponen dan elemen. Masyarakat dapat memeberikan konstribusi pemikiran dan pengembangan potensi dirinya secara maksimal, sehingga pelaksanaan dari setiap kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan lancar serta dapat mencapai tujuan secara optimal pula.

Tantangan besar lainnya yang dihadapi oleh DPRD periode 2004 - 2009 yaitu Mendorong terwujudnya Good For Nice yang mengandung pengertian sebagai nilai-nilai menjungjung tinggi kehendak rakyat dan nila-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian daerah, pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Sedikitnya ada 9 faktor yang sebagai kriteria yang menjadi rujukan dan pegangan bagi DPRD dalam rangka mendorong terciptanya Good Governice di Kabupaten Sumedang, yaitu : (1) Partisipasi, (2) Supremasi Hukum, (3) Transparansi, (4) Responsivitas, (5) Ekwiti atau memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga utnuk meningkatkan kesejahteraan, (6) Efektifitas dan efisiensi, (7) Akuntabilitas, (8) Fisioner, (9) Strategi Visi yaitu persepektif Good Governice oleh segenap elemen dan komponen masyarakat dan pemerintah, serta pengembangan sumberdaya manusia yang menjangkau jauh kedepan seirama dengan tuntutan

Pembangunan Daerah dalam kerangka otonomi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kurun waktu tersebut, DPRD, telah berhasil melaksanakan tugas Pokok, fungsi dan peran sebagai Lembaga Legislatif yang secara garis besarnya meliputi : Pembuatan peraturan Daerah (Perda, menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintahan Daerah, dan membahas serta mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai misi yang diemban sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

*No Report no job*, demikian bunyi sebuah ungkapan, bahwa bila tidak ada laporan pelaksanaan pekerjaan sama artinya dengan tidak ada pekerjaan. Atas dasar pemikiran bahwa DPRD periode 2004-2009 dipandang perlu memberikan Laporan pertanggung-jawabannya kepada masyarakat, maka disusunlah *Buku Memori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, Periode 2004-2009*.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. MAKSUD

Buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan hasilnya serta analisis dan evaluasi secara umum terhadap masalah-masalah yang dianggap menonjol selama tahun 2004-2009 di Kabupaten Sumedang dengan mengetengahkan peran DPRD sebagai Lembaga Legislatif dan mitra sejajar Pemerintah serta penyalur aspirasi rakyat

### 2. TUJUAN

- 2.1 Mendokumentasikan data, fakta dan karya nyata DPRD Kabupaten Sumedang, sebagai suatu realita sejarah Pemerintahan Kabupaten Sumedang.
- 2.2 Sebagai Laporan Pertanggungjawaban kepada masyarakat ;
- 2.3 Bahan informasi bagi berbagai pihak khususnya bagi anggota DPRD periode 2009-2014 dan pihak

eksekutif sebagai bahan masukan dan kajian dalam melanjutkan upaya-upaya pembangunan disegala bidang kehidupan di Kabupaten Sumedang, sehingga laporan ini merupakan Akan datang, didalamnya terdapat data dan fakta yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas baik eksekutif maupun DPRD Kabupaten Sumedang periode yang akan datang.

- 2.4 Sebagai bahan kepustakaan daerah yang dapat dijadikan bahan referensi dan penelitian bagi yang berkepentingan/ memerlukan;
- 2.5 Sumbangsih atas karya dan pengabdian, serta kenang-kenangan akhir tugas anggota DPRD periode 2004-2009.

### C. METODE PENYUSUNAN

Buku memori ini disusun menggunakan metode pendekatan dan penyusunan sebagai berikut :

#### 1. Deskriptif Analisa

Dengan metode ini digambarkan dan dipaparkan tentang kegiatan DPRD Kabupaten Sumedang, dengan harapan akan diperoleh gambaran obyektif, sistematis dan kualitatif. Analisa kegiatan ini diharapkan dapat dikaji seberapa jauh pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada kurun waktu 2004-2009, apa permasalahan, hambatan dan solusinya.

#### 2. Pendekatan Historis

Dengan metode ini dicoba sajikan dan dipaparkan data dan karya DPRD Kabupaten Sumedang periode 2004-2009 yang berakar pada sejarah dan budaya daerah yang telah diletakan sebagai landasan oleh para pendahulu, dalam rangka menghadapi peluang dan tantangan serta tuntutan perubahan sosial;

#### 3. Studi Perbandingan

Studi perbandingan dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke luar daerah kabupaten dan Provinsi Jawa barat dengan maksud untuk mendapatkan

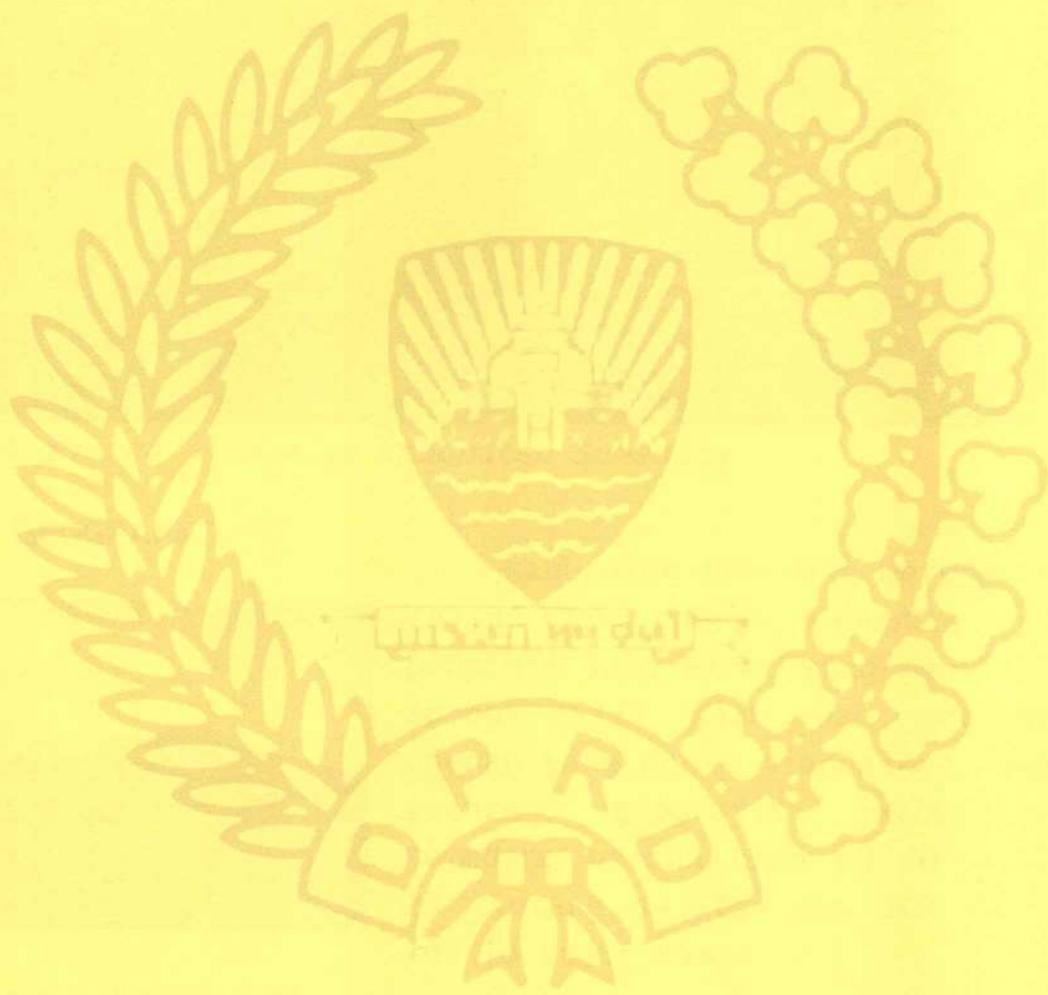
gambaran yang lebih obyektif sekaligus lebih memperluas ruang lingkup wawasan tentang hal-hal yang menjadi ruang lingkup tugas DPRD Kabupaten Sumedang

#### D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penulisan dan mempermudah bagi pembaca memahami buku ini, sistematika penyusunan buku ini dibagi kedalam lima bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab, sesuai dengan masalah yang dibahas ditambah halaman-halaman lampiran. Secara garis besarnya, sistematika buku ini penulisan adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN  
Menguraikan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Metode dan Sistematika Penyusunan.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG  
Segara gambaran kondisi dan potensi, serta Visi dan Misi, serta Moto Filosofis, Moto Juang dan Moto Operasional Pemabangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
- BAB III : KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERANAN, SERTA PRAKONDISI PELAKSANAAN TUGAS
- BAB IV : KINERJA DAN KEGIATAN DPRD 2004 – 2009  
Menggambarkan tentang kinerja dan pelaksanaan tugas beserta hasil-hasilnya yang telah dicapai DPRD selama kurun waktu 2004-2009.
- BAB V : PENUTUP  
Berisi kesimpulan dan rekomendasi

LAMPIRAN – LAMPIRAN

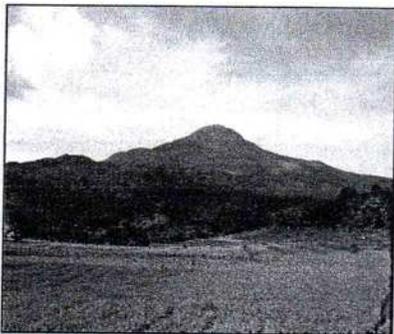


## BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG



↓ *Lingga Alun Alun Kabupaten Sumedang*

### A. GEOGRAFIS



Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah kabupaten di propinsi Jawa Barat yang memiliki sumber daya alam dan potensi daerah yang dapat diandalkan. Dan secara geografis Kabupaten Sumedang berada pada 60 40 - 70 23 lintang selatan dan 107 44 - 108 13 Bujur Timur,

dengan batas wilayah sebelah utara : Kabupaten Indramayu, sebelah timur Kabupaten Majalengka, sebelah selatan Kabupaten Garut dan sebelah barat Kabupaten Bandung.

Luas wilayahnya 1.552,20 KM atau 152.219.950 Ha. Secara fisik kondisi topografi Kabupaten Sumedang merupakan daerah berbukit-bukit pada bagian



selatan dan bagaian timur berupa dataran rendah dengan sedikit kemiringan pada bagian utara dan barat.

Dari seluruh daratan 11,47 % mempunyai ketinggian lebih dari 1.100 M diatas permukaan laut. Kondisi topografi yang berbukit dan lembah, merupakan salah satu faktor Kabupaten Sumedang tidak mengenal musim panen raya dan tidak pula mengenal paceklik berkepanjangan, karena pada saat di daerah bukit menanam padi sementara itu daerah lembah/ dataran rendah sedang musim panen.

## **B. DEMOGRAFIS**

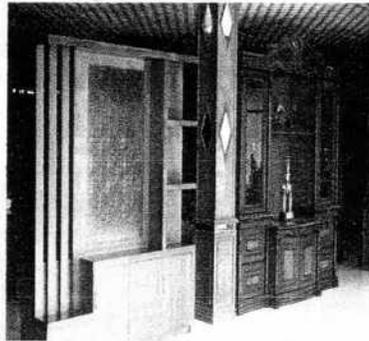
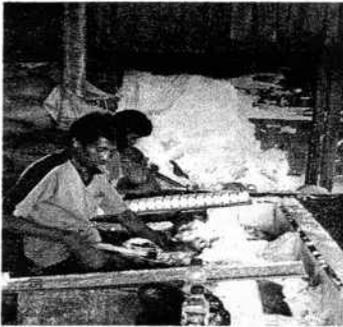
Luas wilayah Kabupaten Sumedang 1.522,21 km<sup>2</sup>. Kabupaten Sumedang terbagi menjadi 26 kecamatan dan 279 desa/kelurahan.

Perkembangan Kabupaten Sumedang masih didominasi oleh pertanian, khususnya tanaman pangan padi. Daerah penghasil utama padi terkonsentrasi di Kecamatan Darmaraja, Wado, Ujungjaya, Conggeang, dan Buahdua. Tanaman diluar padi, produk unggulan lainnya adalah jagung, pisang, kacang gondolo, kencur, dan jeruk.

Kabupaten ini juga memiliki hasil pertanian khas lokal yaitu ubi cilembu. Ubi ini cukup terkenal bagi mereka yang kerap melakukan perjalanan ke berbagai tempat wisata baik di sepanjang jalan Ciawi menuju Sukabumi, Ciawi menuju puncak, atau berbagai jalan menuju lokasi wisata di sekitar Bandung. Ubi ini hanya cocok tumbuh di tanah Kecamatan Tanjung sari. Selain ubi, daerah Sumedang Selatan juga menghasilkan jeruk Cikoneng, sawo semir, salak bongkok, dan pisang. Terakhir, kondisi tanahnya yang berbukit-bukit bisa dimanfaatkan menjadi lahan tanaman obat-obatan sekaligus wisata kesehatan.

Tahu sumedang merupakan makanan ciri khas dari kabupaten ini. Saking terkenalnya makanan ini tidak hanya terdapat di Sumedang tapi juga dikota-kota lain. Selain tahu, Kabupaten Sumedang, tepatnya di daerah yang

disebut Jatinangor, dikenal juga sebagai pusat pendidikan. IPDN, Ikopin, Universitas Winaya Mukti, dan Unpad adalah empat perguruan tinggi negeri dan swasta yang berada di Jatinangor. Selain di Jatinangor, di Sumedang Kota juga terdapat perguruan tinggi, yaitu Universitas Sebelas April Sumedang.



*Industri Rumah tangga merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Kabupaten Sumedang*

Kabupaten ini juga menghasilkan barang-barang industri meubelair dan kerajinan tangan yang khas seperti wayang golek dengan berbagai tokohnya (Semar, Cepot, Gareng, Dawala, Rama, Shinta), alat musik angklung, kendang, panah, tombak, hiasan dinding berbentuk cecak dan kepala orang indian hingga patung asmat.

### C. PEMERINTAHAN



↓ *Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang*

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau yang dikenal dengan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Kabupaten Sumedang meliputi 26 Kecamatan, 272 desa dan 7 Kelurahan. Sesuai dengan Perda Nomor 54 tahun 2000 tentang pembentukan Kecamatan di Kabupaten Sumedang mengalami perkembangan dari 18 menjadi 26 kecamatan yaitu sebagai berikut :

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Kecamatan Wado        | 14. Kecamatan Cimanggung       |
| 2. Kecamatan Jatinunggal | 15. Kecamatan Jatinangor       |
| 3. Kecamatan Darmaraja   | 16. Kecamatan Rancakalong      |
| 4. Kecamatan Cibugel     | 17. Kecamatan Sumedang Selatan |
| 5. Kecamatan Cisitu      | 18. Kecamatan Sumedang Utara   |
| 6. Kecamatan Situraja    | 19. Kecamatan Ganeas           |

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 7. Kecamatan Conggeang    | 20. Kecamatan Tanjungkerta |
| 8. Kecamatan Paseh        | 21. Kecamatan Tanjungmedar |
| 9. Kecamatan Surian       | 22. Kecamatan Cimalaka     |
| 10. Kecamatan Buah Dua    | 23. Kecamatan Cisarua      |
| 11. Kecamatan Tanjungsari | 24. Kecamatan Tomo         |
| 12. Kecamatan Sukasari    | 25. Kecamatan Ujungjaya    |
| 13. Kecamatan Pamulihan   | 26. Kecamatan Jatigede     |

Demikian pula mengenai organisasi perangkat daerah, melalui upaya penataan kelembagaan dalam rangka implementasi otda, organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumedang menjadi 14 dinas, 9 buah badan, dan 3 buah kantor.

Peraturan Pemerintah 41 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 Asisten Daerah, 4 Staff Ahli, 9 Bagian dan 30 sub bagian
2. Dinas Daerah terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan
  - b. Dinas Kesehatan
  - c. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
  - d. Dinas Peternakan dan Perikanan
  - e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
  - f. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
  - g. Dinas Pekerjaan umum.
  - h. Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan
  - i. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
  - j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - k. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - l. Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
  - m. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - n. Dinas Pendapatan

### 3. Lembaga Teknis Daerah

#### Berbentuk Badan

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Badan Kepegawaian Daerah
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
- d. Badan Ketahanan pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Peizinan
- f. Badan Lingkungan Hidup
- g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- h. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
- i. INSPEKTORAT

#### Berbentuk Kantor

- a. Kantor Arsip Daerah
- b. Kepala Kantor Perpustakaan Daerah
- c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun untuk Sekretariat DPRD ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

#### D. PEMBANGUNAN

Pembangunan merupakan usaha peningkatan derajat kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan berdasarkan kepada kemampuan memanfaatkan dan mendayagunakan potensi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan tantangan perkembangan, baik regional, nasional maupun global.

Seusai dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang "KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025". Visi tersebut

dapat diringkaskan menjadi "SUMEDANG SEHATI", yang diartikan sebagai kabupaten yang makin kokoh dan berdaya juang tinggi dalam membangun daerahnya dengan dilandasi orientasi masyarakat.

❏ *Lokasi Saung Budaya Sumedang terletak 1 KM setelah keluar dari Pintu Tol Cipularang di Cileunyi dan hanya di tempuh kurang lebih 3 menit dari pintu tol menuju ke arah kota Sumedang, Majalengka, Cirebon dan ke Jawa Tengah lewat jalur Pantura*



Pembangunan pada Satuan Kawasan Wisata Sumedang Kota Antara lain berupa perbaikan Gedung Nasional menjadi sebuah ruang public berbagai aktifitas masyarakat, baik sarana, seni-budaya, olah raga (bulu tangkis) dan aktivitas lainnya, terutama bagi kalangan generasi muda. SKW Sumedang Kota ditandai pula dengan penataan Alun-alun Pusat kota Sumedang menjadi sebuah arena rekreasi masyarakat yang cukup menarik minat warga kota Sumedang untuk rekreasi. Program yang lain yang telah berhasil dilaksanakan Kabupaten Sumedang dalam upaya mewujudkan daerah pariwisata antara lain, dengan dibangunnya *Kampung Sunda* dikawasan Gunung Lingga, desa Cimarga Kecamatan Cisitu. Kehadiran pemukiman masyarakat yang menempati rumah-rumah berasitektur tradisi sunda ini, diharapkan dapat menunjang potensi dan daya tarik wisata Gunung Lingga selama ini dikenal sebagai obyek wisata budaya, sejarah dan ziarah.

Kebijakan kewilayahan sinergis dengan amanat peraturan-peraturan perundangan dan kondisi lokal, regional dan nasional, antara lain Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang RTRWP, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Sumedang.

Dengan mempertimbangkan berbagai asas penataan ruang antara lain keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.

Dalam pengaturan rencana struktur ruang terutama sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana serta pola ruang sesuai fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya, kawasan perkotaan dan perdesaan serta kawasan strategis nasional dan provinsi yang ada di wilayah kabupaten serta kawasan strategis kabupaten yang dibarengi dengan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Kebijakan dimaksud antara lain dalam rangka:

1. Strategi penetapan kawasan lindung
  - Mempertahankan/menambahkan kawasan lindung yang terdapat di wilayah Kabupaten Sumedang.
  - Mengendalikan kawasan lindung dengan mengembangkan kawasan penyangga/*buffer zone*.
  - Menetapkan kawasan berfungsi lindung yang juga mencakup perlindungan terhadap kawasan rawan bencana dan kawasan lindung setempat.
2. Strategi penempatan kawasan budidaya

Secara umum kawasan budidaya diarahkan dengan mengakomodasikan kegiatan secara optimal, berdayaguna dan berhasil guna serta tentunya

harus berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kawasan budidaya yang akan diarahkan pengembangannya meliputi kawasan pedesaan/budidaya pertanian dan kawasan perkotaan/budidaya non pertanian (tanaman lahan basah, tanaman lahan kering, tanaman tahunan, permukiman, industri, pariwisata dan pertambangan/penggalan).

Berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang tahun 2002 yang rencananya akan direvisi pada tahun 2009 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, dalam pengembangan wilayah dibagi menjadi 5 Wilayah Pengembangan (WP) yaitu :

1. WP Sumedang Kota, terdiri dari 8 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta dan Tanjungmedar dengan pusat kegiatan di Sumedang Kota.
2. WP Tanjungsari, terdiri dari 6 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan dan Rancakalong dengan pusat kegiatan di Kota Tanjungsari.
3. WP Wado, terdiri dari 6 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado dan Jatinunggal dengan pusat kegiatan di Kota Wado-Darmaraja.
4. WP Tomo, terdiri dari 3 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Jatigede, Tomo dan Ujungjaya dengan pusat kegiatan di Kota Tomo.
5. WP Buahdua, terdiri dari 3 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Conggeang, Buahdua dan Surian dengan pusat kegiatan di Kota Buahdua.

Sinergitas antara kondisi dan rencana strategis kabupaten dan kawasan andalan cekungan Bandung serta

Bandung Metropolitan Area (BMA) antara lain kawasan perguruan tinggi Jatinangor, zona industri Jatinangor dan Cimanggung, Jalan Tol Cisumdawu, Waduk Jatigede, Zona Industri Ujungjaya, Bandara Kertajati Majalengka, Rencana Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang serta mendorong pertumbuhan wilayah yang belum tumbuh dan masih tertinggal dan mengendalikan pertumbuhan wilayah yang relatif cepat seperti Jatinangor dan Cimanggung.

Dalam implementasinya senantiasa simultan antara perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sehingga revisi RTRW Kabupaten dan revisi serta penyusunan RDTR kawasan perkotaan dan perdesaan atau kecamatan serta kawasan strategis kabupaten termasuk didalamnya kerjasama penataan kawasan perbatasan, kawasan permukiman kumuh, ruang investasi, pemenuhan pangan, dan mitigasi bencana perlu dilakukan dengan sinkron dengan pengaturan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif, sosialisasi dan penyebarluasan informasi rencana tata ruang, pengembangan sistem informasi penataan ruang, peningkatan pengetahuan dan tanggung jawab masyarakat, dunia usaha dan aparatur serta monitoring evaluasi melalui penguatan kelembagaan penataan ruang melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Sebagian dari kecamatan di Kabupaten Sumedang merupakan kawasan andalan Cekungan Bandung, yaitu Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Sukasari, Tanjungsari, Pamulihan dan Rancakalong. Arah pengembangan kawasan andalan Cekungan Bandung adalah sebagai pusat pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung industri, agribisnis, pariwisata, jasa, dan sumberdaya manusia.

Tujuan pengembangan kawasan adalah:

- Mengembangkan pusat kualitas sumberdaya manusia
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi,
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana

- untuk mengantisipasi peluang kerja di dalam dan luar negeri.

Sasaran pengembangan kawasan adalah:

- Termanfaatkannya lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dengan melakukan sinergitas antar lembaga tersebut melalui pembentukan forum komunikasi lembaga terkait.
- Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia daerah Cekungan Bandung dalam pembuatan cenderamata khas daerah. Peningkatan kemampuan dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan.
- Meningkatnya prasarana komunikasi dan media dengan mendorong jasa telepon dan internet dalam kegiatan bisnis dan menyediakan prasarana pendukung dan komunikasi lainnya.

Pada rencana pengembangan Kawasan Metropolitan Bandung (BMA = Bandung Metropolitan Area), sebagian dari wilayah Kabupaten Sumedang juga termasuk dalam kawasan BMA, yaitu Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Sukasari, Tanjungsari, Pamulihan dan Rancakalong. Kota-kota kecamatan ini direncanakan untuk menjadi *counter magnet* dari perkembangan Kota Bandung dalam fungsi-fungsi tertentu.

Kecamatan Jatinangor dikembangkan untuk menampung limpahan fungsi pendidikan tinggi, Kecamatan Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan dan Rancakalong untuk menampung kebutuhan perumahan dan Agrobisnis serta Kecamatan Cimanggung direncanakan untuk menampung kegiatan industri dan perumahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rencana pembangunan strategis kewilayahan di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

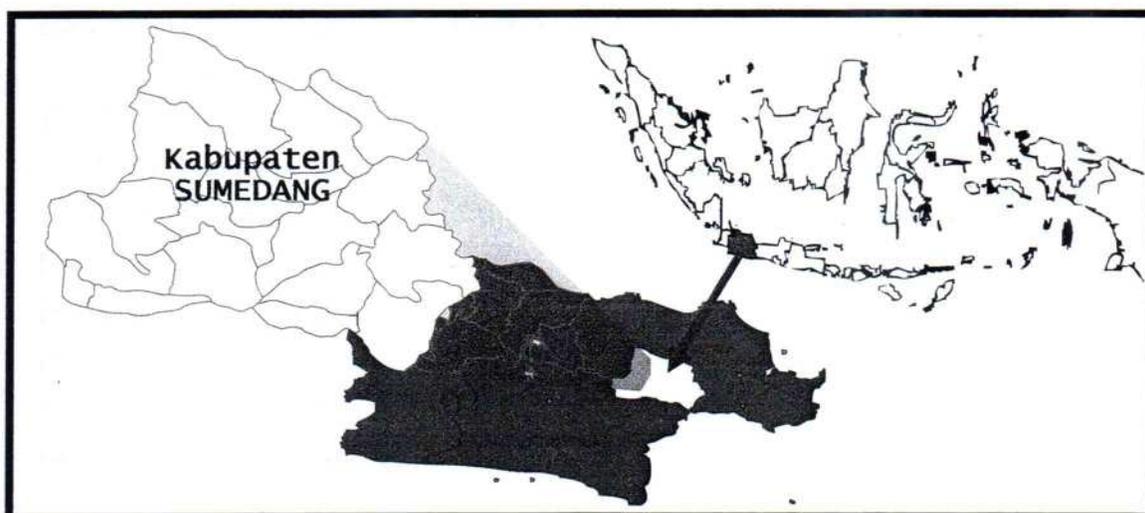
- Pembangunan kawasan bendungan Jatigede
- Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu
- Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang
- Pembangunan Kawasan Industri Ujungjaya

- Pembangunan Bendung-bendung Lapang (Rengrang, Cipasang, Cipanas, Cikalong)

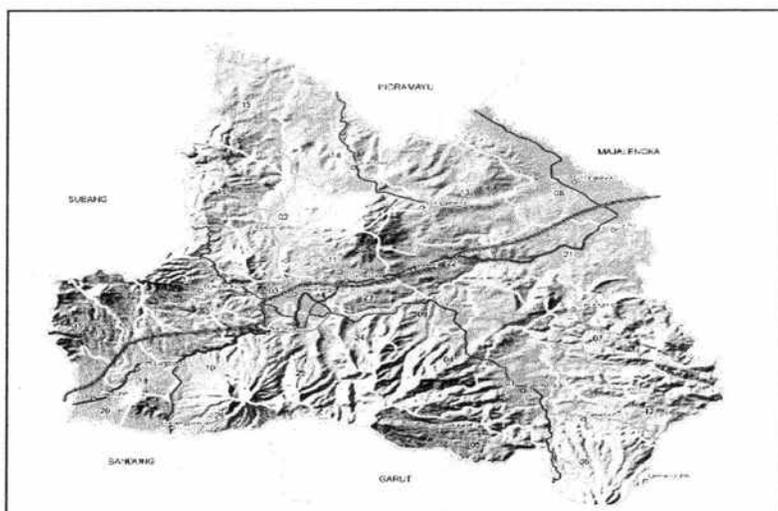
#### E. PRASARANA PERHUBUNGAN

Jalanan mempunyai peranan penting dalam rangka mempercepat proses Pembangunan, baik sebagai laulintas ekonomi berupa barang dan jasa maupun sebagai sarana komunikasi social masyarakat. Bidang Pembangunan prasarana atau infrastruktur, program dan kegiatannya lebih difokuskan kepada upaya mempertahankan prasarana dalam mendukung tumbuh kembang dan bergulirnya aktifitas social dan ekonomi masyarakat.

Melalui kemampuan anggaran yang dimiliki kondisi jalan beraspal pada kategori baik dan sedang di Kabupaten Sumedang mencapai 496,096 Km



Potensi perkembangan Kabupaten Sumedang dalam upaya meningkatkan akses jalan yang memadai, antara lain dengan akan dibangunnya/ dibuka jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan menuju kearah Pelabuhan Cirebon. Rencana pembagunan jalan tol ini tertuang dalam Peraturan Darah Kabupaten Sumedang nomor 33 tahun 2003 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang.



↓ *Peta Perhubungan Kabupaten Sumedang, batas wilayah sebelah utara : Kabupaten Indramayu, sebelah timur Kabupaten Majalengka, sebelah selatan Kabupaten Garut dan sebelah barat Kabupaten Bandung.*

Kepadatan arus laulintas di Kota Kabupaten Sumedang relatif rendah bila dibandingkan dengan kota-kota lain yang berada di sekitar Kabupaten Sumedang. Namun pada ruas Nasional, jalur Jatinanggor-Tomo arus lalulintasnya cukup tinggi mencapai kepadatan di atas 6001 kendaraan/hari, sedangkan di jalur jalan kabupaten kepadatannya di bawah rata-rata 2000 kendaraan/hari.

## F. KEMASYARAKATAN

### 1. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan besar bagi setiap warga Negara, oleh karenanya penyelenggaraan, pendidikan merupakan upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Melalui berbagai upaya peningkatan pemerataan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta pendidikan luar sekolah, telah diperoleh kinerja pembangunan pendidikan, antara lain : jumlah SD/MI yang melanjutkan ke jenjang berikutnya mencapai 90,95%. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Yang ditinjau dari Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI mencapai angka 96,99% sedangkan untuk APK murni mencapai 81,98%. Untuk tingkat SLTP/MTs juga memperlihatkan angka sangat baik, mencapai 64,45% dan lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SLTA sekitar 64,73%.

Kabupaten Sumedang mencatat sebanyak 3.780 orang siswa lulusan SMU, 7.851 SMK dan 1.440 MAN. Berkaitan dengan APK, SMU, SMK dan MAN, memang masih memperlihatkan angka cukup rendah yaitu 22,62%. walaupun demikian bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya perbaikan.

Sampai saat ini jumlah sekolah di Kabupaten Sumedang tercatat sebanyak 112 taman kanak-kanak, 627 sekolah dasar/MI, 72 SLTP dan 32 SLTA. Sedangkan Perguruan Tinggi terdiri dari : Sekolah-sekolah tinggi di bawah Yayasan Lembaga Pendidikan 11 April Sumedang (STKIP, STBA dan STAI), STPDN, Universitas Winaya Mukti, Universitas Padjadjaran, Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN).

Dengan kehadiran lembaga-lembaga pendidikan tinggi tersebut selain makin memperkuat citra Sumedang sebagai Kota Pendidikan yang telah dikenal sejak dekade 60-an, sekaligus pula turut menunjang pencapaian VISI dan MISI Pembangunan Kabupaten Sumedang, khususnya menjadi daerah wisata pendidikan.

## 2. KEAGAMAAN

Pembangunan sarana keagamaan telah mampu memberikan kontribusi dalam menunjang pembangunan sumber daya manusia di kabupaten. Pembangunan sektor agama diarahkan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa dengan mengarah kepada terciptanya pula kerukunan hidup beragama.



↓ *Mesjid Agung Sumedang terletak di dekat Alun-Alun Sumedang, dan bersebrangan dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang*

Kehidupan dan pembinaan keagamaan menunjukkan suasana yang cukup mengembirakan, antara lain dengan terus meningkatnya minat melaksanakan ibadah haji pada setiap tahunnya. Pada tahun 2003 jemaah haji asal kabupaten Sumedang mencapai 482 orang. Demikian pula kegiatan zakat, infaq dan shodaqoh yang dilakukan masyarakat melalui kelembagaan BAZIS maupun penyelenggara ZIS lainnya terus meningkat. Jumlah penerima infaq dan shodaqoh mengalami perkembangan yang sangat besar dari Rp 7,6 Juta menjadi Rp. 40,7 Juta atau meningkat sekitar 536%.

### 3. TRADISI - BUDAYA DAERAH



↓ Wakil Gubernur Jawa Barat H. Dede Yusuf, Bupati Sumedang Bapak Don Murdono beserta Wakil Bupati Sumedang Bapak Taufik Gunawansyah dalam kegiatan Peresmian Sumedang sebagai Puseur Budaya Pasundan

Dari Aspek kebudayaan masyarakat Kabupaten Sumedang merupakan masyarakat yang berakar budaya Sunda. "Masyarakat sunda ialah orang atau kelompok orang yang dibesarkan dalam lingkungan sosial budaya sunda serta dalam hidupnya menghayati dan menggunakan norma-norma sunda" (Ayip Rosidi, 1984) dengan masuknya berbagai kebudayaan luar sejak beberapa abad silam, membawa pengaruh yang cukup besar, baik yang bersumber dari kebudayaan Hindu, Islam maupun Barat.



↓ Kesenian Kuda Rengong adalah salah satu Atraksi Kesenian kabupaten Sumedang

Berbagai kebudayaan tersebut telah diserap oleh masyarakat sepanjang sejarah. Dalam pada itu orang-orang Sumedang sendiri sebagaimana halnya masyarakat Sunda di daerah lainnya, terus mengembangkan diri secara kreatif dalam menjawab

tantangan dan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga wujud kebudayaan Sunda masyarakat Sumedang seperti tampak dewasa ini.

Sebagai masyarakat Sunda, bahasa yang digunakan sehari-hari masyarakat Sumedang adalah bahasa Sunda dengan dialek Priangan; yang didalamnya mengandung *undak-usuk basa* (tingkatan bahasa). Tingkatan bahasa tersebut diwujudkan dalam pemilihan kata, lagu bicara (intonasi) dan gerak anggota badan. Sebagian masyarakat Sumedang, terutama dikalangan orang tua, masih menggunakan undak-usuk bahasa dalam berkomunikasi, namun bagi umunya kalangan generasi muda, pemakaian undak-usuk bahasa sudah kurang mendapat perhatian. Hal ini antara lain karena pengaruh komunikasi lintas budaya yang semakin intens dan frekwensinya tinggi.

Namun demikian, sebagai daerah yang pada masa silamnya sebagai kerajaan, kabupaten Sumedang mewarisi kekayaan tradisi budaya dan kesenian daerah, yang hingga saat ini masih hidup & berkembang antara lain :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1.1 Jenis/ rumpun kesenian               | : 9 rumpun seni |
| 2.2 Group kesenian tradisional & populer | : 480 Group     |
| 2.3 Upacara adat tradisi                 | : 29 jenis      |



↓ *Tarawangsa, Salah satu kesenian daerah Kabupaten Sumedang*

Selain kesenian daerah dan upacara adat tradisi, Kabupaten Sumedang yang pada masa silamnya sebagai kerajaan *Sumedanglarang* termasuk daerah yang memiliki kekayaan situs kepurbakalaan, sebagai jejak peninggalan masa silam Sumedang.

Situs - situs keurbakalaan ini disebar hampir diseluruh daerah di wilayah Kabupaten Sumedang, baik yang termasuk ke Satuan Kawasan wisata (SKW) Jatinaggor, SKW Sumedang Kota maupun SKW Tampomas.

#### G. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN

Beberapa isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Sumedang antara lain : peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan sumberdaya manusia (SDM), peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan kondisi lingkungan hidup, dan pemerataan wilayah pembangunan.

Hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi bagi kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Sumedang terpilih periode 2009-2014 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya menjadi lebih baik.

Berdasarkan kondisi saat ini maupun tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada lima tahun kedepan, maka harus disusun sebuah agenda dan prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terukur dan terkendali.

Dengan demikian, visi dan misi Kepala Daerah terpilih harus mengakomodir hal tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang 2009-2013, yang akan dijadikan pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2013.

#### 1. Visi Daerah

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki

dan berbagai masukan dari berbagai pihak pada saat proses penyusunan RPJPD, maka visi pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 adalah "KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025". Visi tersebut dapat diringkas menjadi "SUMEDANG SEHATI", yang diartikan sebagai kabupaten yang makin kokoh dan berdaya juang tinggi dalam membangun daerahnya dengan dilandasi orientasi masyarakat berupa:

1. Perilaku yang berpegang pada prinsip sauyunan, sareundeuk saigel, sabobot saphanean. Maknanya adalah dalam lingkungan kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat, senantiasa mengedepankan kepuasan dalam layanan pemerintahan dan pembangunan di berbagai bidang melalui pola kemitraan, permusyawaratan, transparansi, Baling percaya serta senantiasa proporsional dalam mendistribusikan hak dan kewajiban diantara *stakeholders* pemerintahan guna mewujudkan kemajuan pembangunan daerah yang dikehendaki masyarakat daerah.
2. Masyarakat yang telah mengedepankan nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam mengelola permasalahan dan kebutuhan masyarakat daerah.
3. Masyarakat yang makin kokoh dalam mewujudkan tanggungjawab untuk meredistribusikan kemakmuran daerah, antara kelompok ekonomi lemah (kaum dhuafa) atau miskin secara materiel namun potensial untuk menopang kemajuan kelompok ekonomi kuat (kaum agnia) yang terus menunjukkan kesetiakawanan sosio-ekonominya untuk mengarahkan kaum ekonomi lemah menjadi produktif.
4. Meningkatnya pelayanan publik.

Kabupaten Sumedang yang sejahtera ditandai dengan kondisi kehidupan masyarakat Sumedang yang memenuhi standar kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan dan beratapencarian layak serta jaminan keamanan dengan senantiasa mempertimbangkan

kelestarian days dukung lingkungan yang berkelanjutan.  
Kondisi ideal di bidang pendidikan ditunjukkan dari:

## 2. MISI DAERAH

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumedang 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Misi Pertama, Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berpendidikan, Berbudaya dan Berpola Hidup Sehat, adalah membangun masyarakat Sumedang yang berbudaya mulia dan mandiri yang memiliki akses terhadap pendidikan formal yang berkualitas, dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan mendorong kesetaraan gender, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi berdaya saing, mengutamakan pola hidup sehat sejahtera secara jasmani, rohani dan sosial, sehingga berada dalam kondisi stabil yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang dilandasi kearifan lokal, kesalehan sosial dengan mencerminkan pola perilaku silih asah, silih asih, silih asuh, akhirnya tercipta keluarga yang dapat menjadi tempat persemaian nilai budaya, pendidikan dan kesehatan.
2. Misi Kedua, Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh dan Berkelanjutan yang Berbasis pada Agribisnis, Pariwisata dan Industri, adalah mengembangkan dan memperkuat keterkaitan antar sektor perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional dan internasional, dengan berbasis pada upaya mengembangkan keunggulan komparatif, kompetitif, dan kooperatif dalam mendayagunakan potensi sosio ekonomi lokal terutama dalam agribisnis, pariwisata dan industri yang mengindahkan kearifan budaya lokal dan kesinambungan lingkungan hidup. Perkembangan ekonomi daerah didukung oleh kedasama antara domain pemerintahan dalam penyediaan infrastruktur yang memadai, pemeliharaan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan

keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya serta antara kawasan perkotaan dan perdesaan, penciptaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing serta perlindungan regulasi pemerintahan terhadap pelaku sosio ekonomi daerah guna mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3. Misi Ketiga, Mewujudkan Masyarakat Daerah yang Berakhlak Mulia, yang Berlandaskan Keimanan dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang Makin Toleran Sesuai dengan Falsafah Pancasila, adalah meningkatnya jatidiri dan karakter masyarakat yang makin beriman dalam keragaman keyakinan beragama dan beribadat yang dijamin kelangsungannya oleh pemerintah, memperkuat kemitraan dan tanggung jawab dalam pembangunan pendidikan keagamaan dan sarana prasarana keagamaan di daerah, menguatnya kesalehan sosial masyarakat dan aparatur pemerintah serta memperkokoh silaturahmi antar umat beragama dan intern umat beragama untuk menguatkan pengamalan agama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Misi Keempat, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, adalah mewujudkan penyelenggaraan akuntabilitas Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan yang proporsional, meningkatkan aksesibilitas, transparansi, pengawasan masyarakat dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah, meningkatkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang makin efisien dan efektif dan peningkatan pelayanan prima pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, meningkatkan profesionalisme aparatur dan efisiensi birokrasi dalam kerangka reformasi birokrasi yang makin mantap, mewujudkan kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif,

menyelenggarakan otonomi desa yang makin efektif, serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang lebih baik.

5. Misi Kelima, Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis dalam Kesetaraan Gender Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah mewujudkan penyelenggaraan kelembagaan demokrasi daerah, baik pada suprastruktur maupun infrastruktur politik serta meningkatkan budaya hukum dan HAM, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, mewujudkan kemitraan dengan media dalam bentuk penyampaian kepentingan masyarakat daerah serta meningkatkan penegakan hukum secara adil dalam kesetaraan gender dan menghormati hak asasi manusia.

### 3. Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang 2008-2013

Berdasarkan Gambaran umum, isu-isu strategis dan kondisi yang dihadapi Sumedang saat ini, serta memperhatikan Visi Daerah maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

**"PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEBAGAI AKSELERASI PENCAPAIAN VLSI SUMEDANG 2005-2025"**

Adapun penjelasan visi jangka menengah Pemerintah Kabupaten Sumedang 2009-2013 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan adalah suatu kondisi peningkatan kualitas berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik baik secara administratif maupun non administratif yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bagi seluruh warga masyarakat Sumedang yang lebih memuaskan, berkeadilan, murah, tedangkau dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
2. Kesejahteraan Masyarakat adalah terwujudnya suatu kondisi kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan

kebutuhan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kehidupan yang layak bagi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur daerah dalam mendorong aktivitas perekonomian daerah dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

#### 4. Misi Pemerintah Kabupaten Sumedang 2008-2013

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskanlah 4 (empat) misi yang memuat tujuan dan sasaran strategi pembangunan dalam periode kepemimpinan Kepala Daerah terpilih, sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, bermoral baik yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan YME
2. Mewujudkan kualitas manajemen pemerintahan daerah yang semakin baik
3. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh yang bertumpu pada potensi sumberdaya daerah secara berkelanjutan
4. Mewujudkan tata kelola lingkungan dan manajemen bencana yang semakin baik.

Kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

#### H. MOTTO KABUPATEN SUMEDANG

##### 1. Moto Filosofis : *Insun Meda1*

Kata *Insun Meda1* erat kaitannya dengan kata Sumedang yang mengandung arti :

- a. Berdasarkan ucapan *Prabu Tadjimalela* seorang tokoh legendaris dalam sejarah (cerita babad) Sumedang. *Insun* = Aku, *Meda1* = Keluar
- b. Berdasarkan data di museum *Prabu Geusan Ulun*. *Insun Meda1* artinya *Insun* = Daya, *Meda1/Medang* = Terang. Pengertian ini bersifat mistik.

- c. Berdasarkan Prof. Dr. Anwas Adiwilaga, *Insun Meda1* berasal dari kata *Su* dan *Medang*. *Su* = Bagus, *Medang* = sejenis Kayu Jati yaitu Huruf yang banyak tumbuh di Sumedang masa lalu.
- d. Sedangkan menurut Prof. Dr. Kusnaka Adimiharja, *Insun Meda1* mengandung arti *sun* = Jati diri (roh) dan *Meda1* = memancarkan cahaya kekluar'. Sehingga secara *Polketimology*, *Insun Meda1* mengandung arti *Roh* atau Jati diri yang memberi cahaya kesucian.



BAB III  
KEDUDUKAN FUNGSI DAN PERANAN  
SERTA PRAKONDISI PELAKSANAAN TUGAS DPRD  
PERIODE TAHUN 2004 - 2009

A. KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau dikenal juga Otonomi Daerah, cukup banyak membawa perubahan yang berupa hal baru, diantaranya yang berkaitan dengan kedudukan DPRD Kabupaten/ Kota. Dalam UU nomor 32 tahun 2004, menempatkan posisi DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah.

Dengan kedudukan sejajar dan sebagai mitra kerja daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai peranan yang penting, dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Peranannya yang penting ini, tercermin dari kewenangan yang melekat atau dimiliki DPRD baik berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang no 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU no 22 tahun 1999. DPRD Kabupaten Sumedang membuat Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Putusan DPRD Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang bersumber dari aturan tersebut diatas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, memiliki tugas dan wewenang yang luas. Tugas dan wewenang DPRD sebagaimana tercantum dalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 *j.o* pada pasal 10 Keputusan

DPRD Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata tertib DPRD kabupaten Sumedang, antara lain :

1. DPRD mempunyai Tugas dan wewenang;
  - a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
  - b. Menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
  - c. Melaksanakn Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah, dan kerjasama internasional di Daerah.
  - d. Mengusulkan peningkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
  - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
  - f. Meminta Laporan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas dan desentrelisasi.
  - g. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
  - h. Memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membantu masyarakat daerah.
  
2. Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tugas dan wewenang DPRD adalah;
  - a. memberitahukan kepada Bupati mengenai akan berakhirnya masa jabatan;
  - b. mengusulkan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan Bupati dan wakil Bupati terpilih;

- c. melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - d. membentuk panitia pengawas;
  - e. meminta pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas KPUD dan;
  - f. menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi dan misi dan program dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
3. selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan;

Dengan kedudukan, tugas dan wewenang DPRD tersebut diatas, maka DPRD sebagai lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah dan lembaga Legislatif Daerah mempunyai Fungsi sebagai berikut sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 *j.o* Pasal 9 Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2005 :

- (1) DPRD mempunyai fungsi
  - a. legislasi;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah
- (4) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## B. HAK DAN KEWAJIBAN DPRD

### 1. Hak-hak DPRD

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 43 Tentang Hak dan Kewajiban DPRD, maka DPRD mempunyai Hak :

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat;

Sedangkan dalam pasal 44 Undang-undang Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Membela diri;
- e. Imunitas;
- f. Protokol; dan
- g. Keuangan dan administratif.

### 1. Kewajiban DPRD 2004 - 2009

Sebagaimana diatur dalam pasal 45 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 *j.o* Pasal 25 Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2005, dalam menjalankan tugas dan wewenang, DPRD berkewajiban :

1. mengamalkan pancasila;
2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala Peraturan Perundang-undangan;
3. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
5. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

6. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
7. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
8. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya;
9. mentaati kode etik dan peraturan tata tertib di DPRD;
10. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

## 2. ALAT KELENGKAPAN DPRD

Dalam melaksanakan tugas, DPRD didukung oleh alat kelengkapan DPRD yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 *jo* Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang Pasal 51 Nomor 03 Tahun 2005 yang terdiri dari :

- a. Pimpinan;
- b. Panitia musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Badan Kehormatan;
- e. Panitia Anggaran; dan
- f. Alat kelengkapan lainnya.

## 4. JENIS-JENIS RAPAT

Rapat- rapat DPRD diatur dalam Keputusan DPRD No.03 Tahun 2005 terdiri dari rapat :

- a. Rapat Paripurna merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.
- b. Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.

- c. Rapat Paripurna Khusus merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua untuk membahas hal-hal yang khusus.
- d. Rapat Fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau wakil Ketua Fraksi.
- e. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRD.
- f. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota panitia musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia musyawarah.
- g. Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua komisi.
- h. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua DPRD.
- i. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan atau pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- j. Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua Anggaran.
- k. Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD/Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- l. Rapat Dengar Pedapat merupakan rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Lembaga/Badan Organisasi Kemasyarakatan.
- m. Rapat Badan Organisasi merupakan rapat para anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua Badan Kehormatan.

#### 5. ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Sebagaimana diatur dengan pasal 22 huruf e Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 *jo.* pasal 123 Keputusan DPRD nomor 8 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- a. DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat tentang suatu masalah yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPRD.
- b. Selain melalui Rapat Dengar Pendapat, DPRD menerima penyampaian Aspirasi dan pengaduan Masyarakat secara langsung dan atau melalui surat

## 6. KONDISI UMUM (EKSTERNAL) AWAL PELAKSANAAN TUGAS

### 1. Dampak Globalisasi

Masyarakat dan daerah Kabupaten Sumedang sebagai bagian integral kehidupan bersama suatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sudah barang tentu tidaklah lepas dari berbagai pengaruh situasi dan kondisi yang terjadi dalam skala regional dan nasional, bahkan pengaruh situasi dan kondisi yang terjadi secara global mendunia.

Secara umum, awal masa bhakti DPRD Kabupaten Sumedang 2004 - 2009 dihadapkan kepada tantangan besar dan dasar sebagai dampak yang terjadi baik regional maupun nasional, yang ditandai antara lain oleh fenomena- fenomena perubahan besar-besaran dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam era globalisasi informasi atau sering juga disebut juga dengan revolusi informasi.

Perkembangan teknologi informasi di era revolusi informasi membawa dampak yang luas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat sebagai fenomena globalisasi antara lain, frekwensi dan intensitas aktifitas serta interaksi antara sesama manusia antara bangsa semakin tinggi, seakan menihilkan konsepsi ruang dan waktu. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan paradigma komunikasi dari linear menjadi konvergen, sehingga peran halayak dari yang tadinya sebagai obyek pasif dalam proses komunikasi politik menjadi subyek yang aktif. Kondisi ini melahirkan

tuntutan akan transparansi, demokratisasi dan perlindungan hak azasi manusia.

Fenomena lain adalah menyurutnya peran pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Hal ini berarti terjadinya pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengambil alih sebagian tugas-tugas pemerintah. Menurutnya peran negara, juga berarti mengecilnya peran institusi pemerintahan, sehingga lembaga pemerintahan dituntut untuk tumbuh lebih efisien, ramping dan cepat tanggap. Dengan demikian membawa konsekuensi terjadinya penyederhanaan organisasi negara di tingkat nasional dan penyederhanaan organisasi perangkat daerah di daerah.

Menguatnya peran individu sebagai dampak globalisasi informasi seperti pernah diramalkan oleh *naisbitte* dalam global paradok melahirkan pasar bebas ide demokrasi, yang menggantikan demokrasi keterwakilan dan jaringan global antar negara akan mencitakan negara-negara baru. Hal ini terbukti dengan adanya tuntutan-tuntutan sebagian daerah untuk melepaskan diri dari wilayah NKRI. munculnya tuntutan-tuntutan untuk memisahkan diri dari NKRI, seakan menjadi "Inspirasi" bagi sebagian daerah kecamatan misalnya, untuk memunculkan wacana memisahkan diri dari wilayah Kabupaten yang bersangkutan dan bergabung dengan wilayah lain yang berbatasan. Adanya keinginan dari tuntutan sebagian daerah di tanah air yang ingin memisahkan diri dari NKRI maupun suatu kecamatan ingin memisahkan diri sebuah Kabupaten/ Kota ke daerah tetangganya, antara lain disebabkan karena merasa kurang terakomodasinya aspirasi masyarakat bersangkutan dimasa-masa lalunya.

Situasi dan kondisi nasional seperti itu merupakan permasalahan, tantangan bahkan ancaman cukup serius. Baik langsung maupun tidak, situasi tersebut berpengaruh terhadap situasi dan kondisi daerah Kabupaten Sumedang dan merupakan kewajiban bagi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang mampu berfungsi sebagai wahana penampung aspirasi masyarakat.

## 2. Krisis Multidimensi

Krisis moneter ada pertengahan 1997 yang berkepanjangan menjadi krisis ekonomi nasional serta merata dibarengi munculnya berbagai permasalahan serius dibidang sosial, politik dan hukum, dan aspek-aspek kehidupan lainnya, mengakibatkan krisis ekonomi *multidimensi*.

Fondasi ekonomi yang telah dibangun sebelumnya sesama beberapa dasawarsa menjadi porakporanda. Dampak krisis ekonomi mengakibatkan kesulitan keuangan maha dahsyat di pusat maupun di daerah, baik keuangan sektor pemerintahan maupun swasta. Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terus membengkak akibat sejumlah industri dan perusahaan-perusahaan tidak kuat menahan badai krisis ekonomi yang mengantarkan ke dalam kepailitan, sehingga semakin meningkatnya angka pengangguran.

Sementara itu harga kebutuhan pokok harus bergerak naik kondisi ekonomi yang memprihatinkan ini kemudian menyeret ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan yang di tandai dengan meningkatnya angka putus sekolah dan menurunnya derajat kesehatan masyarakat.

Rantai krisis terus membelit aspek-aspek kehidupan lainnya yang amat memprihatinkan, baik di bidang sosial, budaya, politik dan hukum yang kemudian melahirkan krisis multidimensi dan bermuara pada krisis kepercayaan kepada pemerintah yang tidak terelakan. Munculnya krisis kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan termasuk krisis kepercayaan kepada lembaga legislatif, sehingga menimbulkan terjadinya disharmoni komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Badan Legislatif Daerah yang *notabene* sebagai wakil rakyat, tak urug pula mengalami krisis kepercayaan. Sebagai element dan komponen masyarakat, melancarkan berbagai kritikan, tuduhan dan hujatan-hujatan pedas yang memandang bahwa anggota Legislatif tidak ubahnya hanya sebagai stempel

pemepintah yang lebih berpaihak kepada penguasa ketimbang kepada rakyat.

Situasi dan kondisi seperti ini yang terjadi pada awal pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Sumedang 2004 sampai dengan 2009. Jelas merupakan suatu situasi dan kondisi yang besar dan berat, sebab dengan terjadinya krisis kepercayaan, baik terhadap Pemerintah maupun Lembaga Legislatif merupakan hambatan besar dalam mewujudkan kebersamaan untuk membangkitkan kembali gairah agar segera beranjak dari ketrerpurukan.

Tantangannya adalah bagaimana DPRD bisa menyikapi situasi dan kondisi seperti itu serta mampu mengidentifikasi setiap permasalahan secara tepat, sehingga didapat solusi-solusi yang tepat pula atas aspirasi dan perkembangan situasi yang terjadi di Masyarakat Kabupaten Sumedang, sebagai dampak Krisis *Multidimensi* tersebut.

### 3. Gerakan Reformasi

Gerakan reformasi yang digulirkan dan di pelopori mahasiswa pada pertengahan 1998, membawa Indonesia memasuki masa transisi menuju babak baru, untuk menciptakan pemerintahan yang berlegitimasi, demokratis, jujur dan cakap. Reformasi ke arah demokratisasi pada pasca orde baru, mengguncang keamanan pranata-pranata sosial yang dibangun selama tiga dasawarsa lebih. Ketika pranata otoriter runtuh, pranata baru sebagai penggantinya yaitu untuk membangun kehidupan demokrasi, tampaknya belum siap. Karena pengalaman selama 32 tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Negara yang sarat dengan sentralistik dan cenderung menuju monolitik telah menyebabkan ketidakberdayaan rakyat, ketidakbiasaan berbeda dan menghargai perbedaan pendapat, maka ketika terjadi arus perubahan mendasar dan besar-besaran, terjadilah diseqilibibrium atau hilangnya keseimbangan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Dalam arti, nilai-nilai lama yang sebelumnya dianggap baik cocok lagi

dengan perkembangan zaman dan mulai di tinggalkan, sementara nilai-nilai baru yang di pandang lebih baik belum siap.

Sehingga kondisi seperti ini menimbulkan kecemasan-kecemasan (chaos) yang kalau tidak di temukan jalan keluarnya dapat menimbulkan frustrasi dan apatis di masyarakat Masa transisi ini pun kemudian menimbulkan gerak balik pendulum dari otoriterisme menuju kebebasan yang kebablasan.

Situasi dan kondisi seperti ini sangat mewarnai masa-masa awal tugas DPRD kabupaten sumedang Berbagai gelombang unjuk rasa atau demo terjadi bukan hanya di ibu kota kabupaten, melainkan menyentuh sampai relung-relung pedesan.

Problema -problema yang sebelumnya tidak sebelumnya tidak muncul dan lama terendapkan di masyarakat, dengan lahirnya era reformasi yang menggusung demokrasi sebagai salah satu pilarnya, kemudian problema-problema tersebut mencuat ke permukaan. Sehingga awal masa tugas keanggotan DPRD 2004 - 2004. Merupakan hari-hari yang tidak sepi dari kegiatan masyarakat untuk unjuk rasa, baik yang langsung diarahkan kepada pemerintah daerah maupun disampaikan melalui DPRD.

Selama kurun 5 tahun, permasalahan-permasalahan besar yang muncul dan di sampaikan kepada DPRD diantaranya:

1. masalah pertanahan di beberapa daerah;
2. ketenagakerjaan (PHK dan UMR) di zona industri Kecamatan Cikeruh dan Cimanggu;
3. pembangunan waduk jati gede;
4. tuntutan penyesuaian ganti rugi yang terkena pembangunan jaringan listrik SUTET ( Saluran udara Ekstra Tinggi);
5. masalah rute angkutan kota;
6. Sengketa kepemilikan lahan hutan jati Satim di kecamatan Ujung Jaya, hutan jati Gendereh di

kecamatan Buah Dua, dan hutan jati di Babakan Asem kecamatan Conggeang;

7. Perkebunan sampora;
8. Tuntutan/unjuk rasa kalangan pendidik (PGRI) tentang perbaikan nasib guru;
9. Permasalahan Jalan tol Cisundawu;

Frekwensi dan intensitas gelombang unjuk rasa yang di lakukan berbagai elemen masyarakat tentang setiap permasalahan tersebut, termasuk cukup tinggi.

Unjuk rasa tidak sebatas untuk menyuarkan aspirasi atau kritik atas penyelenggaraan pemerintah, melainkan sering kali menyeret kepada sikap-sikap yang besikeras bisa melengserkan kepemimpinan seseorang. Cukup banyak kepala desa di Kabupaten Sumedang pada saat itu, yang dipaksa lengser oleh warganya dengan berbagai faktor penyebabnya. Jelas, situasi semacam ini berdampak terhadap kelancaran penyelenggaraan rda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Reformasi membuka katub-katub yang sebelumnya membungkam kebebasan, namun dalam masa transisi tersebut arah menuju kehidupan demokrasi sempat di tandai oleh *euphoria* kebebasan. Termasuk di bidang pers, bukan saja tumbuhnya pers-pers di daerah dengan di cabutnya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang di ganti dengan Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang pers, namun kadang-kadang kebebasan pers pun adakalanya kebablasan.

#### 4. Masa Otonomi Daerah

Undang-undang no 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah dirubah menjadi. Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang no 25 tahun 1999 tentang Peribangan Keuangan Pusat dan Daerah tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah dimana dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran, serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara maka dikeluarkannya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini merupakan dari dampak repormasi dan merupakan perubahan azas sistem pemerintah di Indonesia ini yang tandinya sentarilasi menjadi azas desentralisasi.

Perubahan-perubahan prinsipil meliputi antara lain susunan rumah tangga daerah, pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, sistem keuangan yang baru, sistem pengawasan dan lain-lain, merupakan ketentuan-ketentuan yang bermaksud agar otonomi sebagai salah satu sendi penyelenggaraan pemerintahan dapat di jalankan sesuai dengan dasar dan semangat otonomi.

Dengan memasuki era otonomi, Pemerintah daerah termasuk di dalamnya DPRD sebagai mitra sejajar Pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan yang handal guna mengerahkan, mendorong, memfasilitasi, dan mengakomodasi berbagai kepentingan dari segenap komponen masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pengertian materil

demokrasi maupun paham kesejahteraan sebagai bentuk lebih baru dari paham negara berdasarkan atas hukum. Dengan demikian fungsi utama pemerintahan, bukan sekedar pemberi ketertiban dan keamanan, melainkan sebagai penyelenggara kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Dalam rangka menyiapkan kondisi yang kondusif tersebut, tantangan yang harus dihadapi adalah melakukan reformasi dengan melakukan penataan organisasi dan manajemen Pemerintah Daerah, baik yang menyangkut kewenangan, kelembagaan maupun personalia dan kinerjanya. Satuan-satuan Pemerintahan otonomi yang mandiri dan demokratis akan lebih mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya.

Banyaknya kantor-kantor pusat di daerah serta masih gemuknya struktur organisasi pemerintahan daerah dapat mempengaruhi kemandirian otonomi, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam mewujudkan efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### C. KONDISI KHUSUS (INTERNAL)

#### 1. Keanggotaan DPRD Hasil Pemilu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang Priode 2004-2009 yang merupakan hasil pemilihan Umum pada tahun 2004. berdasarkan keputusan gubernur Jawa Barat nomor 171/KEP.766-DEKON/2004 tanggal 3 agustus 2004 bahwa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Sebanyak 45 (empat puluh lima ) orang. Terdiri dari:

1. paratai Golkar sebanyak 18 Orang
2. Partai PDI Perjuangan sebanyak 9 Orang
3. Partai PPP sebanyak 6 Orang
4. Partai PKS sebanyak 5 Orang
5. Partai Demokrat sebanyak 4 Orang
6. Partai PAN sebanyak 2 Orang dan
7. Partai PBB sebanyak 1 Orang

Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Hasil Pemilu 2004 dan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu 2004 Kabupaten Sumedang keanggotaan DPRD kabupaten Sumedang pada masa awal adalah sebagai berikut:

1. Drs. Ismet Suparmat : P. GOLKAR
2. Drs. Agus Weliyanto : P. PDIP
3. H.Dony Ahmad Munir, ST., MM : P. PPP
4. Ir.Edi Askari : P. GOLKAR
5. Huliman Abdul : P. GOLKAR
6. H.Faried Susanto : P. GOLKAR
7. Aat Permana, SKM : P. GOLKAR
8. Hj.Yati Suhayati Yusuf : P. GOLKAR
9. H.Ence Sudrajat : P. GOLKAR
10. Nanang Rahmat Mulyadi : P. GOLKAR
11. Drs.Naya Sunarya : P. GOLKAR
12. Drs. Minan Sukarnan : P. GOLKAR
13. Ade Sutrisno,SE : P. GOLKAR
14. Sidik Jafar : P. GOLKAR
15. Edi Sunardi,S.Ip : P. GOLKAR
16. Rani Hoerunnisa, S. Sos : P. GOLKAR
17. Drs.K.Supriadi : P. GOLKAR
18. Taryana,SH : P. GOLKAR
19. Tati Setiawati Kusumah : P. GOLKAR
20. Jajang Heryana,A.Md : P. GOLKAR
21. Kusman Purnama : P. PDIP
22. Rd.Agustin Adinugraha : P. PDIP
23. Drs. Jajat Widjaya : P. PDIP
24. Sutisna : P. PDIP
25. Ade Nono Sudiono : P. PDIP
26. Yaya Widarya : P. PDIP
27. Atang Setiawan,SE : P. PDIP
28. Dadang Rohmawan,SE : P. PDIP
29. Nurdin Zaen,SE : P. PPP
30. Dra. Odah : P. PPP
31. KH.MA Zaenal Abidin : P. PPP
32. Ahmad Jubaedi : P. PPP

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 33. KH.Azis Syamsudin      | : P. PPP      |
| 34. H.Deddy Ambara,Lc      | : P. PKS      |
| 35. Drg.Rahmat Juliadi     | : P. PKS      |
| 36. Yani Citraeni,A.Md     | : P. PKS      |
| 37. Rikrik Hartadi         | : P. PKS      |
| 38. Apiatno,SE             | : P. PKS      |
| 39. Kusdiaman              | : P. Demokrat |
| 40. Nurani Fujianti,ST     | : P. Demokrat |
| 41. Otong Dartum GN,SE     | : P. Demokrat |
| 42. Drs.H.Sarnata          | : P. Demokrat |
| 43. Dudi Supardi,ST        | : P. PAN      |
| 44. Abu Bakar,A.Md         | : P. PAN      |
| 45. H.Ending Ahmad Sajidin | : P. PBB      |

## 2. Tugas dan Personalia Alat Kelengkapan DPRD

Untuk pelaksanaan tugas, DPRD didukung oleh alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari :

### 2.1. Pimpinan

Sebagaimana diatur dalam pasal 53 keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang, Pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk menganbil keputusan.
- b. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua.
- c. Menjadi juru bicara DPR
- d. Menyampaikan *progres report* mengenai pelaksanaan kegiatan DPRD secara berkala kepada publik;
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD;
- f. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Instansi lainnya seseuai dengan keputusan DPRD;
- g. Mewakili DPRD dan/ atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan;
- h. Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan saksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

i. Mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD

Kepemimpinan DPRD kabupaten Sumedang mengalami perubahan yang tadinya ketua terdiri dari Taufiq Gunawansyah SIP. Diganti pada tahun 2008 oleh saudara Drs. Ismen Suparmat. Adapun untuk wakil masih tetap yaitu saudara Agus Welianto Santoso, SH dan H, Dony Ahmad Munir, ST., MM

## 2.2 Komisi Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan keanggotaan DPRD. Komisi merupakan pengelompokan anggota berdasarkan bidang tugas yang telah ditentukan dengan pembedangan sebagai berikut :

### 2.2.1 Komisi A, pembedangannya yaitu :

- Pemerintahan,
- Otonomi desa,
- Ketertiban,
- Penerangan/ pers,
- Hukum/perundang-undangan
- Kepegawaian/ Aparatur,
- Perijinan,
- Sosial politik,
- Organisasi Masyarakat,
- Pertanahan

### 2.2.1 Komisi B, pembedangannya yaitu :

- Perdagangan,
- Perindustrian,
- Pertanian,
- Perikanan,
- Peternakan,
- Perkebunan,
- Kehutanan,

- Pengadaan pangan,
- Logistik,
- Koperasi,
- Pariwisata,

2.2.2 Komsisi C, pembedangannya yaitu :

- Keuangan Daerah,
- Perpajakan,
- Retribusi,
- Perbangkan,
- Perusahaan daerah,
- Perusahaan patungan,
- Dunia Usaha dan Penanaman Modal

2.2.3 Komisi D, pembedangannya yaitu :

- Pekerjaan Umum,
- Tata kota
- Pertanian,
- Kebersihan,
- Perhibingan,
- Pertambangan dan energi,
- Perumahan rakyat,
- Lingkungan Hidup,
- Ketenagakerjaan,
- Pendidikan,
- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
- Kepemudaan dan Olah raga,
- Pramuka,
- Agama,
- Kebudayaan,
- Sosial,
- Kesehatan dan Kependudukan,
- Peranan wanita,

Sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, komisi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membahas dan menetapkan jadwal komisi;
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Keputusan DPRD yang termasuk ke dalam tugas bidang masing-masing.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Kepala Daerah, serta pelaksanaan kerja sama internasional di daerah;
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD;
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah melalui Pimpinan DPRD terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
6. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat;
7. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerjayang dianggap perlu;
8. Mengadakan rapat kerja dengan Kepala daerah beserta perangkat daerah, Lembaga/Badan dan organisasi kemasyarakatan serta unsur masyarakat lainnya;
9. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan suatu masalah yang menjadi bidang tugas masing-masing komisi;
10. Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD tentang hasilpekerjaan komisi.

## **2.3. Panitia-Panitia**

2.3.1 Panitia Musyawarah, merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Pimpinan DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD dengan tugas:

- a. Memberikan pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan progam kerja

- DPRD dan pelaksanaannya, baik atas pemerintah Pimpinan DPRD maupun tidak;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara DPRD
  - c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat;
  - d. Memberikan saran pendapat kepada Pimpinan DPRD untukmemperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untukmencapai mufakat;
  - e. Berkoordinasi dengan kepala daerah mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh DPRD atau kepala daerah.

Susunan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Sumedang terdiri dari:

1. Ketua merangkap anggota : Ketua DPRD
2. Wakil Ketua merangkap anggota : Wakil Ketua DPRD
3. Wakil Ketua merangkap anggota : Wakil Ketua DPRD
4. Wakil Ketua merangkap anggota : Wakil Ketua DPRD
5. Sekretaris bukan anggota : Sekretaris DPRD
6. Anggota :
  - Edi Sunardi, SIP
  - Rani Hoerunnisa, S. Sos
  - Sidik Jafar
  - Nanang Rahmat Mulyadi
  - Huliman Abdul Gofur, S. Sos
  - Dadang Rohmawan
  - Sutisna.
  - K. Aziz Samsudin, SIP
  - Ahmad Jubaedi
  - Yani Citraeni, Amd.
  - Otong Dartum GN, SE
  - Kusdiaman
  - Ny. Yati Suhayati Yusup

- 2.3.2 Panitia Khusus, Pimpinan DPRD dapat membentuk Panitia Khusus (Pansus) setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah. Pansus merupakan Alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara.
- 2.3.3 Panitia Anggaran, merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Pimpinan DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD dengan tugas sebagaiberikut:
- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menyusun Anggaran DPRD serta mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rumah Tangga DPRD
  - b. Bersama-sama Pemerintah Daerah mempersiapkan dan menyusun nota keuangan, Rencana Pendaatan dan belanja Daerah, Perubahan serta Perhitungannya;
  - c. Memberikan saran, pendapat dan atau pertimbangan kepada DPRD mengenai nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan serta perhitungannya yang telah disampaikan oleh Bupati;
  - d. Memberikan saran, pendapat dan atau pertimbangan kepada DPRD mengenai rencana peminjaman daerah yang merupakan persetujuan DPRD.

Berdasarkan putusan DPRD Kabupaten Sumedang susuna dari Panitia Anggaran terdiri dari:

- 1) Ketua merangkap anggota : Ketua DPRD
- 2) wakil Ketua merangkap anggota : wakil Ketua DPRD
- 3) wakil Ketua merangkap anggota : wakil Ketua DPRD
- 4) wakil Ketua merangkap anggota : wakil Ketua DPRD
- 5) Sekretaris bukan anggota : Sekretaris DPRD
- 6) Anggota:
  - Drs. Minan Sukarnan
  - Ny. Tati Setiawati Kusumah

- Taryana SH
- Drs. Naya Sunarya
- Ade Nono Sudiono
- Yaya Widarya
- KH. MA. Zaenal Abidin
- Ny. Yani Citraeni, SE
- Apiatno, SE
- Drs. H. Sarnata
- Dudi Supriadi, ST
- H. Faried Susanto
- Drs. Jajat Wijaya
- Dra. Odah
- Dadang Rohmawan, SE
- Ade Sutrisno, SE

#### **Badan Kehormatan**

Badan kehormatan sesuai dengan Pasal 62 Peraturan DPRD Kabupaten Sumedang no 3 tahun 2005 adalah alat kelengkapan DPRD yang di bentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD adapun susunan personalianya adalah sebanyak 5 orang yang terdiri dari ketua dan wakil ketua dan anggotanya Badan kehormatan dimana BK di bantu oleh sekretariat dewan.

Selain Alat-alat kelengkapan DPRD tersebut di atas sebelumnya telah pula' dibentuk fraksi-fraksi, yang merupakan pengelompokan anggota berdasarkan kekuatan partai politik yang mencerminkan partai politik hasil Pemilu, di atur dalam pasal 30 Peraturan DPRD Kabupaten Sumedang no 3 tahun 2005 dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menentukan dan mengatur' segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing- masing;
2. Meningkatkan. kualitas, kemampuan, efesiensi dan efektifitas kerja'pars anggota
3. fraksi-fraksi dapat memberikan perimbangan kepada

pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang di anggap perlu, berkenaan dengan bidang Tugas DPRD baik diminta atau tidak diminta

Pada permulaan masa keanggotaan DPRD Ketua, Sekretaris dan Anggota Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Sumedang 2004-2009 adalah sebagai berikut:

**a. Fraksi Partai Golongan Karya**

Penasehat : Drs. Ismet Suparmat  
Ketua : Sidik Jafar  
Wakil Ketua : H. Aat Permana, SKM  
Sekretaris : Huliman Abdul Gofur, S. Sos  
Bendahara : H. Ence Sudrajat  
Anggota :

1. Taryana, SH
2. Ny. Tati Setiawati Kusumah
3. Jajang Heryana, Amd.
4. Drs. Minan sukarman
5. Drs. K. Supriadi
6. Nanang Rahmat Mulyadi
7. Edi Sunardi, Sip
8. H. Faried Susanto
9. Drs. Naya Sunarya
10. Ade Sutrisno, SE
11. Hj. Yati Suhayati Yusuf
12. Rani Hoerunnisa, S. Sos

**b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

Penasihat : Drs. Agus W Santoso, SH  
Ketua : Ade Nono Sudiono  
Wakil Ketua : Sutisna  
Sekretaris : Yaya widarya  
Bendahara : Kusman Purnama  
Anggota :

1. Dadang Rohmawan
2. Rd. Agustin Adinugraha, S
3. Atang Setiawan, SE
4. Drs. Jajat Wijaya

c. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Penasehat : KH. MA. Zainal Abidin  
Donny Ahmad Munir, ST., MM  
Ketua : K. Azis Syamsudin, SP  
Wakil Ketua : Ahmad Jubaedi  
Sekretaris : Dra. Odah  
Anggota : Nurdin Zaen, SE

d. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Ketua : Apiatno, SE  
Wakil Ketua : Yani Citareni, Amd  
Sekretaris : drg. Rahmat Juliadi  
Bendahara : Rikrik Hartadi, SE  
Anggota : H. Dedy Ambara, LC

e. Fraksi Demokrat

Ketua : Otong Dartum GN, SE  
Wakil Ketua : Drs. H. Sarnata  
Sekretaris : Nurani Fuzianti, ST  
Anggota :  
1. Ending Ahmad Sajidin  
2. Kusdiaman  
3. Abu Bakar, Amd  
4. Dudi Supriadi, ST

4. Visi dan Misi DPRD Kabupaten Sumedang

Visi DPRD Kabupaten Sumedang adalah: *Terwujudnya sebagai Daerah Agribisnis dan Pariwisata yang didukung oleh Masyarakat Beriman dan Bertaqwa, yang Maju dan Mandiri, Sehat, demokratis, berwawasan Lingkungan serta menjunjung tinggi hukum.*

Untuk mencapai Visi tersebut, DPRD Kabupaten Sumedang Periode 2 mengemban Misi sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengembangan demokrasi masyarakat;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui

legislasi dan pengawasan terhadap kinerja eksekutif.

#### H. SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah 41 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan structural pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang adalah merupakan unsur pelayanan kepada DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD, sedangkan secara teknis administratif dibina oleh Sekretariat Daerah. Dengan demikian tugas pokok Sekretariat DPRD adalah memberikan pelayanan administratif kesekretariatan, administrasi Keuangan mendukung dan tugas fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat DPRD didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari Sekretaris DPRD, tiga kepala bagian dan enam kepala sub bagian.

Pada masa awal keanggotaan DPRD 2004-2009, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Drs. H. Teddy Supriyadi, MM. dan dari 2006-2009 dipimpin oleh Drs. Iwa Kuswaeri, MM. dan dari 2009 sampai sekarang Sekretariat DPRD di pimpin oleh Ir. Yosep

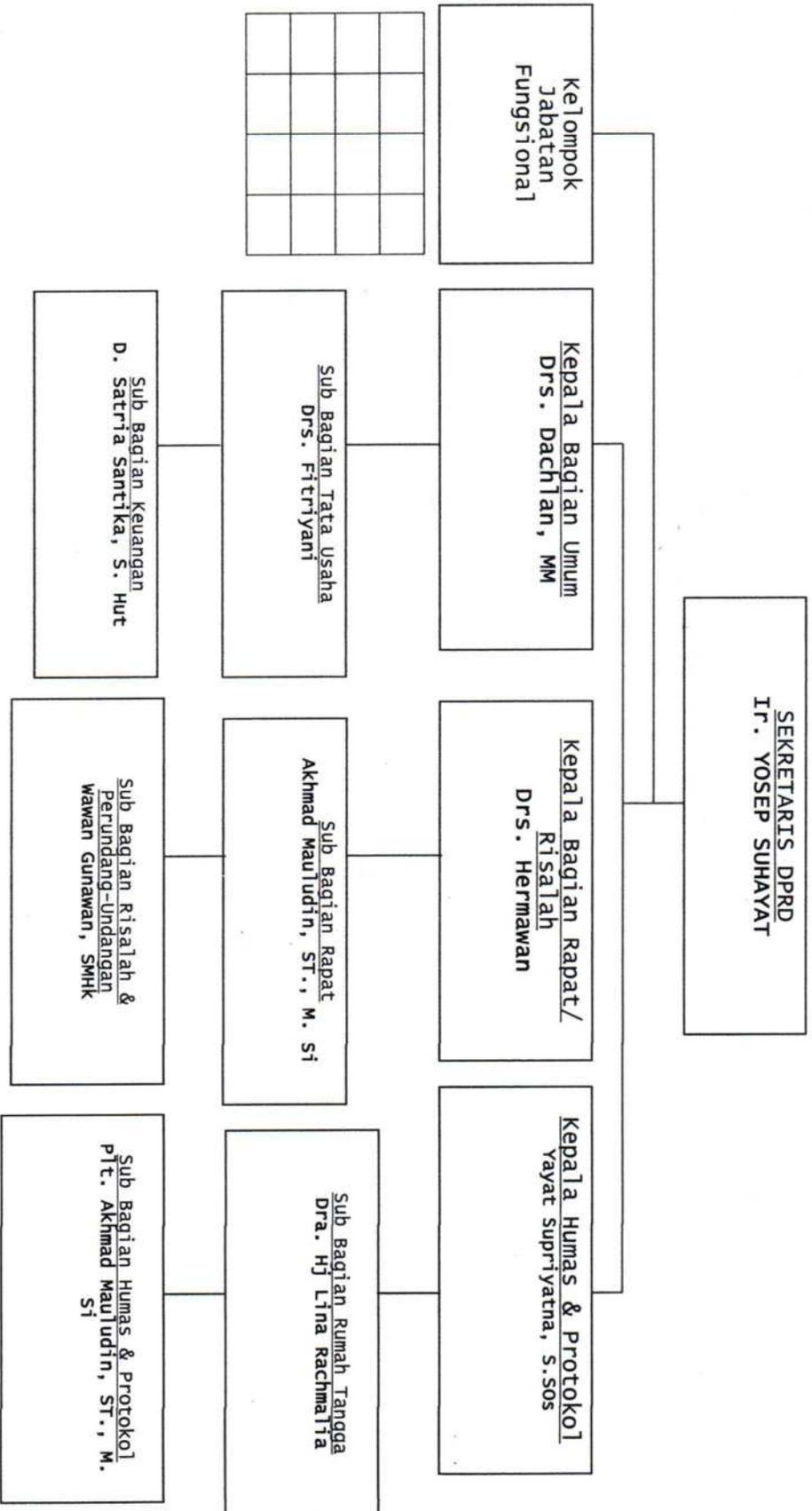
Suhat, Sebelum diterbitkannya Perda Nomor 50 Tahun 2000, Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari 1 Sekretaris DPRD, 2 Kepala Bagian (Bagian Umum dan Bagian Rapat Risalah) dan 7 kepala Sub Bagian, dan Sejak terbitnya Perda nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, susunan organisasi tersebut mengalami perubahan menjadi 3 Kepala bagian dan 6 Kepala Sub Bagian. Adapun dengan terbitnya Perda Nomor 8 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi di Sekretariat DPRD tetap tidak mengalami perubahan.

Sampai dengan tahun 2009 jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD sebanyak 67 orang yang terdiri dari 35 pria dan 12 orang wanita. Dari keseluruhan pegawai tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

Status Pegawai

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) | : 40 orang |
| 2. Calon PNS                  | : 7 orang  |
| 3. Tenaga kontrak             | : 20 orang |

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMEDANG**



DAFTAR  
KATA KUNCI DAN KETERANGAN  
KASUSUSI BUKU BANGSA 2004 - 2009

A. PERBEDAAN AKAT LAYANAN DAN DPRI

1. Perbedaan Struktur

Perbedaan struktur organisasi yang berkaitan dengan

fungsi/organisasi, seperti, Departemen (DPRD), dan

bagian-bagian yang ada di dalamnya, seperti, dan



BAB IV  
KINERJA DAN KEGIATAN DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG 2004 - 2009

A. PERUBAHAN ALAT KELENGKAPAN DPRD

1. Perubahan Pimpinan

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus mengalami perkembangan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Peraturan Tata Tertib DPR. Dampak terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut, mengandung konsekuensi yuridis terhadap Keputusan DPRD Nomor 1 tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang.

Dengan terbitnya Keputusan DPRD yang baru tersebut, berdampak pula terhadap kedudukan dan susunan Pimpinan DPRD serta alat keleengkapan DPRD lainnya. Oleh karena itu, salah satu dinamika yang terjadi dalam lembaga DPRD Kabupaten Sumedang Periode 2004-2009, antara lain terjadinya perubahan Pimpinan DPRD pada tahun 2004.

Mengenai kedudukan dan susunan Pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) bahwa: *"Pimpinan DPRD terdiri atas seorang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua, (2) Pimpinan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam rapat Paripurna sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata tertib ini, (3) Hasil pemilihan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan tidak boleh berasal dari Fraksi yang sama kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Tata Tertib ini.*

Selanjutnya, Pasal 53 tentang Tugas dan Kewajiban :

Ayat (1) Pimpinan DPRD mempunyai Tugas :

- a. *Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil Keputusan.*
- b. *Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua.*

- c. Menjadi juru bicara DPRD
- d. Menyampaikan Progres Report mengenai Pelaksanaan Kegiatan DPRD secara berkala kepada publik
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan Putusan DPRD
- f. Mengadakan Konsultasi dengan Kepala Daerah dan Instansi pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD.
- g. Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan
- h. Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- i. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD

Ayat (2) Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif.

Ayat (3) Apabila Ketua dan para wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, maka tugas-tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara.

Oleh karena itu, kegiatan rapat-rapat DPRD sebelum Pimpinan DPRD definitif terbentuk, dipimpin oleh pimpinan sementara, sesuai dengan bunyi Pasal 48 ayat (1), yaitu :

*"Selama Pimpinan DPRD belum terbentuk, Rapat-rapat untuk sementara dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dengan dibantu oleh anggota yang termuda usianya yang disebut Pimpinan Sementara".*

## 2. Perubahan Personalia Komisi-Komisi, Panmus dan Panggar

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 171/15/K6p. Pimp. DPRD/2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang Penetapan Susunan Personalia Pimpinan Komisi, Pimpinan Harian Panitia Musyawarah dan Pimpinan Harian

Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut :

### 2.1. Pimpinan dan Anggota Komisi

#### Komisi A

Ketua : Drs. H. Sarnata  
Wakil Ketua : Rani Hoirunisa, S. Sos  
Sekretaris : Rikrik Hartadi, S. Sos  
Anggota :  
1. Ny. Tati Setiawati Kusumah  
2. Jajang Heryana, Amd.  
3. Rd. Agustin Adi Nugraha  
4. Yaya Widarya  
5. Ahmad Jubaedi  
6. Drs. K. Supriadi  
7. Ending Ahmad Sajidin

#### KOMISI B

Ketua : Drs. Minan Sukarnan  
Wakil Ketua : Drs. Naya Sunarya  
Sekretaris : Nurdin Zaen, SE  
Anggota :  
1. Ny. Yati Suhayati  
2. Kusdiaman  
3. Kusman Purnama  
4. Atang Setiawan, SE.  
5. Apiatno, SE  
6. Abubakar, Amd

#### KOMISI C

Ketua : H. Dedy Ambara, L.c  
Wakil Ketua : H. Aat Permana (alm)  
Sekretaris : Huliman Abdul Gofur, S.Sos  
Anggota :  
1. Taryana, SH  
2. Nanang Rahmat Mulyadi  
3. Sutisna  
4. Drs. Jajat Wijaya  
5. KH. MA. Zaenal abidin  
6. K. Azis Samsudin

7. Yani Citareni, Amd
8. Nurani Fuzianti, ST

#### KOMISI D

- Ketua : Sidik Jafar  
wakil Ketua : Drg. Rahmat Juliadi  
Sekretaris : Ir. Edi Askari  
Anggota :
1. H. Faried Susanto
  2. H. Ence Sudrajat
  3. Dudi Supriadi, ST
  4. Ade Nono Sudiono
  5. Dra. Odah
  6. Edi Sunardi, SIP
  7. Otong Dartum GN, SE

## 2.2 Panitia Musyawarah

Personalia Pimpinan Dan Anggota Panitia Musyawarah(PANMUS) mengalami pula pergantian/perubahan.

## 2.3 Pimpinan dan anggota panitia anggaran

Susunan personalia panitia anggaran terdiri dari

- Ketua : Drs. Ismet Suparmat  
wakil Ketua : Drs. H. Agus Weliyanto Santoso, SH  
wakil Ketua : H. Donny Ahmad Munir, ST  
Sekretaris : Ir. Yosep Suhayat  
Ketua Harian : Ir. Edi Askari  
wakil Ketua Harian : Ending Ahmad Sajidin  
Sekretaris Harian : Nurdin Zaen, SE  
Anggota :
1. Drs. Minan Sukarnan
  2. Ny. Tati Setiawati Kusumah
  3. Taryana, SH
  4. Drs. Naya Sunarya
  5. Ade Nono Sudiono
  6. Yaya Widarya
  7. KH. MA. Zaenal Abidin

8. Ny. Yani Citraeni SE
9. Apiatno, SE
10. Drs. H. Sarnata
11. Dudi Supardi, ST
12. H. Faried Susanto
13. Drs. Jajat Wijaya
14. Dra. Odah
15. Dadang Rohmawan, SE
16. Ade Sutrisno, SE

### 3. Pergantian Anggota Dan Revisi PAW Selama 2004-2009.

Selama 2004 - 2009 keanggotaan DPRD Kabupaten Sumedang hasil pemilu 1999 dan anggota TNI/POLRI yang diangkat, mengalami pergantian. Pergantian atau revisi keanggotaan antara lain terjadi pada praksi PDI Perjuangan sebanyak 14 orang. Dengan keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171/KEP.172-OTDA/2000 tanggal 1 Maret 2000, keempat belas anggota DPRD baru dari fraksi PDI Perjuangan sebagai pengganti 14 anggota sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Drs.H. Agus Weliy Yanto Santoso, SH
2. Momo Sukarmo
3. nana Rukmana
4. Dadi Darmaji Permadi
5. Tatang Tengki
6. Tata Suyanto AJ
7. Drs. Jajat Wijaya
8. Atang Setiawan, SE
9. Teti Soeharti, SP
10. Drs. Jajat Suwarjat S.
11. Yaya Widarya
12. Ajang Toni Kartono
13. Saepudin
14. Rd. Agustin Adi Nugraha S

(Nama-nama anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan hasil pemilu 1999 yang mengalami

pergantian sebagaimana diuraikan dalam Bab III mengenai kondisi khusus/kondisi awal keanggotaan).

Selain Fraksi PDI perjuangan, dalam Fraksi TNI/POLRI lima anggotanya mengalami pergantian antar waktu(PAW). Dalam keputusan Gubernur No. 171/SK.899-OTDA/99 tanggal 10 Agustus 1999, anggota DPRD dari Fraksi TNI/POLRI yang diangkat terdiri dari : Letkol INF. Pintar Guru Singa(TNI AD). Letkol INF Dodo Daryo(TNI AD), Mayor Con. Ahri Suheri(TNI AD), Letkol Laut, KH. Setiawan(TNI AL) dan Mayor PSK Didi Suhadi(TNI AU).

Sebagai pengganti kelima anggota Fraksi TNI/POLRI tersebut di atas terdiri dari Letkol INF Dedi Sumardi(Sejak 6 Pebruari 2001), Letkol Kav. Djadjang Asmara(Sejak 26 Pebruari 2001), Kapten Lek. Karna(Sejak 11 Maret 2002), Letkol. CAJ. Ir. Moeryanto(Dejak 18 April 2002) dan Mayor Laut(KH) Tresna Kusumawati(Sejak 12 September 2002)

Dalam tubuh Fraksi partai Golkar selama kurun lima tahun terjadi pergantian antar waktu(PAW) yaitu: H. Oting Karya Pradaja, BA(ALM) diganti oleh Ir. Edi Ashari(Sejak 24 Maret 2000), H. Aa Komara Mustafa(ALM) digantikan oleh Edi Herwandi(Sejak 8 Oktober 2002), Drs. H. Osin Herlianto(terpilih sebagai wakil Bupati Sumedang periode 2003-2008) digantikan oleh Oban Syahbana(Sejak 21 Nopember 2003)

Salah seorang anggota Fraksi Persudaraan Umamat DPRD Kabupaten Sumedang dari partai MKGR. H. Engkat Sukatma meninggal dunia pada tanggal 13 Septenber 2003 dan sebagai penggantinya Entje, sejak 21 Nopember 2003.

## B. PERANAN DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG 1999-2004

### 1. IMPLEMENTASI FUNGSI DAN TUGAS LEGISLASI/PENGATURAN

Salah satu tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga Perwakilan Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan tertuang dalam keputusan DPRD Nomor 1 tahun 1999 yang disempurnakan dengan keputusan DPRD nomor 08 tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD, antara lain menyatakan: "*DPRD bersama-sama Kepala Daerah membentuk Peraturan Daerah(Perda)*".

Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang mengatur sesuatu yang fundamental, luas ruang lingkup dan dikeluarkannya dengan tujuan untuk mewujudkan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dan membentuk atau menetapkan suatu badan organisai dalam lingkup Pemerintah daerah.

Ditinjau dari kedudukannya, perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dan syah dalam hukum positif di Indonesia, disamping peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, hal-hal yang diatur dalam Perda mempunyai daya laku dalam batas-batas daerah yang bersangkutan, serta materi yang diaturinya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi (*Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*).

Membuat Perda merupakan tugas yang tidak ringan. Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal yaitu: tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi(pasal 70 UU Nomor 22 Tahun 1999), serta ditetapkan oleh Kepala Daerah atas dasar persetujuan DPRD, akan tetapi juga pembuatan Perda menuntut persiapan

dan pengetahuan yang mendalam, baik dibidang hukum maupun pengetahuan lainnya. Termasuk teknis penyusunan/penulisa, selain disusun secara sistematis, pemakaian bahasa harus sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baku dan bahasa hukum yang tepat, sehingga tidak mempunyai arti ganda.

Peraturan Daerah harus bersifat akomodatif dari seluruh kepentingan yang ada dan tumbuh di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik interest yang dapat mempengaruhi dan menurunkan kredibilitas DPRD sebagai lembaga yang mengemban fungsi pengaturan/legislasi. Oleh karena itu, dalam rangka pembuatan Perda dilakukan melalui proses dan tahapan-tahapan yang pada dasarnya mengacu kepada Rencana Strategis Daerah (Renstra) Kabupaten Sumedang, serta membuka ruang secara luas bagi keterlibatan partisipasi publik dari berbagai elemen dan komponen masyarakat untuk memberikan masukan-masukan, antara lain melalui Perjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara).

Selama kurun 1999-2004, DPRD Kabupaten Sumedang sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengaturan/legislasi telah berhasil membuat produk-produk hukum sebagai berikut:

Produk-produk hukum lainnya yaitu:

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Peraturan Daerah (Perda) | : 54 buah |
| 2. Keputusan DPRD           | : 49 buah |
| 3. Keputusan Pimpinan DPRD  | : 73 buah |

(Daftar Produk-produk hukum tersebut dapat dilihat pada Lampiran buku ini)

## 2. IMPLEMENTASI FUNGSI BUDGET/PENGANGGARAN

Salah satu tugas pokok dan wewenang DPRD sebagai Lembaga legislatif daerah antara lain yang berkaitan dengan fungsi *budgeting*/penganggaran. Daerah konteks ini, DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), yaitu suatu rencana

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

Paradigma baru Pemerintah daerah mengedepankan otonomi luas, bertolak dari prinsip semua urusan pemerintah pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dengan demikian, segala aspek kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan urusan dan kepentingan umum, baik dibidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, dengan sendirinya urusan rumah tangga daerah menjadi luas pula. Konsekuensinya, Daerah dituntut untuk mampu menggali berbagai potensi untuk memperbesar sumber pendapatan keuangan, karena dengan otonomi luas memerlukan dukungan anggaran yang besar pula.

Kendati ada ketentuan tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, namun patut dicatat bahwa: **Pertama**, keuangan pusat lebih kuat dibandingkan daripada keuangan daerah, **Kedua**, meskipun sumber keuangan Daerah diperbesar, namun daerah belum mampu secara penuh membiayai urusan rumah tangga daerah, umumnya bersifat pelayanan yang banyak menyerap anggaran daripada menghasilkan uang (pendapatan). Pelayanan ini semakin meningkat, baik mutu maupun jenisnya, akibat kemajuan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Mekanisme penyusunan APBD yang telah dilaksanakan DPRD selama ini berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 yang dijadikan salah satu pedoman dengan penguatan pada aspek-aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) yang dilaksanakan oleh DPRD sebagai institusi, dengan selalu mengundang elemen masyarakat (tokoh masyarakat, ulama, Asosiasi BPD, Asosiasi Kepala

Desa, LSM, Pwrs, organisasi profesi, mahasiswa dan lain-lain). Jaring Asmara ini tetap mengacu kepada Rencana Strategi Daerah dan hasilnya sebagai bahan masukan bagi DPRD dalam menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD. Disamping itu, Penjaringan Aspirasi ini dilaksanakan oleh Alat kelengkapan DPRD (Komisin dan Panggar) serta fraksi-fraksi DPRD.

Dalam meningkatkan keterbukaan dan partisipasi dalam pembahasan APBD ini, DPRD melakukan kegiatan penyebarluasan informasi, baik melalui spanduk, wawancara interaktif di radio siaran, jumpa wartawan (Konferensi Pers), serta mengundang berbagai elemen masyarakat.

2. DPRD bersama-sama Pemda menyusun arah dan kebijaksanaan umum APBD dalam rangka menyiapkan rancangan APBD;
3. Kepala Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD berdasarkan arah dan kebijakan di atas;
4. Arah kebijaksanaan umum dan strategi prioritas APBD ditetapkan oleh Kepala Daerah dan disebarkan ke setiap perangkat daerah sebagai pedoman untuk menyusun usulan dalam Raska;
5. Raska tersebut dibahas Tim anggaran esekutif dengan tata cara pembahasan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dituangkan dalam daftar APBD;
6. Pemda menyampaikan Nota Pengantar dan Daftar APBD kepada DPRD dan DPRD memahasanya melalui Panitia Anggaran
7. Panitia Anggaran membahas Daftar RAPBD dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - 7.1 Pembahasan internal panggar, dalam rangka menetapkan pokok-pokok bahasan yang dipandang cukup krusial dan menetapkan materi-materi *cross check* lapangan serta jadwal pembahasan raska dengan Tim Anggaran esekutif;
  - 7.2 Melakukan *cross check* lapangan sekaligus menyerap informasi masyarakat dan pelaku,

terutama dengan bagian pendapatan;

- 7.3 Mengadakan rapat kerja dengan Tim Anggaran Eksekutif serta perangkat daerah lainnya untuk membahas raska setiap instansi dengan Panggar, apakah Raska tersebut telah sesuai dengan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas APBD atau belum;
- 7.4 Mengadakan Rapat Pleno Panggar dan penyesuaian terhadap hasil-hasil pembahasan.
8. Pembicaraan tahap I, Bupati menyampaikan Nota Keuangan dan raperda tentang APBD kepada DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD. Sebelum dibahas Raperda ini disosialisasikan oleh DPRD kepada masyarakat dengan mengundang kembali elemen-elemen masyarakat untuk bersama-sama membahas Raperda APBD;
9. Pembicaraan tahap II, yaitu penyampaian Pandangan Umum dari fraksi-fraksi yang sebelumnya fraksi-fraksi telah menampung aspirasi masyarakat. Dalam tahapan ini pula Bupati menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi;
10. Pembicaraan Tahap III, yaitu pembahasan oleh komisi-komisi dan pembahasan kembali oleh Panggar dengan Tim Eksekutif;
11. Pembicaraan tahap IV (Pengambilan Keputusan)
  - Laporan Panggar dalam rapat Paripura DPRD Dalam laporan ini senantiasa disampaikan besaran-besaran APBD pada setiap bidang dan juga perubahan-perubahan yang telah dilakukan, bahkan disampaikan rincian-rincian pengalokasian APBD;
  - Pendapat akhir fraksi (menyatakan keputusan)
  - Pengambilan keputusan  
Besaran APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2004 sampai dengan 2009.

### **3. IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pengawasan atau pengontrolan yang dilakukan oleh DPRD

antara lain melalui hak mengajukan pertanyaan, meminta keterangan dan penyelidikan. Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD secara teknis oleh komisi-komisi DPRD, antara lain melalui *cross check* lapangan

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD khususnya, komisi-komisi melakukan pengecekan lapangan untuk mengambil beberapa *sample* guna melihat langsung realisasi pelaksanaan APBD, sehingga dapat diperoleh gambaran antara perencanaan dan realisasi fisik, melakukan pengecekan terhadap prosedur kontrak, RAB, administrasi, konstruksi, dan lain-lain sekaligus menerima pengaduan dari masyarakat dan melakukan pemecahan masalah-masalahnya. Disamping itu, pelaksanaan pengawasan dilakukan pula melalui pembahasan evaluasi APBD Triwulan dengan Pemda.

Sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan oleh DPRD meliputi:

- 3.1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lain;
- 3.2. Pengawasan Pelaksanaan Keputusan Kepala daerah
- 3.3. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja daerah
- 3.4. Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah
- 3.5. Pengawasan Pelaksanaan Kerjasama Internasional di Daerah
- 3.6. pengawasan pelaksanaan Kerjasama Antar daerah

#### **4. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah merupakan representasi dan raplika dari kehidupan rakyat yang diwakili. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ditampung dan dikaji, sehingga dapat diperpleh solusinya.

Dalam merespon aspirasi dan pengaduan masyarakat, antara lain dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat, dan

menerima pengaduan masyarakat secara langsung dan atau melalui surat. Kegiatan ini dikenal dengan Jaring Asmara (Penjaringan Aspirasi Masyarakat). Selama kurun 1999-2004, DPRD cukup banyak menampung berbagai permasalahan yang berkembang dan disampaikan oleh masyarakat, baik melalui surat, media massa maupun dalam bentuk unjuk rasa.

Aspirasi yang tumbuh dan disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat, meliputi berbagai bidang dan aspek kehidupan. Dari sejumlah problematika yang cukup menonjol muncul ke permukaan dan disampaikan serta menjadi pembahasan di DPRD, antara lain:

**a. Tuntutan Pencabutan SK Gubernur No. 1 Thn 1984**

Berkaitan dengan rencana-pembangunan bendungan Jatigede, Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 181.1/SK. Pem Um/1981 tentang Larangan Membangun di Kawasan Proyek Jatigede. Sehubungan dengan ketidakpastian kelanjutan rencana pembangunan proyek yang dirintis sejak tahun 1963 itu, masyarakat menuntut pencabutan SK tersebut, karena dinilai telah menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat setempat, khususnya dalam pembangunan prasarana/sarana dan fasilitas sosial. Selama belasan tahun masyarakat berada dalam kondisi yang serba tertinggal oleh daerah lain di Kabupaten Sumedang, baik yang menyangkut sarana pendidikan, kesehatan, penerangan listrik maupun prasarana jalan.

Tuntutan masyarakat tersebut akhirnya terkabul dengan terbitnya Keputusan Gubernur Nomor; 36 Tahun 2000 tentang Pengamanan dan Pengawasan Tanah dan Benda-Benda di daerah yang akan tergenang Jatigede.

**b. Ganti Rugi Jaringan SUTET**

Pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sempat menimbulkan gejolak masyarakat yang cukup panas, karena masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumedang yang lahan milik dan tempat tinggalnya

terlewat saluran tersebut selalu dicekam. rasa khawatir clan carries. saluran listrik tegangan ekstra tinggi tersebut dikhawatirkan menimbulkan dampak yang mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan clan psikologios.

Disamping itu, lahan-lahan milik masyarakat yang berada di bawah Sutet mengalami kecenderungan sulit untuk dijual dan kalaupun laku dijual, nilai jualnya menjadi rendah.

Masyarakat yang tanah dan tempat tinggalnya berada di bawah saluran tersebut, kemudian berkali-kali melakukan unjukrasa untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi yang memadai. Pembahasan mengenai ganti rugi Sutet oleh DPRD dengan pihak-pihak terkait, cukup memakan waktu panjang dan alot untuk mendapatkan titik temu. Namun akhirnya harapan dan tuntutan masyarakat tersebut dapat terkabul.

Selama kurun lima tahun keanggotaan DPRD Kabupaten Sumedang 2004 - 2009, cukup banyak aspirasi lainnya yang muncul dan disalurkan ke DPRD selain masalah-masalah sebagaimana diuraikan di atas, sejumlah masalah lainnya pun, hampir tak pernah surut disampaikan masyarakat kepada DPRD, antara lain:

- Trayek Jalur Angkutan Kota
- Pengangkatan Tenaga "Siluman"
- Ketenagakerjaan
- Tuntutan perbaikan nasib guru;
- Kesejahteraan Kepala Desa
- Pengangkatan Sekretaris Desa
- Proyek Jatigede
- BUMD (PD, BPR & PDAM)
- Masalah Jalan Tol CISUNDAWU
- Permasalahan SOTK Baru
- Pertanahan
- Masalah lingkungan, dll.

Aspirasi yang ditangani, dikaji dan dicarikan solusinya oleh DPRD tidak hanya terbatas kepada aspirasi

yang muncul atau disampaikan dalam bentuk unjukrasa. Pengaduan-pengaduan masyarakat melalui surat maupun pemberitaan media massa, selalu mendapat perhatian secara seksama dari DPRD melalui Pansus-Pansus yang dibentuk sesuai dengan permasalahannya.

### C. KEGIATAN STUDI BANDING

Setiap daerah baik kabupaten maupun kota, dituntut terus meningkatkan kemampuan daerahnya dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengatasi atau mencari solusi yang tepat dan efektif terhadap permasalahan maupun tuntutan pembangunan dan pemerintahan di daerahnya. Setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing yang mungkin disamping terdapat perbedaan, akan tetapi juga kemungkinan memiliki kesamaan-kesamaan dalam aspek-aspek tertentu. Termasuk dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

Pengetahuan tentang perbedaan dan kesamaan karakteristik permasalahan masing-masing daerah serta cara mengatasinya, merupakan pengetahuan yang cukup bermanfaat dan perlu menjadi bagian dari pengetahuan dari wawasan para penyelenggara pemerintahan di-daerah.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumedang sebagai daerah agrobisnis dan pariwisata dan Misi dan Visi terbaru dengan ketetapan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang tahun 2005 - 2025 Lembaran Daerah Tahun 2008 nomor 2, yaitu *KABUPATEN SUMEDANG SEHJTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS* pada Tahun 2025 visi tersebut dapat di ringkas menjadi *SUMEDANG SEHATI* yang telah menjadi komitmen bersama, telah banyak dilakukan upaya oleh pemerintah. Daerah bersama Lembaga Legislatif. Upaya-upaya tersebut antara lain melakukan pengkajian, penelitian, seminar dan lokakarya. Termasuk rapat kerja dalam Dinas/Instansi/Lembaga baik yang bersifat rutin maupun khusus. Demikian pula upaya sosialisasi visi dan misi tersebut terus dilakukan.

Namun upaya upaya yang telah dilakukan dipandang masih

belum mencapai hasil optimal, sesuai dengan harapan bersama. Berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Sumedang untuk menjadi daerah Agribisnis dan Padwisata belum dapat seluruhnya tergali dan dikembangkan, sehingga potensi-potensi besar yang dimiliki belum dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kemakmuran masyarakat dan daerah.

Beranjak dari pemikiran tersebut, maka DPRD Kabupaten Sumedang memandang penting untuk terus menimba ilmu dan pengalaman dari daerah-daerah lain, baik di dalam propinsi maupun luar propinsi yang telah lebih maju dan berhasil dalam menggali serta mengelola segala potensi yang dimilikinya itu. Untuk itu, DPRD Kabupaten Sumedang melakukan kegiatan studi banding yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun yaitu pada triwulan II ke daerah di dalam propinsi dan triwulan IV ke daerah di luar propinsi.

Maksud dilaksanakan studi banding adalah untuk memperoleh data dan informasi serta menimba-pengalaman praktis lapangan, baik yang berkaitan kaitan dengan kebijakan, perencanaan maupun *action* di - lapangan; dengan harapan diperoleh suatu wawasan dan inspirasi untuk'diterapkan di Kabupaten Sumedang, khususnya berkaitan dengan pencapaian visi Kabupaten Sumedang.

Fokus materi studi banding sesuai dengan bidang garapan masing-masing Komisi dengan menggunakan metode tukar informasi, dialog dan kunjungan lapangan. Dari kegiatan studi banding keberbagai daerah cukup banyak aspek yang dapat dijadikan bahan telahan yang mendalam bagi peningkatan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sumedang. Cukup banyak pengalaman yang bias diterakan di kabupaten Sumedang dan terdapat peluang-peluang atau kemungkinan untuk melakukan kerjasama antara Kabupaten Sumedang dengan daerah lain yang telah dikunjungi dalam rangka kegiatan studi banding tersebut.

#### **D. KEGIATAN PANSUS SELAMA 2004-2009**

##### **Tahun 2004**

1. Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang.
2. Membahas Permohonan Persetujuan DPRD mengenai pinjaman tanah milik Pemda untuk bangunan Gedung Pengadilan Agama
3. Likuidasi 4 Bank Perkeriditan Rakyat (BPR)
4. Kesanggupan menerima urusan di bidang Bina marga, Cipta Karya dan Urusan Kesejahteraan Sosial
5. Membahas 5 buah Rancangan Penghapusan Barang Milik Pemda

##### **Tahun 2005**

1. Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang.
2. Pembahasan 9 (sembilan) buah Rancangan Perda Kabupaten Sumedang
3. Pembahasan Permohonan Penghapusan Barang Milik Pemda Kabupaten Sumedang
4. Pembahasan RAPERDA, tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sumedang dan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 1999 2000
5. Pembahasan 22 (duapuluh dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
6. Pembahasan 20 (duapuluh) buah Raperda Kabupaten Sumedang

##### **Tahun 2006**

1. Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2000
2. Pembahasan Perubahan Keputusan Pimpinan DPRD No. 1 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang
3. Pembahasan 49 (empat puluh sembilan) Raperda Kabupaten Sumedang

##### **Tahun 2007**

1. Pembahasan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

(REPETADA) Kabupaten Sumedang Tahun 2002

2. Pembahasan 9 (sembilan) bush Raperda Kabupaten Sumedang
3. Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2001
4. Pembahasan dalam rangka menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat terkena rencana Proyek Jatigede

#### **Tahun 2008**

1. Pembahasan 16 Raperda Kab. Sumedang.
2. Penyusunan Peraturan Tata Tertib Pencalonan, Pemilihan Pengesahan, dan Pemberhentian Bupati dan wakil Bupati Sumedang Tahun 2003-2008
3. Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Sumedang Masa Bhakti 1998-2003
4. Pembahasan Raperda tentang Rencana Strategic Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008
5. Pembahasan 14 (empatbelas) buah Raperda Kabupaten Sumedang

#### **Tahun 2009**

1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Sumedang Akhir Tahun Anggaran 2008
2. Pembahasan dalam rangka 3 (tiga) Raperda tentang Perda Pokok Pokok Keuangan Daerah, Perda Ketenagalistrikan, Perda Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
3. Pembahasan Dalam Rangka LPP dan Rencana Kerja DPRD Kab. Sumedang 2010.
4. Pembahasan dalam Rangka Perubahan KUA & PPA TA 2008
5. Pembahasan dalam rangka Perubahan APBD 2009

**E. REKAPITULASI KEGIATAN KOMISI SELAMA 2004-2009**

**1. KOMISI A**

- a. Dengar Pendapat : 30 kali
- b. Rapat Kerja : 63 kali
- c. Kunjungan Kerja : 30 kali
- d. Rapat Kerja Gabungan Komisi : 43 kali
- e. Studi Banding : 6 kali

**2. KOMISI B**

- a. Dengar Pendapat : 28 kali
- b. Rapat Kerja : 29 kali
- c. Kunjungan Kerja : 40 kali
- d. Rapat Kerja Gabungan Komisi : 36 kali
- e. Studi Banding : 8 kali
- f. Peninjauan Lapangan : 27 kali
- g. Penerimaan Aspirasi : 22 kali
- h. Audisi : 12 kali

**3. KOMISI C**

- a. Aspirasi : 20 kali
- b. Rapat Komisi : 23 kali
- c. Rapat Kerja : 27 kali
- d. Rapat Kerja Gabungan Komisi : 11 kali
- e. Kunjungan Kerja : 39 kali

**4. KOMISI D**

- a. Aspirasi/ Audensi : 23 kali
- b. Rapat Komisi : 40 kali
- c. Rapat Kerja : 36 kali
- d. Rapat Kerja Gabungan Komisi : 33 kali
- e. Kunjungan Kerja : 61 kali

**G. REKAPITULASI RAPAT PARIPURNA DPRD**

- 1. Rapat Paripurna DPRD : 106 kali
- 2. Rapat Paripurna Khusus : 6 kali
- 3. Rapat Paripurna Istimewa : 11 kali



## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan tugas keanggotaan DPRD Kabupaten Sumedang selama kurun lima tahun 2004 - 2009, secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki fungsi yang dapat dibagi ke dalam beberapa, dimensi, antara lain: (1) dimensi sebagai wakil rakyat yaitu lembaga representasi dan replika yang menunjukkan keanekaragaman yang diwakili yang meliputi segala aspek kehidupan, (2) dimensi *legislatif* yang membentuk seperangkat peraturan (produk hukum daerah), (3) *dimensi budgeting atau penganggaran*, (4) *dimensi* pengontrol pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dimensi lain yang belum termasuk ke dalam dimensi tersebut di atas yang menjadi tugas dan wewenang DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, dll.
2. Dalam proses bekerjanya, DPRD Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang saling berkait yang memberikan warna, nuansa dan dinamika dalam mengaktualisasikan fungsi-fungsinya; seperti perubahan paradigma sistem politik dan pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, faktor *stimulieksternal*, input-input eksekutif, aspirasi serta aktifitas masyarakat dan elemen-elemen masyarakat, serta faktor-faktor situasional lainnya.
3. Demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip yang selalu dijadikan pegangan oleh DPRD Kabupaten Sumedang dalam merancang dan merumuskan setiap arah kebijakan strategik dalam

pembangunan segala bidang di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan proses pembahasan untuk merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan, DPRD selalu membuka ruang yang luas bagi keterlibatan publik sehingga sebagai komunikator suprastruktur politik di daerah, proses komunikasi politik yang dibangun berorientasi membangun partisipasi dan memperhatikan hak azasi;

4. Oleh karena menciptakan kesejahteraan umum adalah muara dari setiap upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga sekalipun DPRD merupakan lembaga politik, tidak semata-mata hanya menekankan pada *political sphere* (medan politik), melainkan lebih mengedepankan pula *social sphere* dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya;
5. Aspek kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam disamping terus mengalami perubahan yang cepat dan serempak dalam berbagai segi, sehingga satu permasalahan belum tuntas terselesaikan, permasalahan yang baru sudah bermunculan lagi. Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugas selama kurun lima tahun, disamping telah banyak keberhasilan yang telah dicapai, sudah barang tentu permasalahan dan aspirasi masyarakat belum dapat terakomodasi seluruhnya. Namun demikian, fungsi dan peranan DPRD Kabupaten Sumedang telah dapat berjalan dengan baik. Indikatornya antara lain, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang bedalan baik. Sebab, apabila DPRD sebagai lembaga yang melahirkan produk-produk hukum sebagai landasan perilaku para pengelola sistem tidak melakukan fungsinya, maka akan macetlah totalitas sistem di daerah.

## B. SARAN. SARAN DAN HARAPAN

1. Kondisi obyektif akhir pelaksanaan tugas dan kinerja yang telah dicapai DPRD Kabupaten Sumedang Periode 2004-2009 sebagaimana dipaparkan dalam buku memori ini, adalah merupakan kondisi awal bagi keanggotaan DPRD Kabupaten Sumedang Periode 2004-2009 sudah barang tentu, segala kekurangan hasil kinerja DPRD 2004-2009 dapat lebih ditingkatkan di masa datang, sehingga mencapai hasil yang lebih optimal. Sedangkan keberhasilan yang telah dicapai seyogyanya terus dilanjutkan demi terciptanya kesinambungan dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan;
2. Kurun waktu 40 tahun pemerintahan yang sarat sentralistik, bukan saja ketiadaan pengalaman mengelola otonomi secara wajar. Lebih dari itu telah pula membentuk tingkah laku dan mungkin pula budaya sentralistik. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Pemerintahan di era Otonomi Daerah, diharapkan terus terjadinya perubahan perubahan dan tingkah laku budaya *pangreh* menjadi - sikap *pamong*. Tidak kalah pentingnya, otonomi sebagai *instrument* demokrasi sangat menghendaki tingkah laku demokratis, baik dari warga maupun penyelenggara pemerintahan. Segala bentuk tingkah laku feodalistik hendaknya diubah menjadi tingkah laku demokratis; termasuk terbukanya ruang debat bagi kalangan birokrat;
3. Upaya untuk mencapai kemakmuran hanya dapat terjadi bila mana dilandasi oleh paradigma pembangunan yang memiliki keterkaitan ekosistem, keanekaragaman dan kesejahteraan. Dengan demikian akan terjamin kesinambungan dan evolusi nilai serta kelembagaannya. Oleh karena itu, dalam setiap upaya pembangunan seyogianya memperhatikan kualitas dan konsistensi. Karena

salah satu, fenomena umum yang didapati (salah satu titik kelemahan) dalam pelaksanaan program-program pembangunan antara lain kurangnya memperhatikan aspek mutu/kualitas dan kesinambungan/konsistensi.

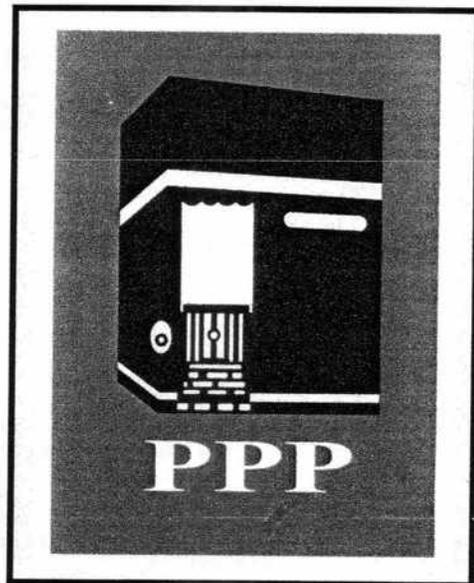
*Lampiran - Lampiran*



*Lampiran - Lampiran*

# *Profil*

*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang*



*Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*



1. Nama Lengkap : Dony Ahmad Munir, ST. MM
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 5 Desember 1973
3. Alamat : Ling. Kaum No. 16 A RT. 02  
RW. 10 Kel. Regol Wetan  
Kec. Sumedang Selatan  
Sumedang
4. No Tlp/ HP : (0261) 206632/ 08112285501
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
- a. Nama Istri/Suami :
- b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : PPP
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan : Sumedang Selatan
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : a. SMU  
b. STTG Garut  
c. UNPAD
12. Riwayat Organisasi : a. IPNU  
b. Senat Mahasiswa  
c. PMII  
d. KNPI
13. Riwayat Pekerjaan : a. Asisten Dosen  
b. Anggota DPRD 1997-1999
14. Riwayat Perjuangan :
15. Jabatan di DPRD : a. Ketua Fraksi PPP  
b. Anggota Komisi C  
c. Sekretaris Harian Pangar  
d. Wakil Ketua DPRD



1. Nama Lengkap : Ahmad Jubaedi
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang 29 Mei 1962
3. Alamat : Dsn Geulewing Rt.01 Rw 05  
Ds Sirnamulya Sumedang  
Utara
4. No Tlp/ HP : 085294994747
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
- a. Nama Istri/Suami : Ade Hayati
- b. Jumlah Anak : Dua (2)
8. Partai Politik : PPP
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan : I
10. Pekerjaan : Wiraswasta
11. Riwayat Pendidikan : a. IAIN Sunangunungjati  
b.  
c.  
d.
12. Riwayat Organisasi : a. GMPI  
b.  
c.  
d.  
e.
13. Riwayat Pekerjaan : a. Anggota DPRD 1997 s/s  
1999  
b. Anggota DPRD 2004 s/d  
2009  
c.  
d.
14. Riwayat Perjuangan :
15. Jabatan di DPRD : a. Anggota Komisi A  
b. Anggota Panmus  
c.  
d.



1. Nama Lengkap : K Aziz Syamsuddin
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 08 September 1971
3. Alamat : Jln Panyingkiran Al Aziziyah No.01 Bongkok Paseh Sumedang
4. No Tlp/ HP : 08122481169
5. Jenis Kelamin : Laki-laki.
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
- a. Nama Istri/Suami : Heni S.
- b. Jumlah Anak : 2 (Dua)
8. Partai Politik : PPP
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : Dapil IV/ Conggeang, Paseh, Ujung Jaya, Tomo, Jatigede
10. Pekerjaan : Wiraswasta, Dagang
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. SDN Sindangjati 1985
  - b. SLTP Pesantren 1988
  - c. SLTA Pesantren 1991
  - d. SI Universitas Majalengka 2009
12. Riwayat Organisasi :
  - a. Ketua MUI Kec. Paseh 2002-Sekarang
  - b. Lajnah Bahsul Masail Nu Kab. Sumedang
  - c. Wakil Ketua DPC PPP 1998-2006/2006-sekarang
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a. Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Ihsan
  - b. Pimpina Yayasan Pendidikan Islam Assalafiyah
  - c. Mengajar di Pesantren Babakan Ciwaringin 1990-1996
14. Riwayat Perjuangan :
  - a. Memberantas tempat kemaksiatan/ WTS Nyalindung Ds. Padanaan Kec. Paseh 1999 Merinis Pondok Pesantren Raudhatul Ihsan Al-Islamy
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Ketua Fraksi PPP DPRD Sumedang



1. Nama Lengkap : Dra. Odah
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 15 Juni 1958
3. Alamat : Dsn. Nanggawer RT. 04 RW. 05 Ds. Padasuka Kec. Sumedang Utara
4. No Tlp/ HP : 08132025842
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
- a. Nama Istri/Suami : Hadiat Sip.
- b. Jumlah Anak : 2 (Dua)
8. Partai Politik : PPP
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : Sumedang VI/ Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua, Surian
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. SDN Padasuka 3 Sumedang 1981
  - b. SMPN 3 Sumedang 1987
  - c. SMA Negeri 1 Sumedang 1992
  - d. FISIP-UNPAD (IP-Si) 1992
12. Riwayat Organisasi :
  - a. Wanita Persatuan Pembangunan 2000-
  - b. KPPI Sumedang 2003-sekarang
  - c. Wakil Ketua DPC PPP Sumedang 2006-2011
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a. Tutor Universitas Terbuka 1992-2004
  - b. Anggota DPRD Kab. Sumedang 2004-2009
  - c.
  - d.
14. Riwayat Perjuangan :
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Anggota Panitia Anggaran
  - b.
  - c.
  - d.



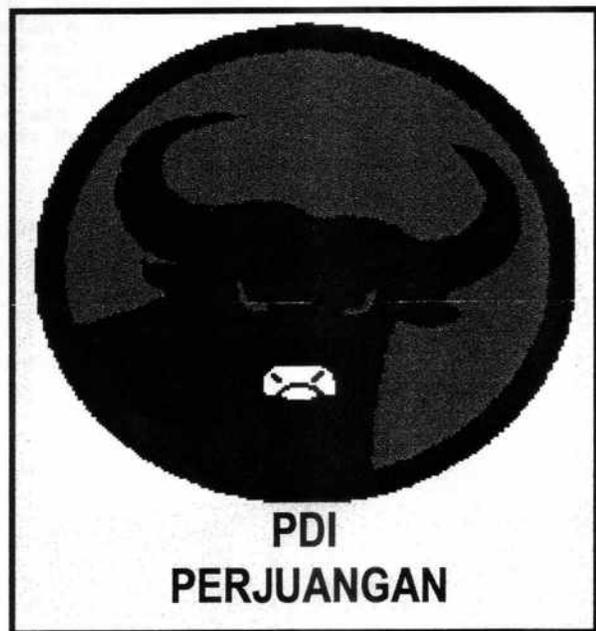
1. Nama Lengkap : Nurdin Zaen, SE
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 13 Maret 1966
3. Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 69  
Rt. 04/07 Kel. Regol wetan  
Kec. Sumedang Selatan
4. No Tlp/ HP : 0261-211054/081320119340
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
- a. Nama Istri/Suami :
- b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : PPP
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan :
10. Pekerjaan :
11. Riwayat Pendidikan : a. S1 IKOPIN  
b.  
c.  
d.
12. Riwayat Organisasi : a.  
b.  
c.  
d.  
e.
13. Riwayat Pekerjaan : a.  
b.  
c.  
d.
14. Riwayat Perjuangan :
15. Jabatan di DPRD : a. Anggota Komisi B  
b.  
c.  
d.



1. Nama Lengkap : K.H. M.A Zainal Abidin
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 17 Agustus 1942
3. Alamat : Dsn. Cipaok RT. 01/01 Desa  
Tarunajaya Kec. Darmaraja  
Sumedang
4. No Tlp/ HP : 08122170307
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
- a. Nama Istri/Suami :
- b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : PPP
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan :
10. Pekerjaan :
11. Riwayat Pendidikan : a. D2 Tahun 1967  
b.  
c.  
d.
12. Riwayat Organisasi : a.  
b.  
c.  
d.  
e.
13. Riwayat Pekerjaan : a.  
b.  
c.  
d.
14. Riwayat Perjuangan :
15. Jabatan di DPRD : a. Anggota Komisi C  
b.  
c.  
d.

# *Profil*

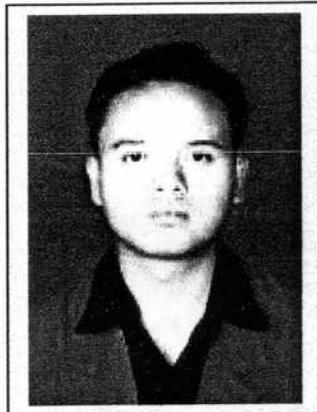
*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang*



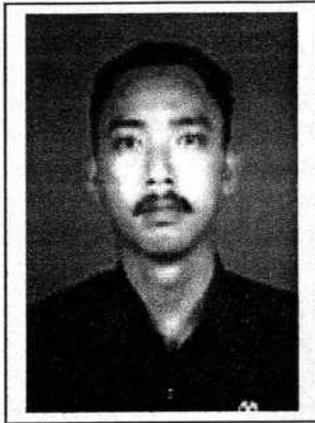
*Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
(PDI-P)*



1. Nama Lengkap : Atang Setiawan, SE
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang 10 April 1968
3. Alamat : Dusun Cipicung Rt 02/01
4. No Tlp/ HP : 0262 429606/ 081320759117
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
  - a. Nama Istri/Suami : Yuliawati
  - b. Jumlah Anak : 2 (dua)
8. Partai Politik : PDIP Perjuangan
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : IV
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : S1 Ekonomi UNPAS Bandung
12. Riwayat Organisasi :
13. Riwayat Pekerjaan :
14. Riwayat Perjuangan :
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Ketua Harian Panmus
  - b. Anggota Komisi B



1. Nama Lengkap : Dadang Rohmawan, SE
2. Tempat/ Tgl Lahir : Cirebon, 09 Agustus 1977
3. Alamat : Dsn Cipeundeuy Rt 04/12  
Desa Cipacing Kecamatan  
Jatinangor
4. No Tlp/ HP : 081321073047
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
  - a. Nama Istri/Suami : Erni Susilawati
  - b. Jumlah Anak : 2 (dua)
8. Partai Politik : PDI Perjuangan
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : Dapil I
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Sirnagalih 1989
  - b. SLTP Rancaekek 1992
  - c. SLTA Rancaekek 1995
  - d. UNWIM 1999
12. Riwayat Organisasi :
  - a. Ketua PAC PDI Perjuangan Jatinangor
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
  - f.
  - g.
14. Riwayat Perjuangan :
  - a.
  - b.
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Anggota
  - b.
  - c.
  - d.



1. Nama Lengkap : Yaya Widarya
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang 07 Oktober 1971
3. Alamat : Dsn. Cikurubuk Rt. 02/02  
Ds. Cikurubuk Kec. Buahdua
4. No Tlp/ HP : 08122401895
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
8. a. Nama Istri/Suami : Cucu Perawati
9. b. Jumlah Anak : 2 (dua)
10. Partai Politik : PDI Perjuangan
11. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
12. Pekerjaan : Anggota DPRD
13. Riwayat Pendidikan : a. SDN Cikurubuk  
b. SMPN Hariang  
c. SMAN Conggeang  
d. Universitas Terbuka
14. Riwayat Organisasi : a. Pengurus DKC Pramuka  
Kwarcab Sumedang  
b. Ketua Karang Taruna  
c. Ketua PAC PDI-P  
Kec. Buahdua
15. Riwayat Pekerjaan : Sekretaris DPC PDI-P  
Kab. Sumedang
16. Riwayat Perjuangan : a. Anggota Komisi A  
b. Anggota Panggar
17. Jabatan di DPRD : a. Anggota Komisi A  
b. Anggota Panggar



1. Nama Lengkap : Ade Nono Sudiono
2. Tempat/ Tgl Lahir : Cirebon, 22 Juli 1963
3. Alamat : Dsn. Cikole RT. 01/01 Desa  
cikole Kec. Cimalaka  
Sumedang
4. No Tlp/ HP : 081320739588
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :
  - a. Nama Istri/Suami :
  - b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : PDI Perjuangan
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : a. SLTA  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.
12. Riwayat Organisasi : a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.
13. Riwayat Pekerjaan : a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.
14. Riwayat Perjuangan : a.  
b.
15. Jabatan di DPRD : a. Anggota Komisi D  
b.  
c.  
d.



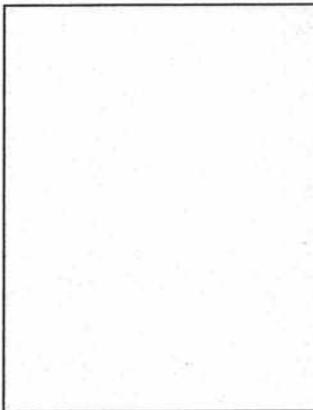
1. Nama Lengkap : Sutisna
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 16 November 1958
3. Alamat : Dsn. Dustan Rt. 01/04  
Situmekar Kec. Cisitu  
Sumedang
4. No Tlp/ HP : 08121455987
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :
  - a. Nama Istri/Suami :
  - b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : PDI Perjuangan
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. SMEA Tahun 1977
  - b.
  - c.
  - d.
12. Riwayat Organisasi :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
  - f.
  - g.
14. Riwayat Perjuangan :
  - a.
  - b.
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Anggota Komisi C
  - b.
  - c.
  - d.



1. Nama Lengkap : Drs. Jajat Wijaya
2. Tempat/ Tgl Lahir : Bandung, 23 Juli 1968
3. Alamat : Dsn. Palasah RT.08/03 Desa  
Palasari Kec. Ujungjaya  
Sumedang
4. No Tlp/ HP : 08122401895
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
  - a. Nama Istri/Suami : Cucu Yuhanah
  - b. Jumlah Anak : 1 (satu)
8. Partai Politik : PDI Perjuangan
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : S1 (Sarjana) IKOPIN
12. Riwayat Organisasi :
13. Riwayat Pekerjaan :
14. Riwayat Perjuangan :
15. Jabatan di DPRD : Anggota Komisi C



1. Nama Lengkap : Rd. Agustin Adinugraha S.
2. Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 27 Agustus 1957
3. Alamat : Jln. 11 April Km. 07 No. 369  
RT. 02/03 Desa Ganeas Kec.  
Ganeas Sumedang
4. No Tlp/ HP :
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
- a. Nama Istri/Suami : Nurul Diba
- b. Jumlah Anak : 4 (empat)
8. Partai Politik : PDI Perjuangan
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : SMAN 1 Budi Utomo  
Jakarta, 1976
12. Riwayat Organisasi :
13. Riwayat Pekerjaan : a. CV. Agung Motor-Jember  
b. PR. Astra Motor Sales-Jember  
c. CV. Varia-Jember  
d. PT. Elnusa-Jakarta  
e. PT. M.K.U-Jakarta  
f. PT. Pendawa Mas-Jakarta
14. Riwayat Perjuangan :
15. Jabatan di DPRD : Anggota Komisi A



1. Nama Lengkap : Kusman Purnama
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 3 April 1959
3. Alamat : Jln. Budi Asih No. 01 Rt.  
01/06 Kel. Regol Wetan Kec.  
Sumedang Selatan Sumedang  
08122183778
4. No Tlp/ HP :
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :
- a. Nama Istri/Suami :
- b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : PDI Perjuangan
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : a. STM Negeri Sumedang  
b.  
c.  
d.  
e.
12. Riwayat Organisasi : a.  
b.  
c.  
d.  
e.
13. Riwayat Pekerjaan : a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.
14. Riwayat Perjuangan : a.  
b.
15. Jabatan di DPRD : a. Anggota Komisi B  
b.  
c.  
d.



1. Nama Lengkap : Drs. Agus Weliyanto Santoso, SH
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 17 Agustus 1959
3. Alamat : Dsn. Cisugan RT. 03/07 Desa Sukahayu Kec. Rancakalong Sumedang
4. No Tlp/ HP : 081321064448
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :
  - a. Nama Istri/Suami :
  - b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : PDI Perjuangan
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. S1
  - b.
  - c.
  - d.
12. Riwayat Organisasi :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
  - f.
  - g.
14. Riwayat Perjuangan :
  - a.
  - b.
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Wakil Ketua
  - b.
  - c.
  - d.

# *Profil*

*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang*



*Partai Golongan Karya (GOLKAR)*



1. Nama Lengkap : Taufiq Gunawansyah, SIP
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 11 November 1968
3. Alamat : Lingkungan Parigi, No. 12, RT. 05/16, Kel.Pasanggrahan Kec.Sumedang Selatan - Kab. Sumedang
4. No Tlp/ HP : 0261-205747/0811249778
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
- a. Nama Istri/Suami : dr. Sri Dwi Omarsari, M.Kes
- b. Jumlah Anak : 1 (satu)
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI/ Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buandua, Surian
10. Pekerjaan : Pejabat Negara
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri Gudang Kopi Sumedang, lulus tahun 1981
  - b. SMP Negeri 2 Sumedang lulus Tahun 1984
  - c. SMA Negeri 1 Sumedang, lulus tahun 1987
  - d. S- 1, Jurusan IIMU Pemerintahan, FISIP - UNPAD, lulus tahun 1994
12. Riwayat Organisasi :
  - a. Ketua Dewan Penasehat KAHMI Kab. Sumedang, tahun 1999 - Sekarang
  - b. Senat Mahasiswa FISIP - UNPAD
  - c. Bidang PTKP BADKO HMI Jawa Bagian Barat
  - d. Ketua DPC Pemuda Panca Marga Kab. Sumedang, tahun 2001 - Sekarang
  - e. Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kab. Sumedang, tahun 1998 - Sekarang
  - f. Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Provinsi Jawa Barat, tahun 2004 - Sekarang
  - g. Ketua Persatuan Pencak Silat Indonesia Kab. Sumedang, tahun 2005 - Sekarang
  - h. Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Kab. Sumedang, tahun 2005
  - i. Dewan Penasehat DEPICAB SOKSI Kab. Sumedang, tahun 2004 - Sekarang
  - j. Dewan Penasehat PKP KOSGORO 1957 Kab. Sumedang, tahun 2005 - Sekarang
  - k. Dewan Penasehat DPD AMPI Kab. Sumedang, tahun 2004 -- Sekarang
  - l. Dewan Penasehat DPC MKGR Kab. Sumedang, tahun 2004 - Sekarang
  - m. Dewan Penasehat Majelis Dakwah Islamiyah Kab. Sumedang, tahun 2004 - Sekarang
  - n. Dewan Penasehat Al-Hidayah Kab. Sumedang, tahun 2004 - Sekarang
  - o. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, tahun 2004 - Sekarang
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a. Staff Pengajar Universitas Terbuka Kampus Sumedang, tahun 1995-1997
  - b. Staff Pengajar STIR Sebelas April Sumedang, tahun 1999-2005
  - c. Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, tahun 1997-2004
  - d. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, tahun 2004-2008
  - e. Wakil Bupati Sumedang, Periode 2008 - 2013
14. Jabatan di DPRD : Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, tahun 2004-2008



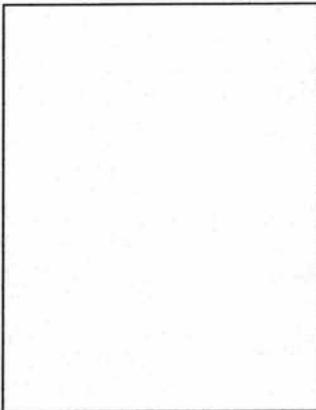
1. Nama Lengkap : Drs. Ismet Suparmat
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 07 Desember 1949
3. Alamat : Jln. Raya Jatinangor No. 40  
Rt. 02/02 Desa Hegarmanah  
Kec. Jatinangor Kab. Sumedang
4. No Tlp/ HP : 08122399703
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
  - a. Nama Istri/Suami : Tita Puspita
  - b. Jumlah Anak : 2 (dua)
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : I / Cimanggung Jatinangor
10. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Sumedang  
2004-2009
11. Riwayat Pendidikan : a. S1 STIA IANRI Bandung
12. Riwayat Organisasi : a. Pendiri Karang Taruna di  
Kel. Kota Kulon Sumedang  
Selatan 1996
  - b. Pengurus KNPI Di Kab.  
Sumedang dan Kotamadya  
Cirebon 1975-1994
  - c. 1975 - 1994, Pengurus AMS  
di Kab. Sumedang dan Ko.  
Cirebon
  - d. 1994 - Sekarang, Pengurus  
Pemuda Pancasila Kab.  
Sumedang
  - e. 1995 - 1999 Pengurus  
Yayasan Pendidikan Pelita  
Tiga (YPPT) Bandung
  - f. 1998 - 1999, Pengurus  
LIVID Desa Hegarmanah
  - g. 2000, Pendiri Koperasi  
Serbaguna Madya Swadya  
Jatinangor
  - h. 2008 - Sekarang,  
Pengurus DKM AL -Huda  
Hegarmanah Jatinangor
  - i. 2008 - Sekarang, Dewan  
Penasihat LPDKM Jawa  
Barat
13. Riwayat Pekerjaan : a. 1970 - 1974 Pegawai Pada  
PTP XIII Perkebunan  
Cisaruni Garut
  - b. 1975 - 1977 Tenaga  
Honoror Pada Pekas.  
Kobang Diklat TNI AD  
Bandung
  - c. 1977 - 1983 JUPEN ( PNS)  
pada KANDEPEN Ko Cirebon
  - d. 1977 - 1999 PNS Pada  
Departemen Penerangan RI
  - e. 1983 - 1995 PNS Pada  
Kantor Diklat Peg. DEPEN  
RI JABAR
  - f. 1995 - 1995 PNS Pada  
KANDEPPEN Kab. Garut
  - g. 1999/2004 - 2004/2009  
Anggota DPRD Kab.  
Sumedang
14. Riwayat Perjuangan : -
15. Jabatan di DPRD : Ketua DPRD



1. Nama Lengkap : Tati Setiawati Kusumah
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 21 Juli 1951
3. Alamat : Dano Permai Blok.B/27 Rt.03  
Rw.11  
Kelurahan Kota Kaler  
Kecamatan Sumedang Utara
4. No Tlp/ HP :
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Pernah Kawin
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan : Dapil V
10. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten  
Sumedang
11. Riwayat Pendidikan : a. SR tahun 1963 di  
Sumedang  
b. SMPN Tasikmalaya Tahun  
1966  
c. SMAN Tasikmalaya Tahun  
1969
12. Riwayat Organisasi : a. Ketua IKWI Bogor, 1986  
s/d 1988  
b. FKPPPI, 1989 sampai  
sekarang  
c. PERWARI Sumedang 1990  
sampai sekarang  
d. Wanita MKGR, 1992 -  
1997  
e. Partai Golkar 1992  
sampai Sekarang
13. Riwayat Pekerjaan : a. koresponden Mandala,  
1971 s/d 1977  
b. KPWS, 1993 s/d 1997  
c. Anggota DPRD Kab  
Sumedang 1997-1999  
d. etua Pengelola JPS-  
Kesehatan, 1997- 1999  
e. Ketua Pengelola Jaminan  
Pemeliharaan Kesehatan  
Masyarakat(JPKM), 1999  
s/d 2004  
f. Karyawan Sekretariat  
Dewan Pengawas, 1999  
s/d 2008.  
g. Anggota DPRD Kab  
Sumedang 2008 s/d 2009
14. Riwayat Perjuangan : -
15. Jabatan di DPRD : a. Panitia Anggaran  
b. Bendahara Fraksi Partai  
Golkar  
c. Komisi A



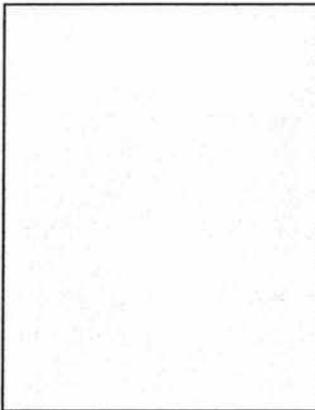
1. Nama Lengkap : Ade Sutrisno
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 20 Juni 1968
3. Alamat : Rt 04 Rw. 02 Desa Pasir Biru  
Kecamatan Rancakalong
4. No Tlp/ HP : 081322859548
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
- a. Nama Istri/Suami : Siti Mariah Spd
- b. Jumlah Anak : 2
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : 2
10. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sumedang
11. Riwayat Pendidikan : a. SD. Pasir Biru  
b. SMP Rancakalong  
c. SMA Tanjung Sari  
d. IKOPIN Jatinangor
12. Riwayat Organisasi : a. Ketua Karang Taruna  
b. Wakil Ketua GKPI 2 PG Kab Sumedang  
c.  
d.  
e.
13. Riwayat Pekerjaan : a. Direktur CV. Lingga Jaya  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.
14. Riwayat Perjuangan :
15. Jabatan di DPRD : a. Anggota Komisi B  
b. Anggota Panggar  
c.  
d.



1. Nama Lengkap : Edi Sunardi SIP
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 23 Nopember 1971
3. Alamat : Jl. Pageur Betis No 165 Sumedang
4. No Tlp/ HP : 0261 206902
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
- a. Nama Istri/Suami : Susi Siti Masriah SP
- b. Jumlah Anak : 2
8. Partai Politik : Partai GOLKAR
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : III
10. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sumedang
11. Riwayat Pendidikan : a. SD 1984  
b. SMP1987  
c. SLA 1990  
d. Fisip AN 1990
12. Riwayat Organisasi : a. KNPI  
b. IMA AMS  
c. SOKSI  
d.
13. Riwayat Pekerjaan : a.  
b.  
c.  
d.  
e.
14. Riwayat Perjuangan :
15. Jabatan di DPRD : a. Komisi D  
b.  
c.



1. Nama Lengkap : Drs. Minan Sukarna
2. Tempat/ Tgl Lahir : Ciamis, 4 Nopember 1944
3. Alamat : Pemancingan clomgado I indah  
Rt. 01 Rw. 09, Desa Sindang  
Galih Cimanggung
4. No Tlp/ HP : 022 7911223
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
8. a. Nama Istri/Suami : Awat Suhernawati
9. b. Jumlah Anak : 8 Orang
10. Partai Politik : Partai Golongan Karya
11. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : Dapil I
12. Pekerjaan : Dosen
13. Riwayat Pendidikan : a. Sarjana Pendidikan IKIP Bdg 1970  
b. AKTA V 1983  
c. MBA 1999
14. Riwayat Organisasi : PK Kec Cimanggung P. GOLKAR
15. Riwayat Pekerjaan : a. Dosen IKIP 1967 s/d 1991  
b. Dosen UNINUS BDG 1976-Skg  
c. PD I FKIP UNINUS 1976-1993  
d. Ket. Jur. Adm. Pendidikan IKIP, 1978-1984
16. Riwayat Perjuangan : -
17. Jabatan di DPRD : Ketua Komisi B



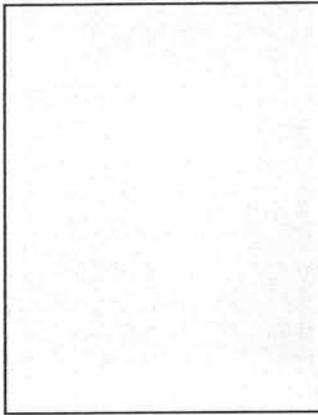
1. Nama Lengkap : Taryana SH
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 18 Agustus 1962
3. Alamat : Dsn Betok RT.02 Rw.01 Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja
4. No Tlp/ HP : 081320210052
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
8. a. Nama Istri/Suami : Aminah
9. b. Jumlah Anak : 3 orang
10. Partai Politik : Partai GOLKAR
11. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : IV
12. Pekerjaan : Anggota DPRD
13. Riwayat Pendidikan : a. SDN Betok  
b. SMPN Sukamenak  
c. SMAN Situraja  
d. FH UNPAS
14. Riwayat Organisasi : a. AMS  
b. AMPI  
c. Partai Golkar  
d.  
e.
15. Riwayat Pekerjaan : a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.
16. Riwayat Perjuangan : -
17. Jabatan di DPRD : a. Anggota Komisi C  
b.  
c.  
d.



1. Nama Lengkap : Jajang Heryana, Amd
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 08 Januari 1974
3. Alamat : Dsn Pamagersari Rt 03 Rw 08  
Desa Jatisari Tanjungsari
4. No Tlp/ HP : 022 7914163, 08122471108
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
7. a. Nama Istri/Suami : Ayi Ratnasari
7. b. Jumlah Anak : 2
8. Partai Politik : Partai GOLKAR
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan : II
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : a. SDN Margajaya  
b. SMPN I Tanjungsari  
c. SMA Negeri Tanjungsari  
d. Politeknik Industri dan  
Niaga Bandung
12. Riwayat Organisasi : a. AMS  
b. AMPI  
c. Partai Golkar  
d.  
e.
13. Riwayat Pekerjaan : a. Sekretaris PK Partai  
Golkar Kec Tanjungsari  
b. Pengurus DPD Partai  
GOLKAR Sumedang  
c. Sekretaris DPC ORMAS  
MKGR Sumedang
14. Riwayat Perjuangan :
15. Jabatan di DPRD : a. Anggota Komisi A  
b.



1. Nama Lengkap : Nanang Rochmat Mulyadi
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 21 April 1941
3. Alamat : Dsn Gamlung, rt 03 rw 06  
desa Pamulihan Kec  
Pamulihan Sumedang
4. No Tlp/ HP : 081321494091
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
7. a. Nama Istri/Suami : Ny Sa'diyah
7. b. Jumlah Anak : 4 (empat)
8. Partai Politik : Partai GOLKAR
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan : II
10. Pekerjaan : Pensiunan PNS
11. Riwayat Pendidikan : a. SD tahun 1955  
b. SMP Tahun 1958  
c. SPG Tahun 1967  
d. WISI Tk I Tahun 1982
12. Riwayat Organisasi : a. Anggota PGRI  
b. Anggota Korpri  
c. Pantai GOLKAR  
d.  
e.
13. Riwayat Pekerjaan : a. Guru SD  
b. Pengawas DIKNAS  
Depdikbud  
c. Kepala Kandep dikbud  
Kecamatan  
d.
14. Riwayat Perjuangan : a. P3R tahun 1961  
b. KAP3 tahun 1966 s/d  
1968
15. Jabatan di DPRD : a. Anggota Komisi C  
b. Anggota Badan  
Kehormatan  
c.  
d.



1. Nama Lengkap : Drs.Eyang Syrif K Supriadi MSi
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang. 05 September 1947
3. Alamat : Rt 03 Rw 08 Desa Licin  
Kecamatan Cimalaka
4. No Tlp/ HP : 081 321 340 675
5. Jenis Kelamin : Laki-laki.
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin  
a. Nama Istri/Suami : M. O. Komala M  
b. Jumlah Anak : 5
8. Partai Politik : Partai GOLKAR
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Dosen STAM Bandung
11. Riwayat Pendidikan : a. SD  
b. SMP  
c. SLA  
d.
12. Riwayat Organisasi : a. MKGR  
b. AMM  
c. BPD  
d.  
e.
13. Riwayat Pekerjaan : a. Guru  
b. Kasi  
c. Dosen  
d.  
e.
14. Riwayat Perjuangan : a. KAPPI  
b. KAMMI
15. Jabatan di DPRD : a. Anggota Komisi A  
b.  
c.  
d.



1. Nama Lengkap : Ir. Edi Askhari
2. Tempat/ Tgl Lahir : Subang, 13 Juli 1967
3. Alamat : Dsn Cipicug 02/01 Desa Sukatani Kecamatan Tanjungkerta
4. No Tlp/ HP : 08122140347
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
- a. Nama Istri/Suami : Ir. Sunsun Gartini
- b. Jumlah Anak : 3 (tiga)
8. Partai Politik : Partai GOLKAR
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : Dapil VI
10. Pekerjaan : Wiraswasta/ Anggota DPRD Kab Sumedang
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD tahun 1980
  - b. SMP Tanjungsiang Subang 1983
  - c. SMAN Ujungberung 1986
  - d. STP Tannjungsari 1991
12. Riwayat Organisasi :
  - a. AMS distrik Sumedang
  - b. AMPI Kab Sumedang
  - c. Sekretaris P.Golkar Tk.Kecamatan 1998-1999
  - d. Bag.Tani Nelayan DPD II P.Golkar-SMD,1999-2001
  - e. WK.Sekretaris DPD II P.Golkar,2001-2004
13. Riwayat Pekerjaan : Ex Karyawan PTP XIII Ciateur
14. Riwayat Perjuangan :
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Ketua Harian Panggar
  - b. Sekretaris Komisi D



1. Nama Lengkap : Rani Hoirunisa, S.Sos
2. Tempat/ Tgl Lahir : Cianjur, 08 April 1971
3. Alamat : Dsn. Canukur RT. 04/01 Desa Sukaluyu Kec. Ganeas Sumedang
4. No Tlp/ HP : 08122349415
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :
  - a. Nama Istri/Suami :
  - b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. S1 Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
  - f.
  - g.
12. Riwayat Organisasi :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
  - f.
  - g.
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
  - f.
  - g.
14. Riwayat Perjuangan :
  - a.
  - b.
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Anggota Komisi C
  - b.
  - c.
  - d.



1. Nama Lengkap : Adang (alm)
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 12 Maret 1948
3. Alamat : Jln. Pangeran Kornel No. 90  
Sumedang
4. No Tlp/ HP : 081320081618
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
7. a. Nama Istri/Suami : Tati Rusmiati
7. b. Jumlah Anak : 3 (tiga)
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : STM Tahun 1968
12. Riwayat Organisasi : a. Ketua distrik AMS SMD  
b. WK.DPD Golkar
13. Riwayat Pekerjaan : a. Ket.Gapensi  
b. wkl.Kadin Sumedang
14. Riwayat Perjuangan : -
15. Jabatan di DPRD : Anggota Komisi D



1. Nama Lengkap : Sidik Jafar
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 05 Juni 1961
3. Alamat : Dsn. Pasar RT. 06/02 Desa  
Sukaratu Kec. Darmaraja  
Sumedang
4. No Tlp/ HP : 022-7805169/08122424004
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :  
7. a. Nama Istri/Suami :  
7. b. Jumlah Anak :  
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : a. SLTA Negeri Sumedang  
b.  
c.  
d.
12. Riwayat Organisasi : a.  
b.  
c.  
d.  
e.
13. Riwayat Pekerjaan : a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.
14. Riwayat Perjuangan : a.  
b.
15. Jabatan di DPRD : a. Anggota Komisi D  
b.  
c.  
d.



1. Nama Lengkap : Ade Sutrisno, SE
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 20 juni 1968
3. Alamat : Dsn. Pasirbiru RT. 02/02  
Desa Pasirbiru Kec.  
Rancakalong Sumedang
4. No Tlp/ HP : 08122194660
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :
  - a. Nama Istri/Suami :
  - b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. S1 Fakultas Manajemen SDM/Personalia (IKOPIN)
  - b.
  - c.
  - d.
12. Riwayat Organisasi :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
14. Riwayat Perjuangan :
  - a.
  - b.
15. Jabatan di DPRD : a. Anggota komisi A
  - b.
  - c.
  - d.



1. Nama Lengkap : Yogaswara
2. Tempat/ Tgl Lahir : Bandung, 16 Januari 1964
3. Alamat : Dsn. Kreteg RT. 004/003  
Desa Margamukti Kec.  
Sumedang Utara Sumedang
4. No Tlp/ HP : 081320530327
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :
  - a. Nama Istri/Suami :
  - b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. SLTA Negeri Bandung
  - b.
  - c.
  - d.
12. Riwayat Organisasi :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
14. Riwayat Perjuangan :
  - a.
  - b.
15. Jabatan di DPRD : a. Komisi D
  - b.
  - c.
  - d.



1. Nama Lengkap : Yogi Maman Sentosa, S.Sos
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 04 Mei 1969
3. Alamat : Dsn. Ganeas RT. 05/06 Desa Ganeas Kec. Ganeas Sumedang
4. No Tlp/ HP : 081320138535
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :
  - a. Nama Istri/Suami :
  - b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. SLTA Negeri Bandung
  - b.
  - c.
  - d.
12. Riwayat Organisasi :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
  - f.
14. Riwayat Perjuangan :
  - a.
  - b.
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Anggota Komisi D
  - b.
  - c.
  - d.



1. Nama Lengkap : Drs. Naya Sunarya
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 22 Juli 1957
3. Alamat : Dsn. Sukaraja RT. 03/05 Desa Kebonjati Kec. Sumedang utara Sumedang
4. No Tlp/ HP : 081320236606
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :
  - a. Nama Istri/Suami :
  - b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. SL STIA YPPM Majalengka
  - b.
  - c.
  - d.
12. Riwayat Organisasi :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
  - f.
14. Riwayat Perjuangan :
  - a.
  - b.
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Komisi B
  - b.
  - c.
  - d.



1. Nama Lengkap : H. Ence Sudrajat
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 05 Februari 1950
3. Alamat : Jl. PLTA Parakan Kondang  
No. 20 Dsn. Cijeungjing  
RT.09/02 Desa Cijeungjing  
Kec. Jatigede Sumedang
4. No Tlp/ HP : 0233-661624/663262/  
081230532
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :  
a. Nama Istri/Suami :  
b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : a. STM Negeri Sumedang  
b.  
c.  
d.
12. Riwayat Organisasi : a.  
b.  
c.  
d.
13. Riwayat Pekerjaan : a.  
b.  
c.  
d.
14. Riwayat Perjuangan : a.  
b.
15. Jabatan di DPRD : a. Komisi D  
b.  
c.  
d.



1. Nama Lengkap : Drs. M. Barnas Komaludin, M.Si
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 05 November 1949
3. Alamat : Perum Dano Permai B. 42 RT.  
03/011 kel. Kota Kaler Kec.  
Sumedang utara Sumedang
4. No Tlp/ HP : 08122328267
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :  
a. Nama Istri/Suami :  
b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : a. S2 Magister Administrasi  
Negara (UNGAR)  
b.  
c.  
d.
12. Riwayat Organisasi : a.  
b.  
c.  
d.  
e.
13. Riwayat Pekerjaan : a.  
b.  
c.  
d.
14. Riwayat Perjuangan : a.  
b.
15. Jabatan di DPRD : a. Komisi C  
b.  
c.  
d.



1. Nama Lengkap : Hj. Yati Suhayati Yusuf
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 02 februari 1942
3. Alamat : Jln. Cipadung Gang Jamin No. 12 RT. 004/006 Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Sumedang
4. No Tlp/ HP : (0261) 206404 - 208178 081320650676
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : SLTA Persamaan
12. Riwayat Organisasi : a. Kader Golkar 1971  
b. BAPEKADA 1975  
c. Wkl.DPD Golkar 2001-2006
13. Riwayat Pekerjaan : a. Anggota DPRD SMD,1985-1992  
b. Anggota DPRD SMD,1997-1999  
c. Anggota DPRD SMD,1999-2004
14. Riwayat Perjuangan : -
15. Jabatan di DPRD : Komisi A



1. Nama Lengkap : H. Aat Permana (alm)
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 21 Juli 1947
3. Alamat : Jln. Raya Darmaraja Km. 24 No. 171 Kec. Darmaraja Sumedang
4. No Tlp/ HP : (0261) 205050 / 08122149380
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : SLTA, 1970
12. Riwayat Organisasi : a. Anggota PPNI  
b. Anggota PMI  
c. Pimpinan Kec. P.Golkar
13. Riwayat Pekerjaan : a. Diangkat PNS thn 1971  
b. Pensiun PNS thn 1997
14. Riwayat Perjuangan : -
15. Jabatan di DPRD : Komisi C



1. Nama Lengkap : H. Faried Susanto
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 17 Juni 1954
3. Alamat : Ling. Panyingkiran Rt. 02/03  
Kel. Situ Kec. Sumedang Utara  
Sumedang
4. No Tlp/ HP : 08122423823
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :
  - a. Nama Istri/Suami :
  - b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : a. SMA Muhammadiyah Bandung  
Tahun 1976
  - b.
  - c.
  - d.
12. Riwayat Organisasi : a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
13. Riwayat Pekerjaan : a.
  - b.
  - c.
  - d.
14. Riwayat Perjuangan : a.
15. Jabatan di DPRD : a. Komisi B
  - b.
  - c.
  - d.



1. Nama Lengkap : Huliman Abdul Gofur, S.Sos
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 05 Juli 1975
3. Alamat : Dsn. Ciledug RT. 01/06 desa  
Sukasirnarasa Kec. Rancakalong  
Sumedang
4. No Tlp/ HP : 08157138396
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :
  - a. Nama Istri/Suami :
  - b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : Partai Golongan Karya
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : a. S1 IAIN Sunan Gunung Jati  
Bandung
  - b.
  - c.
  - d.
12. Riwayat Organisasi : a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
13. Riwayat Pekerjaan : a.
  - b.
  - c.
  - d.
14. Riwayat Perjuangan : a.
15. Jabatan di DPRD : a. Komisi C
  - b.
  - c.
  - d.

# *Profil*

*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang*



*Partai Kesejahteraan Sosial (PKS)*



1. Nama Lengkap : H. Dedy Ambara, LC.
2. Tempat/ Tgl Lahir : Surabaya, 03 Juli 1968
3. Alamat : Jl. Empang No 8 RT 08 Rw.05  
Regol Wetan Sumedang Seatan
4. No Tlp/ HP : 085721918323
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
8. a. Nama Istri/Suami : Ike Medyawati Setiarini
9. b. Jumlah Anak : 3 (tiga)
10. Partai Politik : PKS
11. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : Dapil I
12. Pekerjaan : Anggota DPRD/ Tianshi Internasional Ind
13. Riwayat Pendidikan : a. SD 1981  
b. SMP 1984  
c. SMA 1987  
d. PT 1992
14. Riwayat Organisasi : a. Biro Urusan Pemuda, Wamy, Jkt  
b. Pemuda PUI Kota Bandung  
c. PKS  
d.
15. Riwayat Pekerjaan : a. Direktur Akademi Da'wah Al amal, Bandung  
b. Anggota DPRD  
c. Marketing
16. Riwayat Perjuangan : a.  
b.
17. Jabatan di DPRD : a. Ketua Komisi C  
b. Anggota Panmus  
c.  
d.



1. Nama Lengkap : Rikrik Hartadi
2. Tempat/ Tgl Lahir : Bandung, 8 Maret 1973
3. Alamat : Jl. Prabu gajah agung Gg. Mawar Putih 2 no 1 Sumedang.
4. No Tlp/ HP : 085862049873
5. Jenis Kelamin : Laki-laki.
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
8. a. Nama Istri/Suami : Siti Zuhroh Nurdiniati
9. b. Jumlah Anak : 4 (empat) orang
10. Partai Politik : PKS
11. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI
12. Pekerjaan :
13. Riwayat Pendidikan : a.  
b.  
c.  
d.
14. Riwayat Organisasi : a. PKS  
b.  
c.  
d.  
e.
15. Riwayat Pekerjaan : a. Cv. Usaha Kita  
b. Anggota DPRD Kabupaten Sumedang  
c. PT. Acrest Kinarya Kreasi  
d.  
e.
16. Riwayat Perjuangan : a.  
b.
17. Jabatan di DPRD : a. Sekretaris Harian Panmus  
b. Sekretaris Komisi A  
c.  
d.



1. Nama Lengkap : Drg. Rahmat juliadi
2. Tempat/ Tgl Lahir : Bandung, 7 Juli 1973
3. Alamat : Perum Griya Jatinangor II B  
1-17 Tanjungsari Sumedang
4. No Tlp/ HP : 08122144729
5. Jenis Kelamin : Laki-laki.
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :
  - a. Nama Istri/Suami :
  - b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : PKS
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan :
10. Pekerjaan :
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. UNPAD
  - b.
  - c.
  - d.
12. Riwayat Organisasi :
  - a. PKS
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
  - f.
  - g.
14. Riwayat Perjuangan :
  - a.
  - b.
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Komisi D
  - b.
  - c.
  - d.



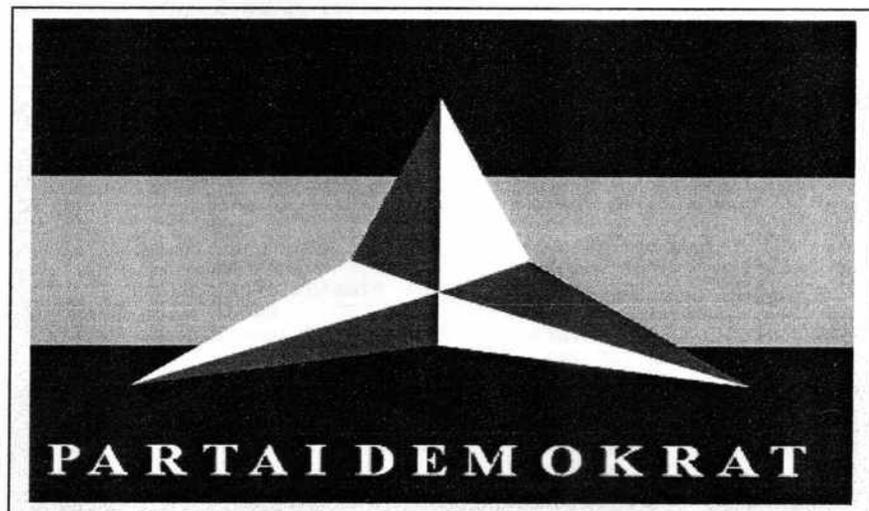
1. Nama Lengkap : Apiatno, SE
2. Tempat/ Tgl Lahir : Bekasi, 06 Oktober 1974
3. Alamat : Dsn. Dago RT.03/02 Desa  
Sukajaya Sumedang Selatan  
Sumedang
4. No Tlp/ HP : 08156203657
5. Jenis Kelamin : Laki-laki.
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :
  - a. Nama Istri/Suami :
  - b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : PKS
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan :
10. Pekerjaan :
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. S1 Sarjana
  - b.
  - c.
  - d.
12. Riwayat Organisasi :
  - a. PKS
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
14. Riwayat Perjuangan :
  - a.
  - b.
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Komisi B
  - b.
  - c.
  - d.



1. Nama Lengkap : Yani Citraeni
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 14 Juli 1969
3. Alamat : Jln. Palasari No. 03  
Sumedang
4. No Tlp/ HP : 08156001869
5. Jenis Kelamin : Laki-laki.
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan :
  - a. Nama Istri/Suami :
  - b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : PKS
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan :
10. Pekerjaan :
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. D3
  - b.
  - c.
  - d.
12. Riwayat Organisasi :
  - a. PKS
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
14. Riwayat Perjuangan :
  - a.
  - b.
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Komisi C
  - b.
  - c.
  - d.

# *Profil*

*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang*



*Partai Demokrat*



1. Nama Lengkap : Drs. H. Sarnata
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 2 Maret 1948
3. Alamat : Dsn. Cigintung Ds. Cigintung Kec. Cisitu Kab. Sumedang
4. No Tlp/ HP : 081320422853
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
- a. Nama Istri/Suami : Sukaenah
- b. Jumlah Anak : 5 (lima) orang
8. Partai Politik : Partai Demokrat
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : VI/ Sitiraja, Cisitu, Darmaraha, Cibugel, Wado, Jatininggal
10. Pekerjaan : Purnawirawan
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. SDN Cigintung
  - b. SMPN Situraja
  - c. SPG Sumedang
  - d. Sarjana IKIP Bandung
12. Riwayat Organisasi :
  - a. Himpunan Mahasiswa Islam
  - b. Badan Koordinasi Taruna Karya
  - c.
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a. Guru 1969-1977
  - b. TNI 1978-2003
  - c.
  - d.
  - e.
14. Riwayat Perjuangan :
  - a.
  - b.
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Ketua Komisi A
  - b.
  - c.



1. Nama Lengkap : Kusdriaman, SH.
2. Tempat/ Tgl Lahir : Bandung 8 Januari 1950
3. Alamat : Ling. Cipeuteuy RT.01/06 No. 3 Kel. Situ Sumedang Utara Sumedang
4. No Tlp/ HP : 0261-210340 / 081322293969
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
- a. Nama Istri/Suami : Leni Yuliatwati
- b. Jumlah Anak : 3 (tiga) orang
8. Partai Politik : Partai Demokrat
9. Daerah Pemilihan/ Mewakili Kecamatan : III/ Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. SDN Bendungan 1 Sumedang 1962
  - b. STN Sumedang 1966
  - c. STMN Sumedang
  - d. UNINUS Bandung 2007
12. Riwayat Organisasi :
  - a. Ketua PAC Partai Demokrat 2002-2007
  - b. Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Sumedang
  - c.
  - d.
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a. Anggota DPRD Kab. Sumedang
  - b.
  - c.
14. Riwayat Perjuangan :
  - a.
  - b.
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Wakil Ketu Fraksi Partai Demokrat
  - b. Anggota PANMUS
  - c. Anggota Komisi B



1. Nama Lengkap : Ending Ahmad Sajidin
2. Tempat/ Tgl Lahir : Garut, 1 Mei 1942
3. Alamat : Dsn. Kebon kalapa RT. 02/02  
Desa Margamukti  
Kec. Sumedang Utara  
Sumedang
4. No Tlp/ HP : 08122127687
5. Jenis Kelamin :
6. Agama :
7. Status Perkawinan :
- a. Nama Istri/Suami :
- b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : Partai Demokrat
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan :
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : a. SPMA  
b.  
c.  
d.
12. Riwayat Organisasi : a.  
b.  
c.  
d.  
e.
13. Riwayat Pekerjaan : a.  
b.  
c.  
d.  
e.
14. Riwayat Perjuangan : a.  
b.
15. Jabatan di DPRD : a. Komisi A  
b.  
c.  
d.



1. Nama Lengkap : Nurani Fuzianti, ST
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 13 Desember 1980
3. Alamat : Dsn. Babakan Peundeuy  
Rt.02/04 Desa Nyalindung  
Kec. Cimalaka Sumedang  
081321026453
4. No Tlp/ HP :
5. Jenis Kelamin :
6. Agama :
7. Status Perkawinan :
- a. Nama Istri/Suami :
- b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : Partai Demokrat
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan :
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : a. STMIK PMBI Tahun 2003  
b.  
c.  
d.
12. Riwayat Organisasi : a.  
b.  
c.  
d.  
e.
13. Riwayat Pekerjaan : a.  
b.  
c.  
d.  
e.
14. Riwayat Perjuangan : a.  
b.
15. Jabatan di DPRD : a. Komisi C  
b.  
c.  
d.



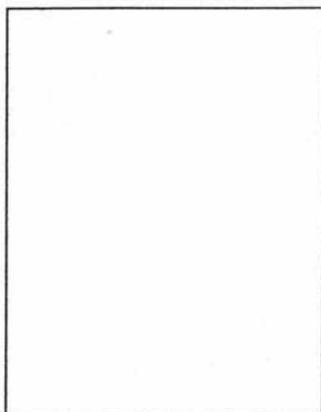
1. Nama Lengkap : Otong Dartum G.N, SE
2. Tempat/ Tgl Lahir : Majalengka, 7 September 1965
3. Alamat : Dsn. Neglasari RT.02/01  
Desa Hegarmanah Kec.  
Jatinangor Sumedang  
08122379131
4. No Tlp/ HP :
5. Jenis Kelamin :
6. Agama :
7. Status Perkawinan :
  - a. Nama Istri/Suami :
  - b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : Partai Demokrat
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan :
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. ULB Tahun 2000
  - b.
  - c.
  - d.
12. Riwayat Organisasi :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
  - f.
  - g.
14. Riwayat Perjuangan :
  - a.
  - b.
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Komisi B
  - b.
  - c.
  - d.

# *Profil*

*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang*



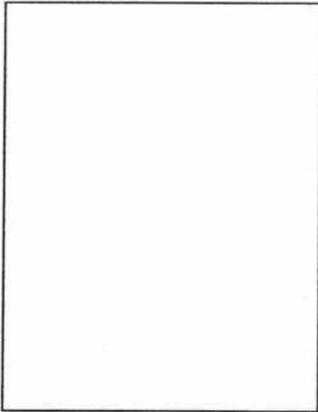
*Partai Amanat Nasional (PAN)*



1. Nama Lengkap : Abu Bakar A. Md.
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 02 Desember 1971
3. Alamat : Jl. Anggrek III  
Perumahan Griya Jatinangor  
I Sukarapih Sumedang
4. No Tlp/ HP : 085221484955
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
- a. Nama Istri/Suami : Elis Sapriah S.Pd
- b. Jumlah Anak : 2 (dua)
8. Partai Politik : PAN
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan : II
10. Pekerjaan : Anggota Dewan
11. Riwayat Pendidikan : a. SD  
b. SMPN I Tanjungsari  
c. STMN Sumedang  
d. ATPU
12. Riwayat Organisasi : a. Bendahara PCM  
Tanjungsari  
b.  
c.  
d.  
e.
13. Riwayat Pekerjaan : a. Konsultan  
b. Kontraktor  
c.  
d.  
e.
14. Riwayat Perjuangan : a. Konsultan  
b. Kontraktor
15. Jabatan di DPRD : a. Anggota Komisi B  
b.  
c.  
d.



1. Nama Lengkap : Sulaeman, S.Ag
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 14 Juni 1973
3. Alamat : Dsn. Pagaden RT. 03/02 Desa  
Margajaya Kec. Tanjungsari  
Sumedang
4. No Tlp/ HP : (022) 7911536
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama :
7. Status Perkawinan :  
    a. Nama Istri/Suami :  
    b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : PAN
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan :  
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan : a. S1  
b.  
c.  
d.
12. Riwayat Organisasi : a.  
b.  
c.  
d.  
e.
13. Riwayat Pekerjaan : a.  
b.  
c.  
d.  
e.
14. Riwayat Perjuangan : a.  
b.
15. Jabatan di DPRD : a. Komisi D  
b.  
c.  
d.



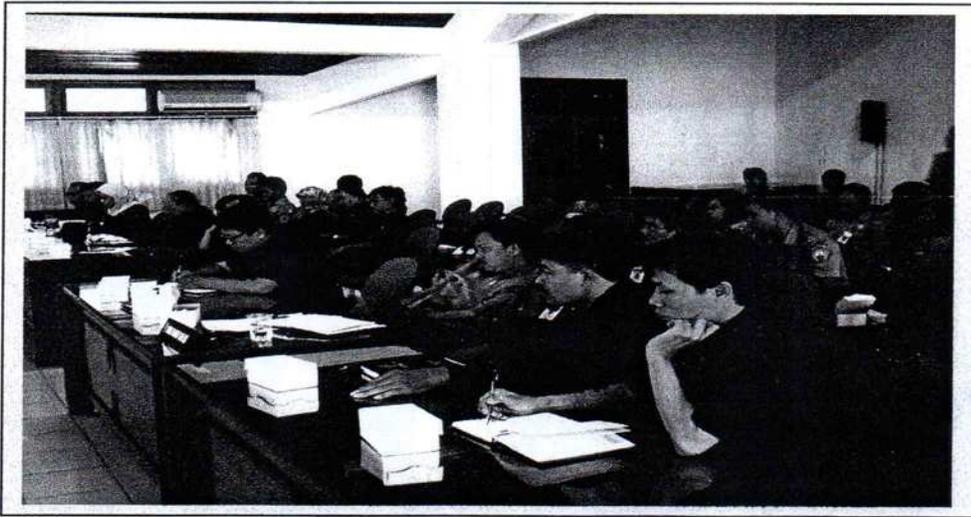
1. Nama Lengkap : Dina Rahman
2. Tempat/ Tgl Lahir : Sumedang, 23 September 1981
3. Alamat : Dsn. Parakanmuncang RT.  
01/01 Desa Cimanggung Kulon  
Kec. Cimanggung Sumedang
4. No Tlp/ HP : 08156209783
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama :
7. Status Perkawinan :
  - a. Nama Istri/Suami :
  - b. Jumlah Anak :
8. Partai Politik : PAN
9. Daerah Pemilihan/  
Mewakili Kecamatan :
10. Pekerjaan : Anggota DPRD
11. Riwayat Pendidikan :
  - a. SMU Tahun 2001
  - b.
  - c.
  - d.
12. Riwayat Organisasi :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
13. Riwayat Pekerjaan :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
14. Riwayat Perjuangan :
  - a.
  - b.
15. Jabatan di DPRD :
  - a. Komisi B
  - b.
  - c.
  - d.

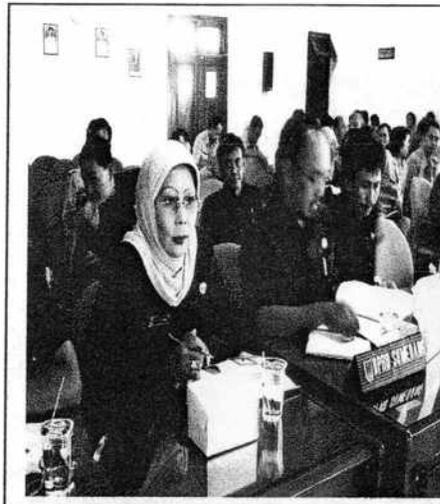
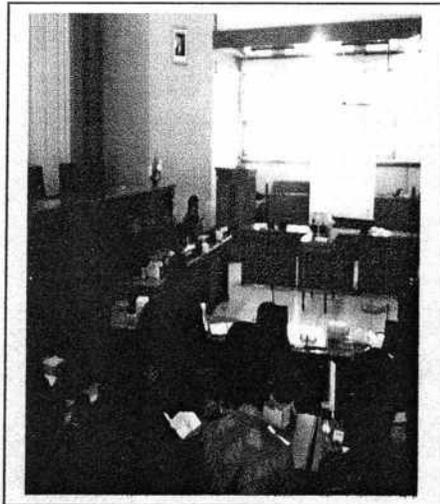


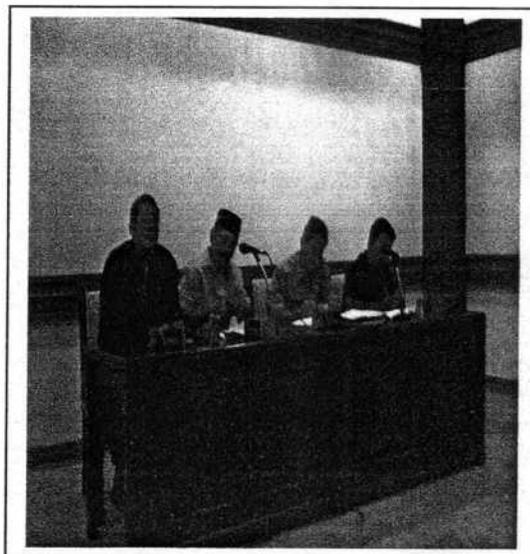
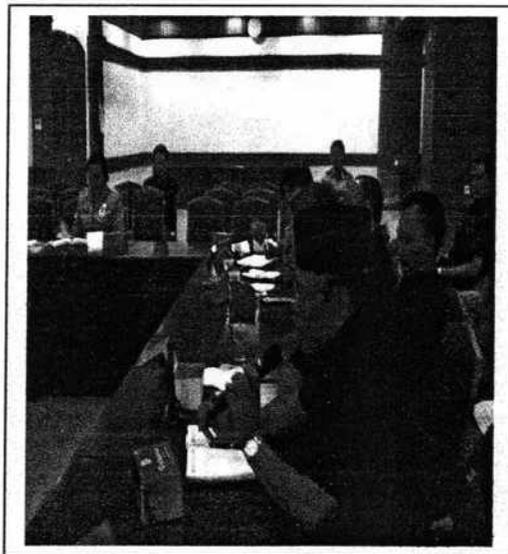
# *Dokumentasi*

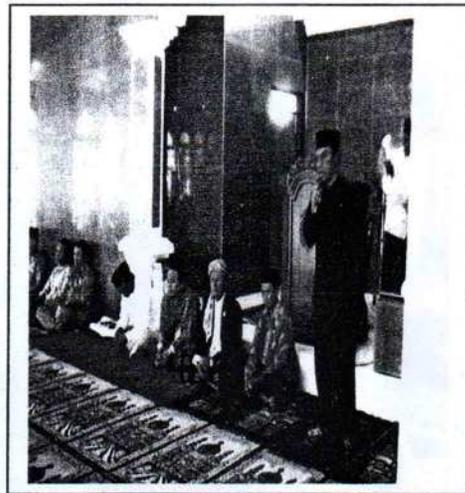
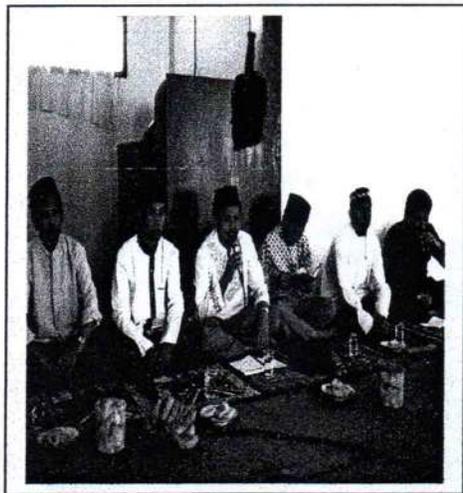
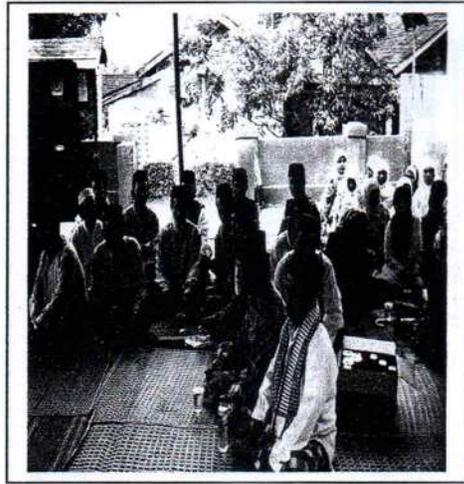
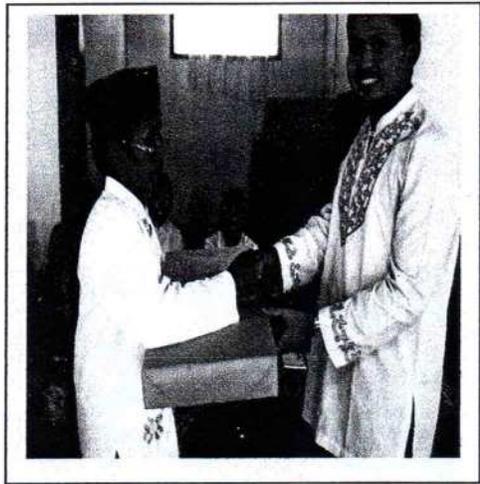
*Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang 2004 - 2009*



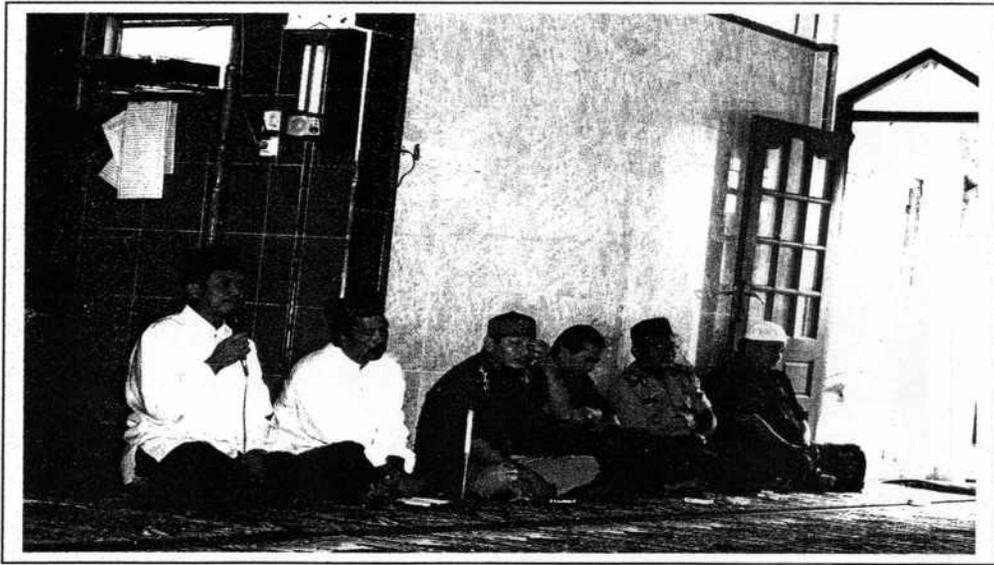












DIETETAPRA  
TANGGAL

tanggal 7004

2004



DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2004 – 2009

NO	PERDA NOMOR	TENTANG	DITETAPKAN TANGGAL
1	2	3	4
1.	3 Th 2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004</li> </ul>	30 September 2004
2.	4 Th 2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang</li> </ul>	10 Desember 2004
3.	5 Th 2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang</li> </ul>	30 Desember 2004
4.	6 Th 2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi Izin Trayek</li> </ul>	30 Desember 2004
5.	7 Th 2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</li> </ul>	30 Desember 2005
6.	8 Th 2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan</li> </ul>	30 Desember 2004
7.	9 Th 2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</li> </ul>	30 Desember 2005
8.	10 Th 2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi Pelayanan Pengadaan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa</li> </ul>	30 Desember 2005
9.	11 Th 2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian Pengambilan Air Tanah</li> </ul>	30 Desember 2004
10.	5 Th 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</li> </ul>	13 oktober 2005

1	2	3	4
11.	6 Th 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Rumah Sewaan</li> </ul>	13 Oktober 2005
12.	7 Th 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005</li> </ul>	14 Oktober 2005
13.	8 Th 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mempunyai Kursi di DPRD Kabupaten Sumedang</li> </ul>	5 Desember 2005
14.	9 Th 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang</li> </ul>	5 Desember 2005
15.	10 Th 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Reklame</li> </ul>	5 Desember 2005
16.	11 Th 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Parkir</li> </ul>	5 Desember 2005
17.	12 Th 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</li> </ul>	5 Desember 2005
18.	1 Th 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005</li> </ul>	1 Februari 2005
19.	2 Th 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004</li> </ul>	30 Juni 2005
20.	3 Th 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang</li> </ul>	13 Oktober 2005
21.	4 Th 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa</li> </ul>	13 Oktober 2005
22.	1 Th 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2006</li> </ul>	7 Februari 2006
23.	2 Th 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang</li> </ul>	21 Maret 2006

1	2	3	4
24.	3 Th 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005</li> </ul>	18 April 2006
25.	4 Th 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang</li> </ul>	5 Juni 2006
26.	5 Th 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumedang</li> </ul>	5 Juni 2006
27.	6 Th 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang</li> </ul>	5 Juni 2006
28.	7 Th 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang</li> </ul>	20 Juni 2006
29.	8 Th 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang</li> </ul>	5 November 2006
30.	9 Th 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006</li> </ul>	16 November 2006
31.	10 Th 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa</li> </ul>	5 Desember 2006
32.	11 Th 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Perangkat dan Pemberhentian Kepala Desa</li> </ul>	5 Desember 2006

1	2	3	4
33.	12 Th 2006	• Penyidik Pegawai Negeri Sipil	5 Desember 2006
34.	13 Th 2006	• Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan	5 Desember 2006
35.	1 Th 2007	• Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang	Diundangkan tanggal 15 Januari 2007
36.	2 Th 2007	• Pembentukan Dana Cadangan	15 Januari 2007
37.	3 Th 2007	• Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang	15 Januari 2007
38.	4 Th 2007	• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007	19 Februari 2007
39.	5 Th 2007	• Pedoman, Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa	25 Juni 2007
40.	6 Th 2007	• Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	Diundangkan tanggal 25 Juni 2007
41.	7 Th 2007	• Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	25 Juni 2007
42.	8 Th 2007	• Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25 Juni 2007
43.	9 Th 2007	• Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	25 Juni 2007

1	2	3	4
44.	10 Th 2007	• Sumber Pendapatan Desa	25 Juli 2007
45.	11 Th 2007	• Badan Usaha Milik Desa	25 Juni 2007
46.	12 Th 2007	• Kerjasama Desa	25 Juni 2007
47.	13 Th 2007	• Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa	25 Juni 2007
48.	14 Th 2007	• Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa	25 Juni 2007
49.	15 Th 2007	• Pembentukan Desa-Desa Baru Hasil Pemekaran Desa di Kabupaten Sumedang	25 Juni 2007
50.	16 Th 2007	• Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007	18 Juli 2007
51.	1 Th 2008	• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008	20 Februari 2008
52.	2 Th 2008	• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025	26 Februari 2008
53.	3 Th 2008	• Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Sumedang	-
54.	9 Th 2007	• Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	25 Juni 2007 ✕

